



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI V DPR RI
DENGAN MENTERI PERHUBUNGAN RI**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : III
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : Raker
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 18 Januari 2023
Waktu : Pukul 10.00 s.d. 14.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara DPR RI dan Secara Virtual *Zoom Cloud Meeting*
- Ketua Rapat : Lasarus, S.Sos, M.Si (F-PDIP) – Ketua Komisi V DPR RI
- Acara : 1. Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022
2. Membahas program kerja tahun 2023
3. Lain-lain
- Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:
47 dari 56 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
11 dari 12 orang Anggota
 1. Lasarus, S.Sos., M.Si.
 2. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.
 3. Mochamad Herviano
 4. Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA.
 5. Sukur H. Nababan, S.T.
 6. Ir. Sudjadi
 7. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.
 8. Sri Rahayu
 9. Ir. Effendi Sianipar
 10. Harvey B. Malaihollo
 11. Djenri Alting Keintjem, SH., M.H.
 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
5 dari 8 orang Anggota
 1. Ir. Ridwan Bae
 2. Drs. Hamka B Kady, M.S.
 3. Cen Sui Lan
 4. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.
 5. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)
6 dari 7 orang Anggota
 1. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.
 2. Ir. Sumail Abdullah
 3. Sudewo, S.T., M.T.
 4. Iis Rosyita Dewi, S.Hum., M.M.
 5. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
 6. Drs. H. Mulyadi, M.MA.

4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
5 dari 6 orang Anggota
 1. Roberth Rouw
 2. Drs. H. Tamanuri, M.M.
 3. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.
 4. Sri Wahyuni
 5. Drs. Fadholi, M. Ikom.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)
5 dari 6 orang Anggota
 1. H. Ruslan M. Daud
 2. H. Irmawan, S.Sos., M.M.
 3. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
 4. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
 5. H. Syafiuddin, S.Sos.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
5 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
 2. Willem Wandik
 3. Drs. H. Anwar Hafid, M.Si.
 4. Lasmi Indaryani, S.E.
 5. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)
3 dari 5 orang Anggota
 1. H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.
 2. Ir. H. Sigit Sosiantomo
 3. KH. Toriq Hidayat, Lc.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)
5 dari 5 orang Anggota
 1. H.A. Bakri H. M., S.E.
 2. Athari Ghauthi Ardi
 3. Hj. Hanna Gayatri, S.H.

4. H. Boyman Harun, S.H.
5. Mesakh Mirin, SKM.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)
2 dari 2 orang Anggota
 1. H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com.
 2. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Menteri Perhubungan RI (Ir. Budi Karya Sumadi)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT / F - PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.):

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,
Yang terhormat Menteri Perhubungan dan seluruh jajarannya,
Dan hadirin yang berbahagia,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi ini untuk melaksanakan rapat sesuai dengan jadwal yang sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu.

Rapat ini dihadiri baik secara fisik maupun secara virtual, menurut informasi dari Sekretariat, rapat ini sudah dihadiri oleh 31 orang Anggota dari 9 unsur Fraksi yang berbeda. Kemudian, rapat ini dihadiri 10 orang fisik dan 21 orang secara virtual. Maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Peraturan Tata Tertib tentang DPR RI, izinkan kami membuka rapat kerja pada hari ini. Dan, sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 10.00 WIB)

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Menteri Perhubungan beserta seluruh jajarannya yang telah menghadiri undangan rapat kami pada siang hari ini.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V yang kami hormati,

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 98 ayat (3), berupa disebutkan bahwa tugas Komisi di bidang pengawasan adalah melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang termasuk APBN serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya. Oleh karena itu, Komisi V DPR RI perlu melakukan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja Kementerian Perhubungan pada Tahun Anggaran 2022 dan juga pembahasan terhadap Persiapan Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023.

Untuk agenda pertama, terkait dengan evaluasi kinerja Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan APBN Tahun 2022 seperti yang sudah kita tetapkan beberapa waktu yang lalu. Pagu Kementerian Perhubungan pada Tahun Anggaran 2022 bertambah dari Pagu awal sebesar Rp32,94 Triliun menjadi Rp33,41 Triliun. Untuk itu, Komisi V DPR RI ingin mendapatkan penjelasan dari Menteri Perhubungan, terkait pemanfaatan dari tambahan pagu tersebut dan selanjutnya hasil akhir pencapaian realisasi anggaran Kementerian Perhubungan sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI pada rapat-rapat sebelumnya. Ini terkait dengan APBN Tahun 2022.

Adapun terkait dengan agenda kedua yaitu Pembahasan Program Kerja Tahun Anggaran 2023. Perlu kami sampaikan bahwa Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp33,4 Triliun. Dengan anggaran yang ada ini kami ingin mengetahui bagaimana anggaran itu direalisasikan, akan direalisasikan sesuai dengan rencana program yang sudah kita bahas bersama di Komisi ini pada rapat-rapat terdahulu.

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi V, pada kesempatan yang berbahagia ini juga kami dari Komisi V DPR RI ingin menyampaikan beberapa hal terkait kinerja Kementerian Perhubungan. Dan, beberapa hal yang perlu di dalaminya tersebut adalah:

1. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi dalam rangka mendukung konektivitas dan distribusi logistik, utamanya aksesibilitas, wilayah terpencil, perbatasan dan kepulauan.
2. Melanjutkan kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi nasional di 34 Provinsi melalui kegiatan padat karya.
3. Langkah-langkah tindak lanjut dari program pembangunan dan pengembangan sarana prasarana transportasi yang terintegrasi antara pelabuhan, bandara, stasiun, dan kawasan industri perikanan.
4. Melakukan kajian sistem transportasi Ibu Kota Negara dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan transportasi darat, laut dan udara.

Bapak-Ibu sekalian,

Demikianlah pengantar singkat rapat kita pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu saya persilakan dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Menteri Perhubungan untuk menyampaikan paparannya terkait dengan materi rapat kita pada hari ini. Saya, persilakan.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (Ir. BUDI KARYA SUMADI):

Terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya, dan
Salam kebajikan,*

**Yang saya hormati Ketua Komisi V, dan
Para Anggota yang saya banggakan,**

Tentu kita panjatkan puji syukur bahwa kita bisa rapat untuk mengevaluasi Anggaran 2022 dan Rencana 2023. Kami laporkan di sini, bahwa uraian singkat dari APBN 2022 dan nanti juga ada Program 2023.

Pertama kali saya sampaikan berkaitan dengan Pagu Anggaran 2022, semula Rp32,9 Triliun, setelah dilakukan final *automatic adjustment* menjadi 33,41. Dari evaluasi *alhamdulillah*, Kementerian Perhubungan bisa melakukan penyerapan sebanyak Rp32,75 triliun adalah 98,02%. Capaian ini adalah capaian tertinggi dari 2018, sampai sekarang terjadi suatu kenaikan. Dan, *alhamdulillah* bisa diselesaikan baik untuk BLU, rupiah murni, SBSN, PHLN dan lain-lain.

Bapak Ketua dan Bapak-Ibu Anggota,

Realisasi PNBPN kita capai Rp9,22 triliun atau (suara tidak jelas) persen dari di atas rencana. Dan, ini tercapai berkat kerja sama teman-teman Kemenhub dan juga dukungan Komisi V. *Nah*, oleh karenanya saya terima kasih kepada Komisi V yang sudah mendukung Kementerian Perhubungan sehingga bisa mendapatkan pencapaian penyerapan 98% dan bisa memenuhi target PNBPN dan bahkan melebihi. *Nah*, tentu saya juga terima kasih kepada teman-teman dari semua Kementerian Perhubungan yang bahu membahu mencapai tugas ini.

**Bapak Ketua dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V, ada Bu selamat datang,
Bu,**

Selanjutnya, kami laporkan juga kalau dikaitkan dengan RPJMN memang kami sudah melakukan beberapa hal. Dan, berkaitan dengan ini banyak yang sudah kita lakukan berkaitan *rute* pelayaran, pelabuhan utama,

route subsidi angkutan tol laut, membangun bandara baru, membangun jembatan udara, dan pembangunan angkutan massal di enam kota.

Bapak Ketua dan Para Anggota Komisi V, yang saya banggakan.

Slide lima, kami sampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu kami laporkan capaian dari Kementerian Perhubungan di tahun 2022:

- Pertama, saya sampaikan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian yang kesembilan kali berturut-turut.
- Penghargaan sebagai Kementerian dengan indeks maturitas kategori tinggi dari Komisi Aparatur Negara.
- Peringkat pertama Anugerah Pelayanan Investasi dari Kementerian Investasi.
- Predikat Badan Publik Informasi Anugerah Keterbukaan Informasi Publik pada Komisi Penyiaran Publik.
- Program terbaik dalam pengelolaan komunikasi dan media dalam ajang PMA yang dilakukan oleh Tempo Group.
- Penghargaan dan penilaian standar layanan publik oleh Ombudsman.
- Penghargaan sertifikasi terbanyak pada Dirjen Kereta Api dan juga dengan lembaga-lembaga lain ATR/BPN, baik dari Jawa Tengah maupun di Sumatera Utara.
- Penghargaan satuan kerja pengelolaan SBSN terbaik di BPTD Sulawesi Tenggara dan juga Kepala Balai Jawa bagian Barat dan di Muntok.
- Predikat penyelenggara pelayanan publik kategori pelayanan prima K/L Umum dari Kementerian Menpan RB kepada Balai Kereta Api Ringan, Sumatera Selatan.
- Ada Tiga UPT yang mendapat WBK dari PAN RB yaitu terminal Guntur Garut, otoritas pelabuhan Makassar dan Bali.
- Apresiasi dan berbagai atas penyelenggaraan publik lancar dalam 2 tahun ini.
- Penghargaan predikat transportasi ramah anak *by the service* BisKita di Kota Bogor.
- Dan, apresiasi KPK atas komitmen dan kontribusi atas aksi pemangkasan birokrasi dan layanan di kawasan pelabuhan. Kami laporkan juga bahwa upaya untuk pemangkasan birokrasi sesuai dengan arahan Presiden, kami sedang melakukan bahkan kita secara sistematis akan bekerjasama dengan satu *international consultant* dan kita akan membuat semua perizinan itu lebih mudah, lebih cepat dan menghasilkan *output* yang maksimal.

**Bapak Ketua yang saya hormati, dan
Para Anggota Komisi V yang saya banggakan,**

Agenda kedua, terkait 2023, pertanggal Oktober 2022 anggaran Kementerian Perhubungan adalah 33,44%. Dan, komposisinya terdapat beberapa hal yang perlu dicermati karena adanya *automatic adjustment* sebanyak Rp1,38 triliun dan *non-automatic adjustment* sebanyak Rp346 miliar. Sehingga, secara efektif Perhubungan memiliki anggaran 31,7 dan apa yang kita lakukan ini akan kita lakukan upaya-upaya agar *automatic adjustment* dan

non-*automatic* bisa kita maksimalkan untuk mencapai tingkat penyerapan tinggi dan *output* yang maksimal.

Kami laporkan di sini bahwa sumber dana komposisi adalah rupiah murni 56%, SBSN 26%, lalu PNBPN 10%, BLU 4%, dan PHLN 1,5%. Kami kemarin, kami laporkan bahwa khusus APBN ini harus dikelola dengan baik dan khusus untuk PNBPN dan BLU secara khusus kami melakukan pembahasan bagaimana upaya intensifikasi dan eksifikasi kita dilakukan di PNBPN dan BLU. Lalu, kita merencanakan akan digunakan apa, kita tidak ingin bahwa jumlah yang relatif besar itu tidak maksimal sehingga kita hanya *spending* untuk kegiatan yang belum tentu maksimal. Kami meminta para KPA merinci apa saja rencananya.

Bapak Ketua dan Wakil dan Para Anggota yang saya banggakan,

Kita juga menyusun penyusunan RAPBN 2023, total PNBPN 3,6 triliun targetnya 7 triliun, sedangkan target PNBPN hasil rapat kerja menjadi 8 triliun atau ada satu penambahan. Oleh karenanya, penambahan sebesar 1 triliun ini harus kita waspadai dan melakukan *effort*. Apa yang kita akan lakukan *effort* itu satu adalah intensifikasi sekali lagi saya sampaikan, jadi baik pelabuhan, bandara, terminal akan kami mintakan kepada sektor untuk melakukan intensifikasi dan juga eksentifikasi katakanlah ada pelabuhan atau tempat-tempat tertentu yang belum dikenakan pengenaan PNBPN kita jangkau dengan satu mekanisme yang (*suara kurang jelas*).

Bapak Ketua dan Para Anggota Komisi V yang saya hormati,

Slide 10 saya laporkan bahwa di 2023 ini, kita akan lakukan transportasi ekonomi yang inklusif dan kita jabarkan dalam 10 prioritas:

1. Pengembangan konektivitas seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, dan mendukung perekonomian wilayah.
2. Mendukung dan meningkatkan keselamatan, jadi keselamatan ini menjadi suatu hal yang penting.
3. Lalu mendukung program peningkatan SDM, fungsi dari BPSDM semakin penting dan kami harapkan BPSDM bisa menelurkan SDM yang baik.
4. Lalu mendukung pemerataan pembangunan nasional dan menyentuh daerah terpencil, terluar dan terdepan. Kemarin kami sempat ke Engganu, pulau Engganu di sana kita membangun bandara dan juga pelabuhan, bekerja dengan PUPR maka konektivitas di pulau terluar itu berjalan dengan baik dan *insya Allah* kami melakukan bersama-sama dengan Kementerian PUPR.
5. Program pro rakyat mendukung PEN, saya pikir kita lakukan apa yang kita lakukan di daerah berorientasi pada hal yang pro rakyat. Lalu memastikan MYC atau *multiyears contract* berkait dengan baik.
6. Lalu, kebutuhan gaji secara proporsional menyelesaikan *tunggakan* pemenuhan dana pendamping.
7. Lalu melakukan perencanaan dan pengembangan IKN transportasi massal kota. Jadi, secara *planning* kita mempersiapkan bandara

letaknya di mana, hari jumat ini saya akan ke sana. Lalu jalan kereta api seperti apa, kita finalisasi juga kita akan mulai penuh pembuatan semacam pelabuhan semacam marina ya, yang menghubungkan dari Balikpapan menuju ke IKN, selain itu kita upayakan kendaraan listrik.

8. Lalu kita pemenuhan kebutuhan pokok, gaji tentu kita akan memberikan sesuai dengan apa yang dilakukan kalau ada *tunggakan* kita harus selesaikan.
9. Melakukan perencanaan dan pengembangan IKN dan transportasi massal perkotaan dengan baik.
10. Mendukung digitalisasi ya, dan juga mengoptimalkan *creative financing*.
11. Mengurangkan energi terbarukan dan mobil listrik menjadi satu *concern* dari kita dan ini *insya Allah* bisa kita laksanakan dan Pak Presiden selalu memberikan dukungan dan catatan kita untuk melakukan.

Bapak Ketua, Pak Wakil Ketua yang baru datang dan juga Anggota,

Pada *slide*, terakhir saya sampaikan bahwa program strategis di 2023 ini kita melakukan pengembangan infrastruktur konektivitas dan juga mengutamakan keselamatan lalu bagaimana kita meningkatkan layanan dan peningkatan SDM. Demikian, *overview* kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih atas atensi dan dukungannya.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Menteri.

Bapak-Ibu sekalian,

Demikian paparan dari Menteri Perhubungan terkait dengan materi kita pada hari ini. Yang pertama, Evaluasi Kinerja Serapan Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2022 dan Persiapan Pelaksanaan APBN Tahun 2023, sama seperti kita bahas dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang kemarin.

Baik, saya tidak ingin berpanjang lebar. Saya beri kesempatan kepada Anggota yang sudah mendaftar, di meja Pimpinan yang akan melakukan pendalaman terhadap materi rapat kita pada siang hari ini. Yang pertama, Pak Suryadi Jaya Purnama, kemudian bersiap-siap Pak Anwar Hafid. Saya persilakan Pak Suryadi Jaya Purnama.

F – PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):

Terima kasih, Pak Ketua.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

Yang saya hormati Pak Ketua, Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V,

**Bapak Menteri, terima kasih, Pak,
Bapak Sekjen, Pak Irjen dan Para Dirjen beserta seluruh jajaran,
Selamat tahun baru Pak di pertemuan pertama dengan Pak Menteri di
tahun 2023,**

Saya langsung saja dari beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada rapat kita kali ini. Yang pertama, saya apresiasi capaian-capaian dari Kementerian Perhubungan yang menurut saya ini relatif cukup baik ya. Misalnya di tol laut, realisasi yang sudah 33 *rute* yang sebelumnya 25 *rute*. Saya kira karakteristik daerah kita negara kita adalah daerah kepulauan memang perlu terus ini ditingkatkan terutama di wilayah-wilayah Indonesia bagian timur, ya karena itu bagian dari pelayanan dasar. Kemudian, namun demikian ada juga yang masih agak jauh dari target seperti panjang jalur kereta api. *Nah*, ini mungkin perlu evaluasi apa kendala-kendalanya ini baru sampai 11,4%, ini yang pertama.

Berikutnya, masih seputar kereta api, kita kan di 2023 ada rencana subsidi Rp3,3 triliun untuk *public service obligation* yang tentu saja ini akan bisa mengembalikan harga tiket kereta api. *Nah*, oleh karena itu saran kami terkait dengan ini adalah agar Pemerintah tidak terlalu sering mewacanakan untuk kenaikan harga tiket di KRL dan yang lain. Karena sebetulnya PSO ini adalah untuk menjamin stabilitas harga dan membantu Pemerintah. Kita *tau* kereta api adalah transportasi favorit ya di wilayah Jabodetabek dan ini sangat membantu masyarakat terutama pada saat pasca pandemi. *Nah*, ini mungkin jadi catatan dan nanti kita diarahkan untuk membangun sarana, itu catatan kami yang kedua.

Yang ketiga, mengenai bandara baru yang ditargetkan 21 lokasi, saya kira ini perlu ada evaluasi ulang karena beberapa bandara kita yang sudah terbangun ini belum beroperasi bahkan belum efektif, ya. Kita kekurangan anggaran cukup besar untuk membangun dan membiayai berbagai kegiatan. Tetapi, kadang di satu sisi ada pemborosan-pemborosan yang barangkali ini bisa kita pertimbangkan. Jadi, ini mungkin catatan saya yang kedua.

Berikutnya adalah ini hasil keluhan dari masyarakat terkait dengan harga tiket yang di beberapa *rute* untuk penerbangan ini tidak masuk akal, Pak. Saya kira ini perlu ditertibkan karena kita *tau* harga tiket ini kan komponennya memang ada kenaikan di bahan bakar ya, harga bahan bakar dan operasional itu terbesar memang di bahan bakar. Tapi, kalau kita buat simulasi, sepertinya faktornya bukan cuma itu. Misalnya ambil contoh ya saya sering bolak balik dari Denpasar ke Lombok, itu harganya tiketnya kadang-kadang lebih mahal dari Lombok ke Jakarta. Padahal kita tahu tidak mungkin bahan bakar yang dihabiskan dari Denpasar ke Lombok yang hanya 10-15 menit itu sama dengan ke Jakarta yang hampir 2 jam.

Ini sepertinya tidak ada pengawasan sama sekali, termasuk juga dari Lombok ke Bima itu harganya di atas Rp1 Juta, padahal penerbangannya hanya 15-20 menit *gitu*. Lebih murah kita ke Singapore daripada ke dalam daerah kita sendiri dalam satu Provinsi. Saya kira ini perlu penjelasan lebih rasional ya. Belum lagi di beberapa maskapai kadang-kadang pelayanannya

AC tidak dihidupkan. Kita kepanasan begitu saja mungkin untuk menghemat, tapi saya kira ini juga penting bagian dari standar pelayanan minimum. Itu beberapa catatan kami terkait dengan evaluasi di 2022.

Nah, selanjutnya untuk 2023 Pak Menteri saya mulai dengan bersifat umum. Pertama pola koordinasi dan komunikasi kita sebagai mitra dengan Kementerian Perhubungan, seluruh jajaran, dengan Anggota Komisi V baik di pusat maupun perwakilan-perwakilan di daerah, Kepala Balai, KSOP dan sebagainya. Kami melihat atas diskusi dengan kawan-kawan di Komisi V, belum menjadi budaya organisasi, lebih pada pola komunikasi itu ditentukan oleh gaya personal. Ada pejabat yang memang gayanya bagus ya baguslah kita berkomunikasi. Tapi ada yang, ya mungkin karena personalnya tidak mampu berkomunikasi akhirnya kita kesulitan berkoordinasi. Ini menunjukkan bahwa pola koordinasi kita belum merupakan budaya organisasi di satu institusi.

Oleh karena itu, Pak Menteri, dan saya yakin ini bukan pengalaman saya pribadi karena teman-teman juga menceritakan seperti itu. Begitu ada hal yang kita sepakati ada koordinasi yang memang kita buat mekanismenya, ada daftar-daftar program yang mungkin sudah kita usulkan dan bagaimana menindaklanjuti ini perlu disamakan, jangan sampai tergantung orangnya, besok berganti lain lagi polanya. Atau mungkin ada yang mungkin sering lebih aktif, berbeda perlakuan dalam merespon pola koordinasi ini. Saya kira ini penting Pak Menteri, Pak Sekjen agar pola komunikasi kita ya tentu memang ada faktor-faktor personal. Tapi, barangkali itu agar lebih didominasi oleh nuansa koordinasi kelembagaan yang sudah kita sepakati, *gitu*. Agar kalau sudah personal ini akan berbeda nanti kondisinya. *Nah*, itu terkait dengan harapan kita ke depan, mengenai komunikasi di 2023.

Nah, selanjutnya terkait dengan program-program dari daerah. Ya memang pertama, kami berharap program yang berbasis masyarakat, padat karya ini juga sekali lagi seperti tadi kadang berbeda antara misalnya di KSOP yang satu dengan yang lain di daerah-daerah itu berbeda ya, ini mungkin agar ditingkatkan ya, termasuk juga program-program padat karya yang lain komunikasi dengan kami di Komisi V.

Nah, yang berikutnya ada beberapa usulan dari daerah yang saya kira ini perlu ditindaklanjuti. Pertama, kita sudah lama mengusulkan untuk segera terealisasinya Pelabuhan Kilo. Dan, ini juga dengan Bappenas kemudian dengan Pemda sudah menyiapkan, apa yang menjadi kewajiban Pemda. Yang penting progres perencanaan dan lain-lain ini tidak boleh terhenti, jadi harus terus berjalan. Kami memaklumi Pemerintah sedang kekurangan anggaran, tetapi proses perencanaan dan menuju ke realisasi fisik ini juga harus terus dijalankan.

Yang kedua, di beberapa daerah wisata di Pulau Lombok ini jalannya sudah cukup bagus dari Kementerian PU. Tetapi, sarana keselamatan jalan seperti PJJU, kemudian juga rambu-rambu dan sebagainya ini banyak yang belum terpenuhi. Sehingga, wisatawan yang tadinya bersemangat hadir di sana, tidak nyaman karena beberapa fasilitas keselamatan kesehatan ini belum

terpenuhi. Intinya ini ada sinkronisasi, begitu ada jalan dibangun kemudian di situ Kementerian Perhubungan juga hadir ya untuk melengkapi berbagai sarana yang diperlukan.

Yang ketiga adalah pembangunan berbagai sarana transportasi laut di pulau-pulau kecil di pulau Lombok ya ada di Gili Gede, ada di banyak gili di pulau Lombok, gili itu adalah pulau kecil ya, disebut gili kalau di sana. Dan, juga kami mengusulkan perlu ada hibah bus laut ya. Kalau kita kan ada rutin ya untuk bis sekolah *gitu*, sementara daerah kita daerah kepulauan. Seperti di Maluku kemudian di Provinsi di Sulawesi beberapa Provinsi kepulauan, ada kita punya 8 Provinsi kepulauan. Dan, mungkin ada kendaraan transportasi laut yang memang dikhususkan untuk operasional di pulau-pulau kecil yang ada di daerah kita.

Nah, ini mungkin yang bisa kami sampaikan, secara tertulis ada beberapa hal yang nanti akan kami serahkan ke Pak Menteri atau melalui Pak Sekjen. Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Suryadi Jaya Purnama. Memang soal tiket ini Pak Menteri, kami mendapat banyak keluhan di sini. Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya maskapai yang beroperasi. Kemarin ini kan lapangnya karena terbatasnya pesawat, jadi antara *supply* dan *demand* ini tidak imbang, *demand*-nya tinggi *supply*-nya kurang. Sekarang mudah-mudahan saya dapat informasi di Garuda sudah nambah unit, Pak. *Nah*, Garuda ini kan dulu kalau *nggak* salah *sih* dari seratus sekian pesawat hanya tinggal 30-an sekian pesawat. Ya, pasti terjadi pengurangan pesawat yang lebih 100 unit, ini dampaknya pasti terhadap pasar ini luar biasa. Sehingga ada maskapai yang bertahan dengan ketersediaan pesawatnya akhirnya karena *demand*-nya tinggi dan *supply*-nya terbatas ya, terjadilah harga tiket yang tinggi.

Ini tugas Kementerian Perhubungan bagaimana menjaga lapangnya ini supaya situasi dunia penerbangan kita ini tetap kondusif dan cepat tumbuh kembali ya. Kemudian, kita berharap seperti kita ketahui, Merpati sudah *nggak* ada ya, muncul Pelita tapi Pelita kan pesawatnya *nggak* banyak. Kita berharap kemarin Pelita Air ini bisa *supply* pesawat yang banyak ternyata unitnya sedikit.

Kemudian, di segmen yang ATR, Pak, kalau penerbangan-penerbangan dekat itu kan banyak pakai ATR *nih*. *Nah*, yang *supply* ATR itu masih sangat terbatas ya. Di tempat kita sana itu seringkali apa namanya kadang terbang kadang *nggak* Pak karena unitnya *nggak* ada. Jadi, ya walaupun harga tiketnya sudah mahal.

Pak, ini Pak Novi ini mantan Dirjen Udara, saya kalau dari Pontianak ke Sintang itu Pak, harga tiketnya itu lebih mahal daripada Pontianak-Jakarta, Pak. Padahal terbangnya itu hanya 40 menit, ke sini 1 jam 10 menit, walaupun harga tiketnya lebih mahal Pak kadang-kadang pun pesawatnya *nggak* dapat

kita. Jadi, itulah kondisinya hari ini tantangan buat kita mudah-mudahan, kalau kita mendorong pertumbuhan ini kan, Pak Suryadi, varian-varian ini kan harus kita urus ini, Pak. Bagaimana orang *gampang* bergerak ke mana-mana, sehingga kemudian juga baik perpindahan manusia dan perpindahan barang menjadi mudah, ya ini lapangannya sekarang Pak.

Kita ini kan mau bangkit *ngomongnya nih*, sudah bangkit dari keterpurukan akibat pandemi covid-19. *Nah*, sekarang kan suasananya saya lihat nih Pak Menteri sudah tidak pakai masker, ya saya juga sudah tidak pakai masker, Pak Dirjen Darat juga sudah berani tidak pakai masker. Kalau dulu *nggak* berani Pak, *ngomong* pun kita pakai masker di sini ya. Jadi, hanya Pak ini *nih* Kepala KNKT kelihatannya masih belum cukup percaya diri *nih* masih pakai masker. Jadi, itu suasananya sudah mulai membaik, Pak, *nah* situasi yang membaik ini salah satu tulang punggung untuk kita bisa *recovery* ini, Pak Menteri adalah sektor Menteri Perhubungan ini, baik angkutan darat, laut dan udara, Pak. *Nah*, kalau ini sudah bisa kita kembali normal, saya dapat informasi kemarin Bali itu berbanding tahun lalu sudah 135% Pak, penerbangan ke Bali sudah 135% saya sudah baca di media kemarin berarti suasananya sudah sangat membaik.

Tapi 135% ini bukan dari tertinggi pada waktu dulu, Pak, ini dari tahun lalu maksudnya perbandingannya. Jadi, tapi tanda-tanda bahwa kita akan pulih, kita akan *recovery* lebih cepat kelihatannya sudah mulai nampak. Ya, itu tadi Pak, tantangannya, lapangannya yang masih masyarakat hadapi itu harga tiket mahal. Kalau harga tiket mahal, cargo juga pasti mahal, Pak. *Nah*, kalau tiket mahal, cargo mahal ini kan mengerem pertumbuhan ekonomi judulnya. Jadi saya rasa mohon izin, Pak Menteri, kerja lebih keras teman-teman di Kementerian Perhubungan bagaimana kita bisa *men-support* pertumbuhan ekonomi ini menjadi lebih baik seperti yang tadi Pak Suryadi Jaya Purnama sampaikan.

Selanjutnya, sebelum berikutnya tadi adalah Pak Anwar Hafid, Pak Anwar Hafid saya persilakan dari Dapil Sulawesi Tengah Pak ya

F – P. DEMOKRAT (Drs. H. ANWAR HAFID, M.Si):

Siap.

KETUA RAPAT:

Palu, ini saudaranya Pak Muhidin *nih*, Pak. *Nah*, silakan Pak Anwar Hafid.

F – P. DEMOKRAT (Drs. H. ANWAR HAFID, M.Si.):

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian,

**Bapak Pimpinan yang kami muliakan,
Pak Menteri dan seluruh jajarannya yang kami hormati,**

Pada kesempatan yang baik ini, mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi dan membaca apa yang kami kami disuguhkan soal Capaian Kegiatan Prioritas Kemenhub 2022 dan Rencana Kegiatan 2023, ada beberapa hal Pak Menteri yang akan kami dalam.

Yang pertama, terkait dengan tol laut, Pak Menteri. Saya *concern* di sini, karena tol laut ini adalah salah satu janji Bapak Presiden dan ini juga sangat membantu khususnya kawasan timur Indonesia. Beberapa kegiatan dan memang masyarakat sudah mulai menikmati adanya program tersebut. Yang ingin saya dapatkan informasi, Pak Menteri, salah satu faktor penunjang daripada tol laut ini adalah tersedianya pelabuhan-pelabuhan utama yang tentu memenuhi standar. Minimal, minimal kalau saya berpikir bahwa di setiap Kabupaten daerah-daerah yang ada di kawasan timur Indonesia ini telah memiliki pelabuhan utama yang memenuhi standar. Saya hanya ingin mendapatkan informasi dari progres pelaksanaan tol laut ini, apakah semua daerah-daerah Kabupaten di daerah kawasan timur Indonesia ini sudah tersedia sarana dan prasarana pelabuhan utama yang akan mendukung pelaksanaan program tol laut tersebut.

Contoh misalnya, kami di Sulawesi Tengah Pak Menteri, ada beberapa Kabupaten yang memang sampai saat ini belum memenuhi, belum tersedia sarana dan prasarana pelabuhan yang memadai untuk itu. Salah satu misalnya kawasan salah satu Kabupaten Morowali, Pak Menteri. Itu adalah Kabupaten yang kita tahu persis adalah Kabupaten yang juga merupakan daerah kawasan industri di sana, tapi pelabuhan utamanya Pak Menteri itu kemarin *alhamdulillah* sudah ditingkatkan menjadi berdiri sendiri dari unit Syahbandar Kolonedale, itu terima kasih, Pak Menteri. Namun, kami berharap ke depan ini sarana dan prasarana pelabuhan tersebut dapat ditingkatkan sehingga ini akan terus memperlancar pelaksanaan program tol laut ini ke depan.

Demikian, juga ada salah satu Kabupaten di kepulauan, Pak Menteri, Kabupaten Banggai Kepulauan. Ini juga salah satu daerah yang memiliki potensi yang cukup besar dari sektor perikanan, namun belum tersedia sarana dan prasarana pelabuhan yang memadai, itu terkait dengan pelaksanaan tol laut.

Kemudian yang kedua, soal pembangunan bandara, saya lihat di sini terlaksana ada 10 lokasi. Saya kembali mengingatkan kepada kita semua dan juga menyampaikan aspirasi dari Bapak Gubernur, Pak Menteri. Beliau menyampaikan kiranya sudah bisa dipikirkan untuk peningkatan status Bandara Mutiara Sis Al Jufri menjadi pelabuhan bandara internasional dalam rangka mendukung seluruh kegiatan kawasan industri yang ada di Sulawesi Tengah dan juga kawasan ekonomi khusus Kota Palu. Dan, kita tau persis bahwa Sulawesi Tengah ini adalah salah satu penyangga utama Ibukota Negara yang baru yang begitu dekat dan bisa menjadi penghubung kawasan timur Indonesia dengan Ibukota Negara di Kalimantan. Itu yang pertama berkaitan dengan kegiatan 2022.

Dan, untuk Progres 2023, ada beberapa hal Pak Menteri yang saya lihat di sini. Yang pertama soal dukungannya, dukungan Kementerian Perhubungan

terhadap destinasi pariwisata prioritas dan super prioritas. Saya ingin mengingatkan kepada kita, bahwa, di Sulawesi Tengah itu Pak Menteri ada salah satu danau yang sangat terkenal yaitu Danau Poso. Danau Poso ini adalah salah satu danau yang terdalam yang kalau tidak salah termasuk terdalam di dunia. Dan, di sana juga ada peninggalan purba yaitu batu megalitik yang menjadi salah satu keajaiban dunia tentunya. *Nah*, saya berharap kiranya destinasi ini juga mendapatkan dukungan dari Kementerian Perhubungan terutama soal Bandara Poso, Pak Menteri.

Bandara Poso ini adalah satu bandara pertama ya, pertama di Indonesia timur termasuk di terutama di Sulawesi Tengah sebetulnya bandara yang (suara kurang jelas) pada saat itu. Dan, sampai hari ini memang kondisi bandara ini memang tidak terlalu, apa, belum memenuhi banyak hal yang harus di perlu dibenahi Pak Menteri salah satunya adalah *runway* atau landasannya yang masih belum terlalu belum panjang, ya. Sehingga, diharapkan dalam rangka mendukung destinasi wisata di Danau Poso ini kiranya dipikirkan ke depan bandara Kasiguncu yang ada di Poso itu mendapatkan perhatian khusus. Kita berharap dalam rangka upaya bangsa Indonesia, Bapak Presiden untuk memulihkan Poso dari konflik kemanusiaan. Ini salah satu caranya adalah dengan cara menyediakan sarana dan prasarana transportasi khususnya bandara.

Demikian juga Pak Menteri, saya menyampaikan aspirasi juga dari Bupati Poso terkait dengan rehabilitasi revitalisasi terminal A yang ada di Kota Poso. Kota Poso ini adalah salah satu kota yang sangat strategis dari beberapa, dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo itu akan melewati Kabupaten Poso apabila ke Palu Sulawesi Tengah. Dan, kondisi terminalnya memang sangat-sangat memprihatinkan, kita *tau* persis bahwa Kota Poso dalam beberapa dekade terakhir ini memang sangat hancur ketika terjadi konflik kemanusiaan beberapa waktu yang lalu.

Itu yang ingin saya sampaikan, Pak Menteri, beberapa hal termasuk aspirasi-aspirasi yang disampaikan lewat apa yang kami serap pada saat pelaksanaan reses kemarin. Saya bacakan saja, Pak Menteri langsung, yang pertama dari Bapak Bupati Banggai Kepulauan. Mohon kiranya, Kementerian Perhubungan dapat memikirkan ke depan untuk pembangunan pelabuhan nasional di Salakan, ini pulau yang saya sampaikan tadi. Ini memang pelabuhannya ini adalah kewenangan Kementerian Perhubungan Pak Menteri. Kalau ini apa bisa menghubungkan dari Kabupaten Banggai ke Salakan kemudian ke Kabupaten Banggai Laut, ada dua Kabupaten di kepulauan itu. Sehingga kehadiran pelabuhan ini sangat-sangat mendukung kelancaran transportasi dari darat ke kepulauan.

Kemudian yang kedua, Pak Gubernur juga menyampaikan aspirasi Pak Menteri, yaitu pembangunan pelabuhan Tamukasimbar, ini dalam rangka mendukung ya IKN. Kita *tau* bahwa kehadiran pelabuhan nanti ini akan memudahkan ya arus transportasi dari kawasan timur Indonesia menuju IKN. Kemudian yang kedua, pengembangan terminal pelabuhan penyeberangan Taipa, ini sudah progres kalau tidak salah di sana sekarang, tinggal ke depan masih perlu mendapatkan dukungan dari Kementerian Perhubungan.

Saya kira itu beberapa hal Pak Menteri yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas segala dukungan pembangunan khususnya di Sulawesi Tengah selama beberapa dekade terakhir ini. Dan, kami berharap ke depan akan mendapat dukungan yang lebih besar, kita *tau* bahwa Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu baru bangkit dari bencana tsunami likuifaksi dan gempa bumi beberapa waktu yang lalu, terima kasih. Pimpinan.

Wallahu musta'an.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Pak Anwar Hafid. Bu Sri Rahayu silakan. Bu, bersiap-siap Pak Muhammad Aras.

F – PDIP (SRI RAHAYU):

Terima kasih. Ketua.

Ketua dan Pimpinan, serta Anggota Komisi V yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Sekjen dan Pak Dirjen, seluruh jajaran yang saya hormati,

Langsung saja, yang pertama di Dapil saya itu banyak kereta api, Pak, stasiun mulai dari Blitar, Kediri, Tulungagung itu ada apa namanya stasiunnya. Oleh karena itu, mohon dengan hormat dan sangat, padat karyanya nanti kami dikomunikasi soalnya tahun sebelumnya *nggak*, dua kali *nggak* ada *gitu*, ada komunikasi untuk itu.

Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan Pak Suryadi saya sebelumnya juga sudah menyampaikan bandara ini kan selalu dibangun terus ya, Pak, ya. Saya belum pernah mendapatkan hasil evaluasinya, karena ini sudah sudah beberapa waktu yang lalu bahkan tahun 2022 awal sudah kita sampaikan juga bagaimana evaluasi bandara-bandara yang memang perintis dan seterusnya itu hasilnya seperti apa. Sehingga kan *plan* untuk peningkatan atau mungkin *plan* untuk pembangunan yang lain juga apa bisa diantisipasi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kemudian yang ketiga, sekali lagi transportasi publik yang sekarang lagi diminati dan aman itu kan kereta api. Meskipun ada berbagai macam kecelakaan yang akibat apapun, apa karena *human error* atau apa. Saya ingin melihat bahwa kereta api karena ke depan ini menjadi transportasi publik yang memang betul-betul diharapkan dan saya sampaikan terima kasih dan selamat kepada Pak Menteri, bahwa sekarang stasiun-stasiun itu sudah menjadi, kalau dulu kan baunya *nggak* enak *gitu* ya, kalau sekarang sudah mulai bagus, kemudian sehingga itu bisa juga menarik para pengguna jasa transportasi.

Nah, oleh karena itu ke depan, oke kita membangun pasti akan membutuhkan anggaran biaya dan ini biayanya cukup tinggi. Maksud saya

bagaimana juga proyeksi ke depan untuk PNPB-nya sehingga bisa membantu APBN. Karena kan kita mengharapkan bahwa kita tidak hanya sekedar bangun tapi masukan-masukan atau pendapatan itu juga bisa dipakai untuk membangun juga untuk kepentingan APBN, sehingga perlu adanya proyeksi ke depan. Karena kalau kita lihat yang ada di sini kan kecil sekali sebenarnya kalau kita bandingkan. Dan, sekarang orang sudah senang sekali mau menggunakan jasa itu jasa kereta api.

Dan, kemudian saya ingin juga bertanya bagaimana hasil evaluasinya terhadap kereta api yang wisata itu, Pak, yang bisa diisi beberapa orang atau kemana sehingga kita bisa semacam *charter gitu* ya, itu evaluasinya seperti apa.

Kemudian yang terakhir Pak, untuk pembangunan tipe A, apa namanya kalau bis itu terminal ya, terminal di tempat kami kan ada di Kota Blitar itu ya, Pak, ya. Itu dari awal kan saya menyampaikan bahwa Blitar ini bukan menuju kota tujuan begitu, tetapi di sana dibangun tipe A. Sedangkan, ke depan itu justru Kediri yang mungkin menjadi bandara menjadi terminal yang bagus dan ke depan kan sudah ada bandara, barangkali mudah-mudahan ya tahun 2023 akhir bisa operasional sehingga itu juga memerlukan perhatian.

Tetapi, yang ingin saya sampaikan bahwa untuk pembangunan yang khusus Kota Blitar ini yang terminal A ini juga perlu dilihat, Pak, coba dilihat evaluasinya seperti apa. Karena kalau saya perhatikan bis-bis itu tidak terlalu banyak *gitu* yang berhenti maupun yang lewat di sana. Saya mohon hasil evaluasi Pak, nantinya ketika anak buah Bapak mungkin bisa diajak turun. Kenapa? Kenapa ini apa saya ingin menyampaikan bahwa, karena bangunannya *gede* kemudian di dalamnya juga ada tempat-tempat untuk macam-macam yang bisa dipakai untuk fasilitas umum kan itu, jadi seperti apa. Karena ini kan mesti *plan*-nya ada *plan* dari Kementerian Perhubungan kami ada ketika membangun itu tidak hanya sekedar membangun terminal tipe A, tetapi ada fasilitas-fasilitas lain yang memang dimanfaatkan oleh publik begitu.

Saya kira itu, Pimpinan, terima kasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bu Sri Rahayu. Silakan, Pak Muhammad Aras.

F – PPP (Dr. H. MUH. ARAS, S.Pd., M.M.):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,

Yang terhormat Pimpinan dan kawan-kawan Komisi V,

Yang saya hormati Pak Menteri dan seluruh jajaran dan seluruh hadirin yang sangat berbahagia.

Pertama-tama tentu setelah menyimak pemaparan dari Pak Menteri dan kami juga membaca lembar demi lembar. Tentu kami bersyukur karena sekaligus mengapresiasi dan memberikan penghargaan terkait dengan capaian yang cukup tinggi kurang lebih 98% dan bahkan realisasi PNBPN mencapai 101%. Ya, tentu ini patut kita berikan apresiasi Pak, atas capaian-capaian yang tentu membanggakan kami sebagai Anggota Komisi V.

Yang kedua, saya masih ingin menyoroti terkait dengan indikator dan progress pencapaian agenda pembangunan RPJMN 2020-2024, Pak, ya. Saya melihat bahwa capaian yang paling rendah adalah terkait dengan pembangunan kereta api yang hanya mencapai 11,4%, ini perlu evaluasi yang lebih luas. Sehingga, tentu ada solusi yang bisa kita sampaikan kepada kita semua, kita bahas secara bersama-sama sehingga capaian ini bisa meningkat, apalagi 2024 tinggal satu tahun lagi, Pak, dari tahun depan dan masa jabatan Pemerintahan Jokowi bersama dengan Pak Menteri ya sudah di ambang selesai 2024. Oleh karenanya, ini perlu digenjot untuk mencapai target yang sudah dicanangkan sejak tahun 2020.

Kemudian yang kedua adalah penyeberangan baru yang akan dibangun, capaiannya hanya 30%, Pak. Ini perlu juga ada solusi yang kita ambil sehingga capaiannya bisa signifikan di tahun terakhir. Kemudian, pelabuhan yang memenuhi standar, pelabuhan utama maksudnya, lalu kemudian jumlah bandar udara baru. *Nah*, kalau jumlah bandara baru ini kan melihat bandara yang sudah ada masih ya, perlu ditingkatkan bagaimana teknisnya sehingga bandara ini bisa dimanfaatkan. Ya, di Sulawesi Selatan saja masih ada beberapa bandara yang belum maksimal, seperti Bandara Arupalaka yang *alhamdulillah* satu bulan kemarin sudah mulai diterbangi, hanya dua kali sampai tiga kali dalam seminggu. Tapi, juga minat penumpang belum begitu maksimal, tentu dibutuhkan strategi-strategi khusus supaya menarik minat untuk digunakan oleh masyarakat umum walaupun ini masih sifatnya subsidi. Kemudian, Selayar yang kemarin sempat terhenti, mudah-mudahan segera juga dicarikan solusi supaya ini bisa aktif kembali dan bisa melayani masyarakat kita.

Kemudian, tentu di luar Pulau Jawa untuk Indonesia timur, bandara Sultan Hasanuddin menjadi bandara yang sangat padat untuk saat ini dan ini perlu ditingkatkan layanan-layanan kita. Oleh karenanya, kelanjutan pembangunan Sultan Hasanuddin harus segera dilakukan sehingga apa yang menjadi target dan janji Pak Menteri kemarin untuk menyelesaikan ini melalui Angkasa Pura tentu kita harapkan bahwa bisa dilanjutkan sehingga layanan kita kepada masyarakat bisa lebih maksimal. Hari ini mungkin penerbangan hampir seluruh rute dari Makassar hampir penuh semua sehingga layanan-layanan ini perlu kita tingkatkan.

Yang kedua adalah layanan terkait dengan umroh, ini juga sudah cukup padat, terhitung dari Sulawesi Selatan kemarin dapat rilis untuk umroh cukup

besar akibat karena daftar tunggu untuk haji kurang lebih 90 tahun, Pak, jadi alternatif yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah umroh.

Nah, kita melihat bahwa di pelataran Sultan Hasanuddin sekarang mulai dari subuh sampai sore itu penuh dengan calon jama'ah umroh. Sehingga tentu ini dibutuhkan keseriusan dari kita untuk bisa memberikan pelayanan yang maksimal yang tentu dengan menyelesaikan terminal bandara yang sudah hampir rampung.

Kemudian, yang selanjutnya adalah terkait dengan progres kereta api. Terima kasih kami kemarin telah diundang, walaupun saya berdua diundang katanya, tapi di daftar ada empat orang yang diundang. Ya, tapi saya sampaikan Pak Hamka mohon maaf karena ini Dapil saya bersama dengan Andi Iwan jadi ya, saya pukul gendang sama dengan Pak Menteri. Tapi, Pak Hamka tidak berkecil hati karena memang ke Makassar belum selesai, Pak, Makassar Dapilnya Pak Hamka, jadi nanti tugasnya Pak Hamka untuk menyelesaikan Makassar.

Yang selanjutnya terkait dengan progres ini tentu kita juga berharap bahwa ini bisa diselesaikan sebelum selesai masa jabatan Pak Menteri tahun 2024. Karena progres yang ada sampai hari ini menurut pengamatan kami dari Maros sampai Barru saja belum tuntas Pak ya. Kemarin kita naik dari Maros sampai ke Pangkep, masih terputus lagi, kemudian dari Pangkep ke Barru. *Nah*, ini tentu menjadi perhatian untuk kita untuk bisa segera ini dituntaskan sehingga komitmen untuk membangun kereta api di Sulawesi Selatan bisa tuntas. Ya, saya perlu ingatkan bahwa nomenklaturnya itu Makassar-Parepare, bukan Maros-Barru, sehingga kelanjutan untuk Makassar dan Parepare perlu dipercepat dan tentu diseriusi, Pak.

Kemudian, yang selanjutnya adalah terkait dengan di perhubungan darat terminal A Makassar ini sudah cukup lama terbengkalai dan ini hampir tidak terfungsikan dengan baik. Oleh karena ini, perlu diperhitungkan dipertimbangkan untuk bagaimana kelanjutan di dalam ini apakah ini diperbaiki atau dipindahkan atau solusi-solusi yang lain tentu yang bisa meningkatkan layanan kita kepada masyarakat. Dan, tentu kita berharap bahwa ada konektivitas antara bandara kemudian dengan kereta api. Sehingga, perlu dipertimbangkan lokasinya berdekatan sehingga masyarakat tidak lagi misalnya turun dari bandara harus kembali ke arah kota, kemudian dari kereta api bisa langsung ke tempat itu, sehingga ini betul-betul mengefektifkan dan mengurangi biaya dari seluruh masyarakat kita.

Kemudian terkait dengan pelabuhan, ini salah satunya adalah pelabuhan Karongkong yang kemarin katanya sudah diambil alih oleh Pelindo. Mohon ini tidak, apa namanya dibiarkan begitu saja sehingga layanan kita bisa maksimal. *Nah*, dengan beroperasinya kereta api juga memberikan angin segar bagi Karongkong untuk bisa melayani berbagai komoditas yang ada di Sulawesi Selatan baik masuk dan keluar sehingga Karongkong ini bisa maksimal. Tentu berharap bahwa PNBP dari sana bisa lebih meningkat, apalagi tadi capaian 110% ya ke depan bisa lebih dari itu. Sehingga ya tentu kita berharap bahwa Kementerian Perhubungan bisa menjadi salah satu

Kementerian yang tentu memberikan pendapatan bagi negara yang cukup potensial.

Terima kasih, Pak Ketua atas kesempatannya.

Wabillahitaufik walhidayah.

Wallahul muwaffiq ila aqwamithaariq.

WAssalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Muhammad Aras. Pak Menteri mumpung ingat ini saya takut nanti kelewat *nih* terkait dengan pelayanan ini Pak penerbangan. Ini yang dulu kita pernah rapat soal Sriwijaya kan di sini. Pak, Pak Dirjen. Dan. saya waktu itu saya tanya kepada Sriwijaya apakah pembayarannya menambahkan syarat aturan yang sudah diatur pemerintah atau tidak, mereka jawab tidak. Berarti kan tidak sama dengan Lion yang dulu mensyaratkan, bahwa tidak boleh menuntut pihak manapun baru dibayar. Karena di ketentuan Pemerintah itu tidak diatur, mereka waktu itu jawab tidak Pak, kami tidak ada aturan tambahan. Rupanya Pak Menteri, dalam pelaksanaannya itu sama saja dengan Lion. Jadi, tidak akan dibayarkan kalau tidak mau menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak *blablabla, gitu lah* kurang lebih. *Nah*, berarti di rapat itu tidak jujur Sriwijaya sama kita menyampaikan di forum ini.

Nah, negara melindungi rakyat, urusan rakyat adalah kepada negara Pak, karena kita diatur oleh negara, regulasi ini dibuat oleh negara untuk mengatur kita semua termasuk kita-kita yang ada di sini *gitu loh*. Jadi, tidak boleh ada persyaratan ditambahkan ke situ. Oleh Sriwijaya rupanya tadi saya coba konfirmasi Pak ke Sriwijaya, karena ini kebetulan kan korbannya ini mayoritas dari Kalimantan Barat Pak, Dapilnya saya, paling *gampang* mereka mengeluh mengadu pasti ke sayalah.

Saya coba konfirmasi lagi tadi dari pihak Sriwijaya, katanya yang mensyaratkan itu bukan Sriwijaya tapi asuransi. Ini malah aneh lagi ini *kok* asuransi *ngatur* kita, padahal kan asuransi kan diatur oleh negara, Pak, ini *clear* ini, Pak, ini menurut bahasa Sriwijaya. Sebenarnya kita *nggak* perlu rapat berulang-ulang Pak, *ngurus* barang ini, ini korban sudah meninggal keluarganya itu hanya mengharapkan seikhlasnya dari pihak yang berwenang untuk mengganti, maksud kita sudahlah *nggak usah* di, hak dialah menuntut pihak manapun kalau itu kan hak hukumnya dia. Tapi, kalau dia dipaksa membuat pernyataan tidak menuntut pihak manapun lalu baru dibayar ini sama dengan main preman kalau nurut saya ini, Pak, ini kerjaan preman ini bukan kerjaan kita bernegara kita seperti ini.

Saya keberatan Pak Menteri dengan barang ini *gitu loh*. Jadi, saya berharap ini bisa diselesaikan dan minta kepada asuransi itu jangan ngatur-ngatur negara ini, *kok* asuransi bisa ngatur negara ini *gitu loh*. Tadi makanya pihak Sriwijaya bilang sama saya, Pak Lasarus saya bilang panggil sekalian OJK dengan asuransi, apa urusannya? Kita kan hanya melaksanakan regulasi

Pemerintah. Regulasi Pemerintah disampaikan oleh Menteri Perhubungan dalam hal ini yang berwenang untuk itu, itu saja yang kita baca, Pak, kita tidak ada baca aturan lain. Kalau ada aturan lain yang mensyaratkan itu di luar ketentuan yang diatur, ini sudah tidak betul, Pak ini, sudah tidak betul.

Saya berharap ini negara hukum, bukan negara preman *nih*, sukanya bikin aturan menyangkut orang. Ini orang sudah wafat Pak, mungkin anaknya yatim atau anaknya yatim piatu atau keluarganya tidak ada yang menafkahi mengharap dari ini berlindung kepada negara. Saya rasa saya berharap ini, Pak Menteri tidak perlu lagi lah kita panggil ke sini, karena kalau kita rapat di sini mengulang pembicaraan yang sama yang pernah kita bahas pada waktu itu dengan pihak Sriwijaya. Saya berharap ini bisa diselesaikan oleh Kementerian, mumpung ini saya masih ingat, takutnya nanti selesai rapat lupa karena para korban yang belum menerima santunan ini masih banyak, Pak.

Demikian barangkali, saya lanjutkan dengan pihak, *eh* salah bukan pihak Sriwijaya ya, saya lanjutkan dengan pembicara berikutnya. Maksudnya adalah Pak Bakri, bersiap-siap Pak Harvey Malaihollo. Pak Bakri, setelah Pak Bakri, Pak Harvey Malaihollo.

F – PAN (H.A. BAKRI HM, S.E.):

Baik makasih.

KETUA RAPAT:

Tadi saya lihat Pak Hamka mau bicara sedikit. Sebentar Pak Bakri kalau ada kaitan sama yang tadi, Pak Hamka, beda materi?

F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Nanti saja

KETUA RAPAT:

Oh ya sudah lanjut saja ya.

F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Iya.

KETUA RAPAT:

Silakan habis Pak Bakri, Pak Harvey Malaihollo.

F – PAN (H.A. BAKRI HM, S.E.):

Pak Hamka kesimpulan saja.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F – PAN (H.A. BAKRI HM, S.E.):

Baik, makasih.

**Pimpinan yang saya hormati,
Anggota Komisi V yang saya banggakan,
Bapak Menteri beserta seluruh jajarannya,**

Saya tidak bisa bicara panjang-panjang kata Pak Hamka, harus pendek-pendek saja. Saya cuma mengucapkan selamat ini kepada Kementerian Perhubungan PNPB-nya cukup bagus Pak, peningkatannya cukup signifikan. Ini merupakan suatu bukti bahwa Kementerian Perhubungan betul-betul konsen terhadap ikut serta membangun republik ini.

Ada satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, Pak Menteri, yaitu terkait dengan destinasi wisata prioritas dan super prioritas, ya. Dulu pernah saya pernah di-*bully* ini, hampir 10 juta saya di-*bully*, Pak, gara-gara bicara tentang wisata Pulau Komodo, *nah*, itu. Pikiran saya sebenarnya maksudnya adalah bagaimana Pemerintah ini adil dalam hal anggaran, supaya seluruh Indonesia yang punya wisata baik yang tidak prioritas ataupun yang biasa-biasa mendapat perhatian. Oleh sebab itu, karena dipotong sehingga *image*-nya beda, seakan-akan saya menghalang-halangi Pemerintah untuk menganggarkan pariwisata yang super prioritas. Dan, masuklah ke lambe turah ya lambe turah, hampir 10 juta *nah*, saya tidak pingin terulang itu lagi Pak Menteri.

Di Jambi itu ada Candi Muara Jambi yang kemarin ditinjau oleh Pak Presiden beserta Kementerian PUPR, dan *alhamdulillah* mulai tahun ini sudah mendapatkan anggaran yang cukup banyak pembangunan fisik. *Nah*, saya berharap mungkin Kementerian Perhubungan juga bisa ikut andil dalam rangka memanfaatkan alur sungai Batanghari Pak, sungai Batanghari itu kan sungai yang terpanjang di Sumatera yang membentang dari pantai timur sampai ke Sumatera Barat. *Nah*, ini mungkin bisa dibikin satu objek wisata yang menghubungkan dari Kota Jambi ke candi. *Nah*, ini perlu mungkin menjadi perhatian apakah dibikinkan dermaga ataupun apa namanya.

Terus yang kedua, di Kerinci itu ada namanya gunung Kerinci, gunung tertinggi di Sumatera yang akhir-akhir ini sempat batuk-batuk, Pak, tapi *alhamdulillah* sudah baik. *Nah*, sampai hari ini jangankan mendapatkan apa perhatian pariwisata, tapi penerbangan sampai hari ini *nggak* bisa-bisa, Pak, ini Pak Menteri dengan sangat minta mohon kepada Pak Menteri supaya ada *airline* yang bisa sampai ke sana *gitu*. Karena Kerinci ini pendapat yang paling besar itu memang dari segi wisata selain pertanian, yang Pak Menteri sendiri sudah pernah ke sana ya. Saya berharap Pak Menteri mudah-mudahan *airline*-nya ataupun apapun namanya bisa terbang ke sana. Dan, saya juga terima

kasih *alhamdulillah* kabarnya tahun ini mendapat perhatian anggaran di bandaranya.

Dua hal itu saja mungkin Pak Ketua, yang perlu saya sampaikan, sekali lagi terima kasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Bakri.

F – PAN (H.A. BAKRI HM, S.E.):

Oh iya sedikit Pak Ketua, ada yang tertinggal. Tanggal 19 besok kita rencana mau kunjungan spesifik, Pak, mohon izin Pak Menteri, Pak Dirjen Darat berkenan mungkin kita tanggal 19 kan mau kunjungan, Pak, tujuan fokusnya adalah meninjau masalah angkutan batubara di sana yang lagi viral-viralnya. Dan, saya berharap pada saat kunjungan nanti ada satu kesimpulan yang mungkin bisa menjadi sesuatu yang bisa dibawa ke sini sehingga betul-betul bisa menyelesaikan masalah tersebut karena ini sudah lintas antara Menteri Perhubungan, Kementerian PUPR dan ESDM, itu aja mungkin terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih, Pak Bakri. Pak Harvey Malaihollo, bersiap-siap, Pak Toriq.

F – PDIP (HARVEY B. MALAIHOLLO):

Terima kasih.

**Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,
Bapak Menteri Perhubungan, beserta jajarannya yang saya hormati,**

Pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi kepada Bapak Menteri karena di target dan capaian pelabuhan penyebrangan yang baru dibangun di pemaparan Bapak Realisasi Tahun 2022, ada tiga lokasi dari empat lokasi yang berasal dari Dapil saya, terima kasih Pak, yaitu Batanta, Kaimana dan Salawati, sekali lagi terima kasih.

Yang berikutnya, masih dari Dapil saya, ada yang perlu saya mohon penjelasan, Pak. Di target dan capaian bandara baru yang dibangun *tuh* di tahun 2021 ada Manokwari Selatan, lalu tahun 2022 masih ada Manokwari Selatan, tetapi di tahun 2023 dan 2024 itu tidak ada lagi. Apakah, ini mohon penjelasan saya, terima kasih.

Lalu berikutnya, seperti kita ketahui Raja Ampat adalah salah satu destinasi wisata yang dari Kabupaten, salah satu Kabupaten di Dapil saya, Pak.

Kemarin terakhir saya meriset ke sana ada hal *urgent* yang sepertinya patut Bapak ketahui. Bahwasannya mereka membutuhkan rambu-rambu laut Pak, karena sudah banyak sekali terumbu-terumbu karang yang rusak karena tidak ada rambu-rambu dan ditabrak oleh atau kapal yang berlabuh di situ, jadi mohon perhatiannya.

Yang berikutnya mengenai di target dan capaian jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar. Ada Sorong di situ ada Kabupaten Sorong, saya mohon juga penjelasannya. Apakah pelabuhan rakyat Sorong yang dimaksudkan di situ atau kalau tidak, *eh* kalau iya saya minta juga perhatian untuk kawasan ekonomi khusus pelabuhan di kawasan ekonomi khusus di Kabupaten Sorong Pak, karena itu menjadi pelabuhan pembantu pelabuhan rakyat.

Itu saja, terima kasih banyak, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, Pak Harvey, Pak Toriq silakan Pak Kyai. Bersiap-siap Pak Ali Mufti.

F – PKS (K. H. TORIQ HIDAYAT, Lc.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

**Terima kasih Pimpinan,
Yang saya hormati dan rekan-rekan yang saya hormati,
Kemenhub Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati,**

Yang pertama, apresiasi tentu saja seperti yang disampaikan teman-teman atas capaian dari program Kemenhub. Kemudian, apresiasi juga atas respon cepat perbaikan jembatan di Kota Tasikmalaya yang *alhamdulillah* kemarin waktu reses sudah selesai dan saya ngontrol ke situ sudah tahapan *finishing*. Juga untuk program zona selamat sekolah itu juga persis bahkan itu di dekat rumah saya, *alhamdulillah* itu sangat bermanfaat dan banyak usulan untuk ditambah karena memang banyak sekali sekolah-sekolah SD, SMP, SMA yang posisinya persis di jalan pusat di jalan raya itu. Ini karena manfaatnya sangat luar biasa juga sekaligus untuk mendidik anak-anak didik untuk keselamatan mereka, bagus kalau itu ditambah.

Berikutnya Pak Menteri, ini nampaknya perlu perhatian juga. Karena di daerah saya itu, ada jalur yang sering disebut jalur tengkorak, yaitu Gentong itu. Disebut jalur tengkorak karena memang setiap pekan itu minimal ada 1-2 kecelakaan dan penyebab utamanya adalah truk yang melewati kapasitas muatannya, kemudian supir yang kurang mengenal medan, selanjutnya itu juga ditambah jalan berkelok, dan banyak permintaan dari masyarakat agar marka jalan diperhatikan ditambah terutama untuk PJU, terutama kalau kecelakaannya malam. Karena kalau truk, malang di situ, di jalan, kemudian apalagi kalau kemudian menimbulkan kecelakaan lain tertabrak kendaraan

kecil motor dan itu menimbulkan kemacetan yang luar biasa itu, apalagi kalau kemudian lampu kurang, itu tentang marka jalan di Gentong.

Kemudian, di depan, kita masuk dari arah Tasik di gerbang setelah Gerbang Tol Cileunyi. Itu saya melihat di sebelah kiri itu kalau dari arah Tasik itu ada beberapa truk yang mangkal di situ, yang cukup mengganggu. Yang pertama kita *nggak* pernah menegur atau *ngorek* ada apa *gitu*, karena ini mengganggu. Tapi kemudian pekan berikutnya ketika saya ke Dapil, itu terjadi lagi bahkan lebih banyak sampai ada 4-5 truk yang ada di situ yang kemudian di pinggirnya itu di luar jalan tol itu di luar pagar itu ada semacam warung dadakan. *Nah*, ketika itu saya tertarik kemudian turun kemudian *ngobrol* sebentar, itu penyebabnya awalnya memang karena ada gangguan teknis kendaraan, kemudian perbaikan lama dan perlu makan, perlu minum, perlu ngopi perlu rokok, kemudian ada yang jual jasa, tapi kemudian yang jual jasa tadi buka lapak *gitu*, walaupun tanpa saung tanpa atap *gitu*. Dan, ini sekarang itu kemarin itu bahkan tambah *gitu* ada 3-4 mungkin, *nah*, ini cukup mengganggu dan tolong ini ditertibkan.

Kemudian juga di perjalanan juga kita bahkan tadi pagi perjalanan dari Depok ke sini itu ada bis yang naikan muatan, bahkan Ibu-Ibu yang naik itu dua orang, saya kira kalau untuk di daerah sini *nggak* ada yang berani seperti itu, *gitu* ya karena di kota. Kalau untuk daerah Tasik Bandung, itu Jakarta-Bandung di Tol Cileunyi itu banyak, Pak. Saya tidak perlu saya sebut nama bisnya tapi itu sering terjadi dan pernah ada penertiban tapi lagi-lagi ini terus berjalan, jadi menurunkan muatan menaikan muatan di tol. *Nah*, ini padahal ini kan sangat melanggar kan itu kita *tau* di PP 2005 Nomor 15 Pasal 41 itu jelas larangannya itu.

Jadi, tolong ini ditertibkan lagi jangan sampai hal itu terjadi karena ini cukup mengganggu. Ya, berhenti kalau karena macet, karena mati mesin atau pecah ban *nggak papa*, tapi kalau kemudian naikan menurunkan penumpang ini kan masalah.

Kemudian, berikutnya ini lagi ramai, tepatnya tanggal 9 Januari saya baca di Tempo, itu ada usulan tentang pemberlakuan tarif wacana, pemberlakuan tarif di 25 jalan di Jakarta di DKI ini, bayar, alasannya itu untuk mengurai kemacetan mengurai kemacetan. Akan tetapi justru menurut saya itu justru kalau itu kemudian nanti diberlakukan dengan alasan untuk mengurai kemacetan. Bisa jadi ketika itu diberlakukan, orang nanti menghindari dari jalan 25 ruas jalan itu, untuk agar tidak berbayar dan akan terjadi penumpukan-penumpukan di ruas jalan lain dan akhirnya, apa, untuk mengurai kemacetan itu justru tidak terjadi.

Karena itu saya usulkan ini mungkin perlu campur tangan dari Pemerintah Pusat apalagi kalau terkait dengan tarif yang kemarin diwacanakan itu antara Rp5.000 sampai Rp19.000, *gitu*. Ini tolong diperhatikan Pak Menteri dan ini kalau diterapkan kebijakan ini ya yang paling ini akan memberatkan masyarakat, Pak, dalam kondisi seperti sekarang ini kan kalau jalan tol wajar, jadi kalau jalan yang bukan tol kemudian berbayar itu saya kira ini sekarang belum saatnyalah *gitu*.

Itu barangkali Pak Menteri, yang bisa sampaikan, terima kasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Toriq. Selanjutnya Pak, Bu Cen mohon izin dulu Pak Ali Mufti. Bu Cen ini ada urusan fraksi katanya tadi, dibisikin oleh Pak Ridwan juga saya, karena beliau ini seringkali bawa kita durian musangking, Pak, kalau saya tidak turuti saya *nggak* dapat *nggak* apa-apa, takut teman lain *nggak* bagian. Mohon izin Pak Ali Mufti ya, silakan Bu Cen. Setelah Bu Cen nanti Pak Ali Mufti.

F – P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Pak Menteri dan jajarannya, ada Pak Sekjen, Pak Dirjen
dan jajaran ya Pak, ya,**

Pak Menteri, terima kasih sudah banyak perhatian untuk Kepri di 2023, tetapi ada sedikit yang harus saya mintakan. Pak Menteri, itu di, kemarin saya kan ke Natuna reses kebetulan bertemu dengan Pemda, ada permintaan agar *airport* itu kan masih *enclave*, tolong dipindahkan mungkin ke Klari atau ke daerah-daerah di sekitar itu Pak Menteri. Karena kita tahu masih *enclave* dengan TNI AU, jadi agak sedikit bagaimana seperti itu, tolong menjadi perhatian.

Juga harga tiket itu mahal sekali Pak Menteri, Rp2 Juta sekian untuk *oneway*. Bahkan kemarin reses itu saya sampai tidak mendapatkan tiket, akhirnya setelah berulang kali dicoba, saya sendiri yang berangkat. Jadi mohon perhatian karena di situ tidak ada *low season* atau *high season* tetap mahal.

Yang kedua saya minta penambahan dermaga kapal ro-ro di kelurahan Sabang Barat Kemidai. Jadi mereka saat itu belum ada dermaga roronya, mungkin menjadi perhatian.

Yang ketiga, Pak Menteri, ada saya mintakan pemindahan pelabuhan Pelni dari Batu Ampar ke pelabuhan Sekupang. Saat ini masih bergabung dengan pelabuhan bongkar muat di Batu Ampar. Pelabuhan ini dipindahkan dari Sekupang dulu Pak Menteri waktu jaman sebelum Pak Menteri, sekarang jaman Pak Menteri saya minta tolong agar dikembalikan ke sana karena tidak manusiawi gabung dengan dibongkar muat itu, jadi tolong ada solusi.

Yang terakhir Pak Menteri, saya lihat investasi APBN di seluruh wilayah Indonesia tahun 2023. Itu Kepulauan Riau dengan Riau nilainya sama sampai titik-titiknya. Jadi, saya pikir mungkin ada kekeliruan atau bagaimana, karena

nilainya sama ini sampai titik-titiknya juga sama. Mungkin ada kekeliruan atau apa nanti coba tolong dikoreksi.

Itu saja Pak Menteri terima kasih, Pimpinan, terima kasih. Saya sekalian izin balik, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bu Cen, jangan lupa Bu sudah ada yang *nyeletuk* durennya mana. Ya, silakan Pak Ali Mufti, bersiap-siap Pak Irmawan.

F – P. GOLKAR (DR. H. ALI MUFTI, S.Ag., M.Si.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi V beserta seluruh Anggota,
Yang saya hormati Bapak Menteri Perhubungan, Pak Sekjen, Pak Dirjen
dan seluruh Pejabat Kementerian Perhubungan,
Hadirin yang saya hormati,
Pak Menteri, Pimpinan,**

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama setelah saya baca sekilas dokumen ini. Maka saya kasih apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Perhubungan atas prestasi yang diraihinya karena capaian-capaian banyak yang memenuhi syarat. Dalam rangka menyempurnakan apa yang menjadi prestasi itu.

Bapak Menteri yang saya hormati,

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya ini merasakan betul bahwa transportasi darat itu sangat bermanfaat khususnya jalan tol. Namun sebagai penyempurnaan sebuah pelayanan Pak Menteri, kita butuh ada satu keadaban, ada sebuah peradaban yang itu menjadi pilar kita di dalam melakukan maupun *mobile* kita di jalur darat ini. Misal bagaimana kecepatan itu bisa dipahami oleh semua pihak, ini yang bagaimana teknis pengendaliannya. Kita *nggak* bisa bagaimana salipan-salipan balapan di jalan tol itu itu penuh dengan risiko. Ini yang kadang-kadang perspektif kita Pak Menteri, hidup kita ini selalu perspektifnya adalah pribadi. Kita tidak pernah punya perspektif komunitas, komunal, bersama, bagaimana kita di jalur tol ini bisa selamat bersama. Kadang kita jalan 100 yang sudah sesuai dengan trek nya, dibalap dari kiri *gitu* ya dan sebagainya ini sangat menakutkan sekali kita ini.

Nah, ini yang harus di-*review* kembali apakah ada mekanisme yang bisa dipahami oleh pengguna jalan khususnya tentang kita saling menghormati antar sesama pengguna jalan, yang berikutnya.

Bapak Menteri, Pimpinan yang saya hormati,

Tentang *recovery* transportasi udara, saya merasakan bagaimana agar kita ini bisa kembali normal seperti sebelum covid. *Nah*, ini kita butuh kepastian saja Pak Menteri, kira-kira ini kita bisa normal transportasi udara ini sampai kapan, ya. Dulu kita dari Juanda mau kembali itu dari jam berapapun itu ada, sekarang susah sekali itu dicarinya. *Nah*, kita *kepingin* itu bisa normal saja, ini dalam rangka penyempurnaan sebuah prestasi, yang berikutnya.

Pak Menteri yang saya hormati,

Saya sering menyaksikan di bandara itu persoalan yang dibawa ke *cabin*. Ini butuh sebuah kepastian, sehingga biar tidak ada perdebatan di antara para penumpang, aturannya adalah 7 kilo gitu ya, tetapi ada yang boleh ada yang tidak, saya juga *nggak* tahu itu di mana letak persoalannya. Oleh karena itu, kadang-kadang ini persoalan-persoalan sepele yang membuat masyarakat pengguna itu merasakan ketidaknyamanan, *gitu* ya. Jadi, ada cabin saya banyak foto-foto yang saya foto di bandara itu Pak Menteri, ini hanya dalam rangka penyempurnaan sebuah prestasi.

Selanjutnya Pak Menteri, ya sekarang di Dapil. Pertama, kalau memang ini bukan kewenangan Bapak, saya mohon dibantu. Ada aspirasi dari kami, dulu di Ponorogo Jambi itu ada trayek Pak, *nah* sekarang itu kayaknya sudah *nggak* ada. Itu menjadi banyak masyarakat yang mengusulkan ke kami agar itu disampaikan aspirasinya itu, itu pertama Pak Menteri, trayek Ponorogo Jambi atau Mataraman Jambi itu luar biasa dulu itu.

Yang terakhir Pak Menteri, kami sudah kirim surat dari Damri Ponorogo itu yang juga saya dukung untuk membuat *route* yang itu didukung juga oleh banyak Kepala Daerah yang sudah kami usulkan ke Kementerian Perhubungan agar mendapatkan persetujuan atas usulan itu. Saya selaku Dapil VII Jawa Timur, agar usulan itu bisa diproses secepatnya, karena memang itu dalam rangka meningkatkan pariwisata di daerah Jawa Timur bagian Mataraman.

Saya pikir itu, Pak Ketua dan Pimpinan, Bapak Menteri atas beberapa hal yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, *akhirul kalam*.

Wassalamu'allaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ali Mufti, Pak Irmawan dipersilakan. Bersiap-siap tetangga sebelahnya dari Aceh juga, Pak Ruslan.

F – PKB (H. IRMAWAN, S.Sos., M.M.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

Yang kami hormati Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Komisi V,

Yang kami hormati Bapak Menteri beserta Bapak Sekjen, Dirjen beserta jajarannya,

Saya langsung saja *nih* Pak Menteri, pertama saya ingin ke Bapak Dirjen Perhubungan Udara. Yang mana beberapa waktu yang lalu kami pernah menyampaikan di ruangan ini untuk meminta bantuan subsidi penerbangan perintis Susi Air dari Kabupaten Gayo Luwes ke Kota Medan dan dari Aceh Tenggara ke Medan. Tapi sampai hari ini ketika saya lihat jadwal penerbangan per tahun 2023 sepertinya belum terakomodir, Pak. Saya berharap ini bisa jadi bahan pertimbangan kenapa ini penting, saya pikir alasannya tidak usah lagi saya sampaikan di sini karena sebelumnya sudah saya sampaikan, Pak. Yang jelas ini sangat sangat dibutuhkan oleh masyarakat, ketika kita sudah membangun bandara, kemudian tidak bisa kita subsidi sehingga tidak ada penerbangan ke Medan, ini sangat merugikan masyarakat yang ada di pedalaman. Jadi, sekali lagi saya berharap kepada Bapak Menteri, dalam hal ini Bapak Dirjen Perhubungan Udara agar dapat meninjau ulang kembali, barangkali masih bisa direvisi jadwal itu sehingga bisa membantu masyarakat yang ada di pedalaman.

Kemudian di samping itu juga kami juga pernah mengajukan untuk perpanjangan *runway* di Bandara Gayo Luwes termasuk di Bandara Singkil. Ini juga kami tidak tahu persis apakah bisa terakomodir di tahun 2023 ini kalau memang belum terakomodir ini juga kembali mohon menjadi bahan pertimbangan, Pak, itu kepada Dirjen Perhubungan Udara.

Kemudian ke Dirjen Darat, Pak, saya ingin sampaikan bahwa di Aceh itu luas panjang sekali jalan nasional di sana, Pak. Tetapi sampai hari ini fasilitas rambu-rambu lalu lintasnya masih sangat minim Pak, terutama di Kota Banda Aceh nya yang mana Banda Aceh itu adalah salah satu kota yang besar di Aceh sampai hari ini rambu-rambu lalu lintasnya masih sangat minim. Jadi, saya berharap kepada Bapak Dirjen Perhubungan Darat agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan rambu lalu lintas yang ada di Provinsi Aceh.

Kemudian juga, ada salah satu terminal Pak di Kota Banda Aceh yaitu terminal mobil barang, tipenya tipe A kalau saya tidak salah. Ini juga sampai hari ini kondisi bangunannya sangat memprihatinkan terlantar tidak ada yang mengurus. Ini juga kami berharap kepada Bapak Dirjen Perhubungan Darat agar ini bisa menjadi prioritas di tahun 2023 ini. Saya pikir hanya ini yang kami sampaikan, terima kasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, selanjutnya Pak Ruslan, siap-siap Mas Dewo.

F – PKB (H. RUSLAN M. DAUD, S.E., M.A.P.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

**Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh teman-teman yang hadir,
Yang kami hormati Bapak Menteri dan seluruh para jajaran yang kami banggakan,**

Langsung saja Pimpinan, yang pertama dulu adalah Pak Sekjen. Pak Sekjen ini adalah dulu dia beliau dulunya memang sama-sama kita tahu ini Dirjen Udara. *Nah*, PR kita Pak, sesuai dengan apa yang saya sampaikan dan juga saya *bersilaturahmi* dengan beliau mengenai bandara Malikusalleh ini, Pak. Bandara Malikusalleh ini itu sangat strategis Pak, di tengah-tengah diapit oleh bandara Aceh dan juga jauhnya ke Medan ini 7 jam ini Pak, 7 jam, kalau memang ke Banda Acehnya itu lebih kurang 5 jam.

Tetapi perlu diketahui ya bahwa Pak Dirjen, Pak Sekjen, ini penduduk yang paling banyak di Provinsi Aceh itu adalah pesisir, Pak, pesisir. Ini saya kata Aceh Utara, Kota Lhouksumawe, Kabupaten Bireun ini sangat dekat dengan Bandara Malikusalleh ini tersebut. Tiga Kabupaten ini adalah ini jumlah penduduknya ada 1 juta lebih. Maka, dalam kesempatan ini selepas saya lihat saya baca ini belum masuk, belum masuk. Moga-moga ada celah ada anggaran lagi yang bisa untuk terakomodir pada tahun 2023 ini, Pak Menteri.

Maka harapan kami Pak Menteri sekali lagi, Bandara Malikusalleh ini harapan masyarakat Aceh, harapan masyarakat Aceh. Sangat-sangat strategis Pak Menteri, sangat strategis. Untuk pelebarannya dan juga untuk terminalnya, dan juga untuk pengamanannya ataupun pagar dan lain sebagainya. Itu yang pertama, *nah* sekali lagi dan juga ini untuk mendukung, sebab di situ kan ada kawasan KEK-nya, ada tempat Kawasan Ekonomi Khusus yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden.

Nah, yang kedua Bapak Menteri, ini Dirjen Kereta Api mungkin *nggak* hadir pada hari ini. Mengingatkan kembali, mengingatkan kembali sesuai apa yang sudah saya sampaikan berkali-kali dan juga janji Bapak Presiden kita dulu untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan di Aceh, salah satunya adalah poin tersebut di situ menghidupkan kembali kereta api yang ada di Provinsi Aceh. Maka sudah puluhan tahun ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat Aceh tetapi masih sekedar *ancang-ancang*. Ada dibangun adalah hanya tersendat-sendat, dibangun satu tahun ini misalnya kata sekian, *nah* sekian tahun ditelantarkan lagi. Dan, juga saya dapat berita yang bahwa hasil audit BPK itu adalah memang tidak memihak kepada kita maka perlu dilanjutkan kembali.

Harapan kami, harapan kita semua kereta api yang telah mangkrak di Provinsi Aceh ini perlu dituntaskan, kalau bisa sebelum berakhirnya jabatan Bapak Jokowi tahun 2024 Pak Menteri, ini harapan kita harapan masyarakat Aceh. Jadi, saya pikir itu Pak Menteri dan para jajaran yang hadir pada hari ini dan teman-teman, terima kasih.

Wallahul muwaffiq ila aqwamithaariq.

WAssalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam. Mas Dewo, ini Mas Dewo hari ini *udah ngomong* saya tadi katanya singkat padat, Pak Menteri, silakan mas.

F – P. GERINDRA (H. SUDEWO, S.T., M.T.):

Saya *nggak* dengar, Pimpinan. Terima kasih, langsung saja.

Pak Menteri Perhubungan dengan seluruh jajarannya yang saya hormati,

Pertama, yang ingin saya sampaikan adalah soal bandara perintis, bandara perintis yang ada di pulau Jawa itu contohnya Bandara Ngloram yang ada di Kabupaten Blora. Kemudian, Bandara Sudirman yang berada di Purbalingga, yang ada di Purbalingga ini *nggak* main-main ini, nama pakai Panglima Sudirman, jauh lebih tinggi stratanya daripada pahlawan-pahlawan yang lain itu, tetapi dipakai namanya, eksistensi bandaranya sangat memperhatikan.

Saya hanya ingin mendapatkan penjelasan dari Kementerian Perhubungan, mengapa bandara-bandara perintis khususnya yang ada di pulau Jawa yang saya sebutkan ini utamanya, ini tidak eksis, tidak operasional. Padahal pada saat bandara ini belum dibangun, belum menjadi bandara komersil, belum mendapatkan perhatian dari Kementerian Perhubungan. Pemerintah Daerahnya luar biasa perjuangannya bahkan sampai Gubernurnya sangat luar biasa gigih sekali berjuang, dengan alasan bahwa kalau ada bandara akan meningkatkan perekonomian di daerahnya dan sekitarnya dan *blablabla* seterusnya.

Tapi mengapa setelah itu direspon oleh Kementerian Perhubungan, bandara tersebut dibangun, tidak operasional, tidak ada penerbangan, tidak ada mau, tidak maskapai yang mau di situ. Ya, bukan berarti ini kesalahan Menteri Perhubungan, bisa saja itu karena niatnya Pemerintah Daerah yang tidak didasarkan pada satu kajian yang ilmiah. Kajian ilmiahnya tidak matang, studinya tidak matang, perencanaannya tidak matang. Tapi, karena kekuatan semangatnya dia, ya di sinilah akhirnya Kementerian Perhubungan merespon, membangun, mengalokasikan anggaran. Begitu baiknya Menteri Perhubungan, tetapi ketika tidak operasional maunya dibebankan lagi kepada Menteri Perhubungan, ini kan tidak *fair* begitu, ya. Tapi, bagaimanapun juga ya Kementerian Perhubungan pasti tidak mau melepas begitu saja, tidak mau membiarkan begitu saja bandara tersebut tidak operasional, terbengkalai.

Maka saya memberikan saran kepada Kementerian Perhubungan, coba tolong dikaji mengapa hal yang demikian bisa terjadi *gitu* ya, tidak sesuai dengan studi awal. Kalau kita lihat seperti contoh secara nasional adalah Bandara Kertajati, tapi kalau di tingkat lokal itu adalah di sana, di Bandara Ngloram dan Bandara Purbalingga Sudirman, ini merupakan satu pembelajaran terhadap Kementerian Perhubungan, jangan sekali-kali secepat itu merespon permintaan daerah untuk membangun bandara di pulau Jawa. Karena moda transportasi di pulau Jawa itu pilihannya banyak, ada kereta api,

ada bis, mobil pribadi, *gampang*, tidak mesti harus memakai transportasi udara. Tapi kalau misalnya itu di daerah terluar itu saya sangat setuju, di kepulauan-kepulauan saya sangat setuju.

Kemarin, kami Komisi V dengan orang yang terbatas hanya 5 orang dari Komisi V Pak, datang di Maluku kunsfik di sana, 11 Bupati dan Walikota, 10 Bupati dan 1 Walikota datang menyambut kami, rapat, dengan antusiasnya mereka. Saya sangat paham bahwa kehadiran kami Komisi V di sana itu dinanti kehadiran infrastruktur dan banyak sekali Bupati yang meminta dibangun bandara perintis di Kabupatennya, karena memang sadar betul tanpa ada bandara transportasi udara, mereka tidak akan lancar bertransportasi.

Hal-hal yang semacam itulah yang menjadikan prioritas untuk dipilih membangun bandara perintis, Pak, begitu. Detailnya nanti mungkin pada saat rapat dengan Dirjen Udara akan kami sampaikan, Bupati mana saja yang meminta, mungkin bisa menjadikan pertimbangan untuk memilih. Karena kita berbicara Indonesia, saya ini pulau Jawa tapi tidak harus sentris Jawa *gitu* kan. Saya harus melihat kenyataan ini dievaluasi bagaimana bisa operasional, tapi bagaimana ke depan ini bisa dijadikan satu pembelajaran.

Kemudian yang kedua, saya mencermati betul semangatnya dari Kementerian Perhubungan mungkin, ini Dirjen Perhubungan Darat. Ingin melakukan penertiban terhadap kendaraan *over* dimensi dan *overload*, bahwa di awal tahun 2023 ini harus segera dilaksanakan penertiban ODOL, saya setuju kalau memang itu bisa dilaksanakan. Tapi, yang menimbulkan satu pertanyaan, kesiapan dari Kementerian Perhubungan untuk menertibkan ODOL ini sudah sejauh mana? Apakah segala instrumen kemudian fasilitas penunjang, kebijakan, dan segala sesuatu yang terkait dengan koordinasi instansi lain sudah disiapkan atau belum. Sementara kita berbicara ODOL, opini di luar di sana itu banyak yang menyampaikan bahwa bila ODOL ini ditertibkan akan berdampak terhadap aspek sosial dan ekonomi. Tapi, kita kan tidak bisa terpengaruh oleh opini publik, opini yang saya anggap belum tentu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Yang menjadikan pertanyaan adalah sejauh mana Kementerian Perhubungan yang ingin menertibkan ODOL ini sudah melakukan kajian terhadap dampak sosial dan terhadap dampak ekonomi. Jangan berasumsi, pasti akan berdampak. Tapi, dampaknya sejauh mana? Sebesar apa? Apakah dampaknya itu akan menjadikan satu beban persoalan yang jauh lebih berat daripada kondisi sekarang ini daripada ODOL itu ataukah ternyata dampaknya tidak begitu berat, kalau memang tidak begitu berat ya tertibkan ODOL. Ada opini juga yang mengatakan termasuk saya juga mengatakan, bahwa itu bisa berdampak terhadap inflasi. Kalau berdampak terhadap inflasi, inflasi ini adalah persoalan yang jauh lebih besar daripada ODOL itu sendiri. Karena dalam kondisi yang inflasi negara tentu akan menghadapi sesuatu yang lebih sulit dan mengembalikan pada kondisi yang normal, itu juga tidak dengan cara yang mudah. *Nah*, yang semacam ini perlu ada kajian Pak, perlu ada penelitian.

Jadi, ODOL silakan ditertibkan, tapi jangan dikesampingkan dampak sosial dan dampak ekonominya. Semuanya itu harus dikaji, jangan sampai

menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah dan masalah itu justru yang lebih besar. Ya, saya sangat mendukung niat baik Kementerian Perhubungan kalau memang itu bisa dijalankan. Karena kenyataannya ODOL itu berdampak negatif terhadap kerusakan konstruksi jalan, terhadap kecelakaan, terhadap waktu tempuh dan segala macam. Tapi, di sisi lain meskipun itu di luar koridor peraturan perundang-undangan, ODOL itu juga berdampak terhadap daya jangkau beli masyarakat karena harganya bisa terkendalikan. Tapi, apakah itu semua menjadi sebuah kenyataan? Belum tentu, kalau tidak ada kajian tidak ada penelitian. Inilah yang saya dorong kepada Kementerian Perhubungan, persiapkan secara matang terlebih dulu termasuk kajian termasuk studinya baru melangkah sampai pada tahap penertiban ODOL.

Berikutnya kepada Kementerian, tentang tarif KRL yang memang sudah ramai dan Pak Menteri sendiri menyampaikan secara langsung bahwa tarif KRL itu memang harus dibedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Karena subsidi, itu memang untuk orang miskin bukan untuk orang kaya, kebijakan yang akan diambil oleh Pak Menteri Perhubungan. Saya secara pribadi dan juga sebagai Anggota Komisi V sangat setuju, 100% saya setuju itu. Karena esensi subsidi PSO itu adalah untuk orang miskin. Sementara penumpang KRL itu adalah campuran, belum tentu semuanya miskin, belum tentu semua orang yang ada di KRL itu adalah miskin, ada yang kaya. Kalau Pak Menteri pakai simbol itu dasi itu kan simbol ya, bukan berarti yang harus pakai dasi itu sesungguhnya, ya begitulah kiasan-kiasan saya sangat setuju sekali.

Tetapi mengimplementasikan kebijakan yang sangat bagus ini bagaimana, karena tidak bisa Pak, kalau orang kaya atau orang miskin ini hanya didasarkan pada data dari institusi tertentu, data dari institusi itu, Pak, tidak bisa dijadikan pedoman. Mengapa? Karena kevalidannya itu sangat diragukan Pak, penyimpangan daripada data itu bisa dibilang 70%. Sekarang ini contoh BLT PKH dengan kemurahan hati Pak Jokowi sebagai Presiden, membagi sembako, membagi BLT kepada warga-warga miskin itu, itu persoalannya adalah data, banyak sekali orang yang kaya tapi dapat, orang yang miskin justru tidak dapat. Tapi, ketika hal yang semacam ini para Kepala Desa yang di bawah, itu memberikan masukan tidak pernah direspon, tidak pernah diakomodir, tidak pernah dilakukan *update* data, ini persoalannya.

Maka saya *wanti-wanti* kepada Menteri Perhubungan, jangan sampai hal yang semacam ini itu terjadi pada kepada kebijakan Pak Menteri pada tarif KRL. Maka perlu ada metode khusus, Pak, andai kata berpedoman pada satu data itu, Bapak harus dengan *legowo* dengan lapang dada menerima masukan menerima saran, tidak boleh harus kaku seperti itu. Ini *wanti-wanti* saya, jangan sampai menimbulkan kegaduhan, menimbulkan satu persoalan baru yaitu persoalan sosial. Saya sangat setuju tapi saya *wanti-wanti* implementasinya harus betul-betul akurat.

Kemudian, juga saya ingin menyampaikan kepada Pak Menteri, sudah ada koordinasikah? Dinas Perhubungan DKI dengan Kementerian Perhubungan yang ada niat melakukan Jalan Berbayar Elektronik di Ibukota, *gitu*. Mengapa ini saya pertanyakan, karena ini ada kaitannya dengan

transportasi umum yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Misalnya ada KRL kereta, ada koordinasinya sejauh mana *gitu*. Ini sebenarnya bagus, tapi kalau kita lihat tujuan kebijakan dari Pemerintahan DKI melakukan jalan berbayar elektronik itu, untuk menurunkan angka kemacetan, coba dikaji sekarang ini jumlah kendaraan yang lewat pada ruas-ruas itu berapa dan nanti setelah dikeluarkan kebijakan itu menjadi berapa, menurun betul atau tidak, katanya mengurangi angka kemacetan, ada korelasinya apa tidak, kebijakan itu dengan angka kemacetan.

Tapi yang sesungguhnya yang menjadikan penekanan dari Kementerian Perhubungan bukan persoalan itu, apa? Transportasi umum di luar Jakarta, yaitu di Bogor, Bekasi, Tangerang dan Depok ini masih sangat minim transportasi umum, angkutan umum dari kawasan perumahan dari rumahnya masing-masing sampai kepada tempat kerja yang berada di Jakarta itu masih sangat minim. Begitu juga angkutan umum dari Jakarta ke Bogor, ke Tangerang, ke kawasan-kawasan perumahan itu sangat minim. Beda halnya dengan transportasi umum yang ada di wilayah Jakarta Pak, DKI, Pak. *Nah*, sekarang kan ada yang namanya Badan Pengaturan Transportasi Jakarta mungkin begitu ya, itu fokus terhadap hal ini. Bagaimana menyediakan transportasi umum, angkutan umum supaya yang di luar Jakarta itu yang bekerja di Jakarta terlayani secara baik.

Kemudian yang berikutnya Pak Menteri, sungguh saya sangat menyayangkan destinasi wisata-destinasi wisata yang menjadikan andalan Indonesia yang itu menjadi super destinasi wisata, seperti di Labuan Bajo, seperti yang ada di Borobudur di Jogja dan yang lain tempat ini harga tiketnya sangat mahal, harga tiketnya sangat mahal. Kalau yang lain sudah disampaikan oleh Ketua oleh, Pak Lasarus, disampaikan oleh Pak Suryadi. Tapi, saya mau mengkritiki khusus pelayanan transportasi udara ke super destinasi wisata. Padahal yang diharapkan itu adalah banyak orang yang datang ke super destinasi wisata. Dengan banyak orang yang datang di sana itulah menjadi pematik pergerakan perekonomian di daerah super destinasi. Misalnya, di Labuan Bajo di Manggarai Barat, misalnya yang di Jogja dan seterusnya.

Tapi, sayang, pada pihak tertentu itu berpikinya tidak komprehensif, berpikinya egois hanya memikirkan pihaknya saja, institusinya saja. Yang terpenting tarif pesawat ini tinggi berarti pemasukan bagi pihak saya tinggi, tidak terpikirkan terhadap dampak yang lain. Tidak sejalan dengan visi Pemerintah Pusat, tidak sejalan dengan Presiden, Presiden maunya Labuan Bajo, Jogja terus danau Toba, Likupang, dan seterusnya itu ramai dikunjungi oleh banyak orang. Boleh kita sedikit pendapatan dari sisi tiket pesawat, tetapi dari sisi yang lain perekonomian itu adalah maju. Tapi, sayang ini justru berpikir sebaliknya, memanfaatkan kesempatan. Saya berharap, Pak Menteri Perhubungan itu menertibkan hal ini, memberikan penjelasan pengertian terhadap hal-hal yang semacam itu supaya kita berpikinya secara nasional, tidak berpikir secara egois.

Kemudian yang terakhir *nih* Pimpinan, saya melihatnya subsidi Kementerian Perhubungan itu mengalami kenaikan. Di tahun 2022, subsidinya

sekitar Rp3,2 triliun, di tahun 2023 itu sebesar Rp3,5 triliun. Tapi, apakah betul subsidi ini alokasinya tepat? Apakah betul implementasi daripada subsidi itu betul-betul memberikan satu keadilan. Apakah itu dilaksanakan secara *fair* secara bagus? Belum tentu. Ya, contohnya seperti KRL, Pak Menteri akan memberikan satu evaluasi. Tetapi yang saya lihat dengan kasat mata, setiap hari saya melihat dengan kasat mata. BTS (*Buy Transport Service*), Pak, bis itu Pak, di Semarang, di Kota Surakarta *nggak* ada penumpangnya, Pak, sama sekali tidak ada penumpangnya, mungkin hanya satu, mungkin hanya dua bis hanya lalu lalang begitu.

Saatnya mungkin dievaluasi bener toh orang kota ini tepat untuk diberikan subsidi semacam itu, kayaknya tidak tepat. Saya kemarin ngobrol sama Pak Hamka yang bisa melihat langsung bagaimana BTS ini di Makassar, kata Beliau juga tidak ada penumpangnya, mungkin kawan yang lain juga bisa melihat seperti itu, tapi apakah kita yang harus menyampaikan. Mestinya dari Kementerian Perhubungan dengan sendirinya melakukan satu penelitian pengecekan melakukan kajian. Kalau memang itu kosong setiap harinya kosong, itu kan bisa dilihat dengan mudah dengan kasat mata masalahnya. Tidak perlu dengan angka itu bisa secara visual, kenyataannya seperti itu.

Maka saya minta, PSO yang dialokasikan *segini* banyak itu dilakukan evaluasi, Pak. Mungkin alokasi daripada subsidi banyak sekali yang tidak bisa kita lihat tapi kemungkinan besar juga mengalami hal yang semacam ini. Ini yang lebih tahu adalah Kementerian Perhubungan, karena Kementerian Perhubungan yang punya instrumen secara langsung untuk melihat, ini bukan Anggota Dewan. Kalau Anggota Dewan tidak punya instrumen, lihatnya hanya sebatas di daerah pemilihan, tapi sampai pada titik mana itu adalah Kementerian Perhubungan. Maka, saya hanya memberikan gambaran secara umum, masukan secara umum, tolong subsidi ini dievaluasi betul, angka 3,5 triliun bukan angka yang sedikit, ini diharapkan oleh rakyat miskin, Pak.

Terima kasih Pimpinan, *assalamu'alaikum*.

KETUA RAPAT:

Makasih. Selanjutnya, Pak, belum, Mas Dewo, Pak Syarif dulu *nih*, Syarif Alkadrie. Bersiap-siap, Pak Bob Andika. Sudah suruh pendek minta panjang, habis panjang pergi dia, *emang* Sudewo ini.

F – P. NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH.):

Pak Tamanuri, dulu.

KETUA RAPAT:

Silakan,

F – P. NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH.):

Daripada dia protes karena saya baru masuk, padahal tadi pagi, Pak, saya masuk.

KETUA RAPAT:

Nggak, Pak Syarif, yang ngatur rapat saya, Pak Syarif, dulu. Silakan, Pak Syarif.

F – P. NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH.):

Soalnya kata Pak Tamanuri, Pak Syarif baru sampai sudah mau *ngomong*, terima kasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

**Yang saya hormati, Ketua Komisi dan Pimpinan Komisi,
Bapak Menteri Perhubungan beserta seluruh jajaran Eselon I dan
jajarannya,
Teman-teman Komisi V yang saya hormati,**

Pertama-tama, berkaitan dengan Program Tahun 2023 yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Saya sebelum memasuki ke situ ada hal yang perlu saya sampaikan kepada Pak Menteri yang berkaitan dengan, ada pengajuan dari daerah selama sebelum covid. Penerbangan kita antara Pontianak dan Kuching-Serawak, itu kan berjalan dengan baik, Pak, setelah covid itu terhenti. *Nah*, sekarang ini sudah menyampaikan ke Kementerian untuk, bahkan Konsulat dari Malaysia juga kemarin menyampaikan, kita sudah menyampaikan ke Kementerian. Tapi, sampai saat ini itu belum ada jawaban Pak, dan memang volume untuk antar kedua negara ini memang cukup tinggi, Pak. Jadi, saya kira mohon ini bisa dapat dipercepat izin rute penerbangan antara Kuching dan Kalbar.

Kemudian, berkaitan dengan beberapa tadi, saya kira yang pertama juga saya bersyukur kemarin. Memang berkaitan dengan subsidi yang disampaikan ini ada beberapa daerah yang tentunya perlu perhatian. Pertama penyeberangan di Kalong itu, Pak Sambas, kemarin sempat mau dihentikan karena memang subsidinya cukup besar. Tetapi, masyarakat masih memerlukan untuk penyeberangan itu, apalagi jembatan sungai Sambas ini belum selesai. Dan, itu termasuk yang membuka akses untuk arah ke seberang sana, ke daerah ada lima kecamatan di wilayah itu yang cukup juga besar potensinya bahkan itu langsung menghubungkan juga ke daerah perbatasan. Saya ini berharap untuk jangan dulu dihentikanlah penyeberangan itu supaya tetap beroperasi, sampai kemarin saya sempat juga WA ke Pak Dirjen Darat kaitan dengan Feri itu.

Yang kedua, ada beberapa sebenarnya kemarin itu saya sampai saat ini halte yang sudah program di tahun 2022 masih belum selesai itu, Pak. Ada di wilayah Kubu Raya, kemudian di Kabupaten Sambas, ini mungkin perlu untuk dilihat ya, terhadap itu karena itu memang sangat diperlukan oleh masyarakat.

Ketiga, berkaitan dengan masalah, saya sekali lagi mempertanyakan itu Pak, berkaitan dengan masalah Penlok yang sudah ditetapkan di Kayong karena Bupatiya selalu bertanya *nih* Pak. Saya tanya Pak Boyman dia bilang saya mendukung *tuh* pembangunan itu, soal Pak Menteri bilang katanya, karena begini Pak, kebetulan saya satu Dapil. Karena Dapil ini sesuai dengan amanah undang-undang yang prioritas utama. Makanya saya tidak akan bicara untuk Dapil lain, karena Dapil ini sesuai dengan Undang-Undang MD3 Anggota DPR itu berkewajiban menyerap dan memperjuangkan aspirasi daerahnya. Ya maka kalau Dapilnya umpamanya Dapil Pak Boyman di Dapil II ya mungkin saya tidak menyampaikan karena ada Pak Boyman, *nggak*. Tapi, karena Pak Boyman sama-sama, maka saya kemarin tanya Pak Boyman.

Karena begini, dulu saya juga pernah mengusulkan kenapa *nggak* di Ketapang, pada waktu itu Pak Menteri bilang, saya sudah kita sudah liat yang di Kayong lebih potensial *gitu* untuk dibangun. Saya ingat masih periode yang lalu, Pak, bukan periode sekarang. Sehingga pada waktu itu ya mungkin di Ketapang masalah tanah dan sebagainya. Karena ini bentuk ini kalau memang itu tidak layak saya kira dijawab saja atau permasalahannya apa. Supaya ada dasar dari Pemerintah Daerahnya, karena sekarang itu kan dia sudah memprogramkan untuk apa pembebasan terhadap lahannya itu, ya kalau memang itu *nggak* layak ya sudah disampaikan saja supaya tidak menjadi selalu pembicaraan, ini kan penting ini, ya tetapkan saja Penloknya di tempat lain.

Supaya apa? Kita ini sebagai wakil, sebagai wakil di daerah DPR yang kebetulan membidangi bidang perhubungan. Kalau umpamanya itu bukan bidang perhubungan saya tidak akan jawab. Banyak yang nanya tadi kemarin nanya, bahkan tadi pagi berkaitan dengan masalah kekurangan dokter, saya jawab itu saya bukan di Komisi IX. Tapi ya, saya jawablah secara umum, tapi ini kaitan di Komisi saya dan itu sudah Penloknya juga sudah turun dan kemarin juga kita sebelumnya juga awal-awal juga kita sudah membahas ini antara dua daerah ini, karena memang secara strategis, yang sekarang itu memang strategis dalam rangka pembukaan kawasan dan daerah itu dijalan, transportasinya cukup bagus yang menghubungkan ke daerah pedalaman termasuk ke daerah Sanggau. Apalagi nanti kalau Perawas itu jadi, itu memperpendek dari Simpang Dua ke Sukadana.

Jadi, saya kira ini minta tegas sajalah, kalau memang dari Kementerian itu tidak menganggap itu tidak layak ya *udah gitu*. Daripada nanti itu Pak Boyman yang *nggak* setuju, *nggak* etis juga. Tapi, saya kira saya tanya, Pak Boyman saya tetap setuju masa saya *nggak* setuju, saya bilang ya kalau *nggak* setuju sampaikan saja pertimbangannya. Karena memang bandara yang ada sekarang itu yang ada di Ketapang itu *nggak* mungkin bisa lagi untuk dikembangkan, kecuali dia *roboh* rumah sakit itu. Karena sudah kan juga tidak mungkin kita cuma hanya berpikiran sekarang, kita kan berpikiran 10 sampai 30 tahun yang akan datang membangun itu.

Ini saya supaya *nggak* ditanya-tanya lagi, Pak Menteri. Saya kira itu yang lain karena 2023 ya kita lihat di sini beberapa juga sudah tercantum hal-

hal ini ya tentu ini merupakan nanti bidang pengawasasan ini saya tidak akan bicara di sini di 2022, tapi terhadap realisasi ini.

Saya kira itu saja, terima kasih.

Wallahul muwaffiq ila aqwamithaariq.
Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Makasih. Pak Syarif. Pak Bob Andika, Pak Bob Andika. *Oh* izin ya? *Oh* iya, Pak Tamanuri. silakan Pak Tamanuri.

F – P. NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M.):

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

**Yang saya hormati Pak Pimpinan,
Yang terhormat teman-teman sekalian yang saya banggakan,
Pak Menteri beserta jajaran,**

Saya melihat secara cermat apa yang disampaikan masalah Evaluasi Anggaran Tahun 2022, luar biasa di atas 90%. *Nah*, ini prestasi yang cukup lumayan, ada peningkatan-peningkatan di sana sini. Terutama juga BNPN yang sampai 102%.

Kemudian yang saya mau sampaikan adalah transportasi selama menjelang dan dalam bulan tahun baru dan natalan. *Alhamdulillah* tidak ada seperti dulu waktu jaman waktu kita hari raya, ada penumpukan-penumpukan, sekarang tidak, lancar. Akan tetapi kita dihadapkan dengan kondisi dan situasi ekstrim, *alhamdulillah* syukur dengan kondisi seperti ini ada dua mobil yang kejebur laut, truk dan mobil sedan. *Nah*, oleh karena itu kita harus ini jadikan satu pelajaran, supaya nanti akan datang apa upaya-upaya kita, supaya jangan sampai terjadi lagi. Walaupun itu dibawa gelombang sedemikian besar, kemudian, di dalam apa jembatan penyeberangannya tertarik. Kalau dia ada sebangsa pagar mungkin *nggak* sampai jatuh dia. *Nah*, ini walaupun saya dengar ada pergantian, tapi ini merupakan satu titik yang kurang baik bagi kita.

Kemudian saya juga menyampaikan, ini ada terminal yang di Terbanggi Pak, terminal Betan Subing itu. Terminal itu sudah sedemikian besar, akan tetapi kalau sudah tinggalin 7-8 tahun akhirnya berantakan sedemikian rupa. Alangkah baiknya kalau terminal ini dibangun kembali, karena bangunan-bangunannya masih ada. Dulu saya dengar waktu saya RDK sama Pak Menteri PUPR, beliau di situ mau bangun, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan *gitu*. Alangkah baiknya apabila Kementerian PUPR yang mendanai untuk membangun ini, kenapa? Karena ini adalah suatu, dulu PUPR, dulu mau PUPR, sekarang kita harapkan Pak Menteri Perhubungan yang bisa bangun itu. Karena apa, karena itu adalah merupakan satu terminal untuk masuk ke Kota Bandar Lampung.

Kemudian, lampu jalan, Pak, saya ini malu sebetulnya. Waktu jalan dari bandara sampai ke perbatasan Kota Bandar Lampung lebih kurang 19 km itu gelap, Pak, itu Pak Gubernurnya *nggak* bangun, Pak Bupati Lampung Selatan juga *nggak* bangun. Jadi, ini kalau kita gak ambil jalan tengah Bapak yang kerjakan *situ*, sampai kapanpun kalau malam itu gelap setengah mati. Kita *nggak* enak ngelihatnya, kita dari atas lihatnya terang benderang di bandara, tapi setelah keluar dari bandara gelap sedemikian rupa.

Kemudian, pembangunan bandara-bandara kecil, harapan saya adalah kepada Pak Menteri. Jangan dibangun semua Pak, bandara ini, selektiflah selektif, jangan semua tempat bangun bandara. Seperti ada satu tempat di provinsi yang di ujung situ, satu barisan itu 11 bandara dibangun Kabupaten-Kabupaten. Ya, ini semua memerlukan dana pemeliharaan dan pembangunan. Di Lampung saja itu namanya yang sudah dibangun sama Angkatan Darat yang bandara Gatot Soebroto sampai sekarang tidak ada fungsi apa-apa.

Nah, hal-hal serupa itulah, apalagi yang memang kita yang daerah yang dibantu oleh pusat dibangun. Jadi, selektif Pak, selektif, jangan yang *nggak* ada perkembangan, kita sudah lihat. Contoh-contoh yang hebatlah seperti Kertajati kan *nggak* ada manfaat sama sekali. *Nah*, oleh karena itu kita jangan buang-buang energi, buang-buang uang. Bukan saya *nggak* mendukung semua Kabupaten ada lapangan terbang, akan tetapi ya uangnya ke mana, Pak. Walaupun ada peningkatan Bapak dari 30 sekarang sudah Rp50 Triliun, akan tetapi kita itu bukan itu tujuan kita, tujuan kita adalah yang efektif dan efisien.

Kemudian satu lagi, Terminal Rajabasa yang tahun kemarin yang waktu masih Pak Dirjenya, Pak Budi, itu pernah direhab. Tapi direhabnya itu ya *alhamdulillah* syukur, rehabnya *nggak* begitu bagus, jalan-jalan di dalam itu berlobang-lobang. Jadi, sekarang bus itu *nggak* di dalam terminal, bus itu di pinggir jalan semua ada setengah kilo bus itu. Saya juga heran *nggak* ditertibkan sama Polantas dan Dinas Perhubungan.

Jadi ini hal-hal serupa ini *nih* ya menjadi tanda tanya, kenapa? Salah satu antaranya adalah karena jalan masuk itu kecil, Pak Walikotaanya *nggak* mau pembebasan jalan. *Nah*, jadi kita cari alternatif dulu pernah saya usulkan bahwa kita minta tanah di Teras itu, yang masih sekian banyak sekian luas jadi kita pindahkan terminal itu ke situ dan itu luar biasa hebatnya. Tapi, nyatanya *nggak*, Pak Budi waktu itu *nggak* setuju, tapi kalau ini buka di situ Pak ini hidup ini *nggak* mati ini terminal, jalannya jalan kecil bus dua *nggak* bisa masuk. Kemudian kondisi di dalam juga kurang memuaskan, ya kita *nggak* ngelihat karena dia di dalam, kalau dia di luar kita lihat *lobang-lobang* itu. Ya, inilah Pak Menteri, terima kasih atas perhatian.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Makasih Pak, Pak Hamka BKD silakan, Pak.

F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

**Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,
Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Sekjen dan seluruh jajaran Kementerian
Perhubungan yang hadir,**

Mudah-mudahan pada hari ini kita diberi kesehatan untuk bisa berpikir secara jernih di dalam mengevaluasi Anggaran Tahun 2022 sekaligus untuk menghadapi 2023.

Pak Menteri, soal yang pertama Evaluasi Capaian Tahun Anggaran 2022, saya baik secara pribadi maupun selaku Anggota DPR maupun di Badan Anggaran menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak terhadap capaian yang Bapak telah peroleh, kaget juga Pak, PNBP Bapak sekarang 106% itu luar biasa. Artinya mekanisme kerja atau sistem pemungutan PNBP ini, itu boleh dikatakan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun demikian Pak Menteri, saya berharap bahwa target yang sudah diberikan kepada Bapak oleh Pemerintah juga tahun 2023 itu menambah Rp1 triliun, itu adalah merupakan motivasi untuk menambah pendapatan negara dari Bapak. Ini benar-benar saya cermati dan saya ikuti dari awal, itu adalah merupakan prestasi yang cukup tinggi dan membanggakan. Saya dari sisi anggaran juga menyampaikan juga seperti itu kemarin di Badan Anggaran.

Selanjutnya, Tahun Anggaran 2023 yang menjadi kendala kemungkinan Pak Menteri, tetapi mudah-mudahan motivasi kerjanya tidak berkurang dengan adanya *automatic adjustment* lagi. Dari 33 triliun yang anggaran pagunya itu akan dikurangi kurang lebih 1,4 triliun. Ini juga merupakan suatu tantangan tersendiri buat Bapak, Pak Menteri dan seluruh jajarannya untuk meningkatkan kinerja capaiannya ke depan. Sengaja saya, ingin titipkan ini agar supaya tidak terpengaruh dalam operasionalisasi ke depan tahun 2023. Itu evaluasi saya, baik secara pribadi maupun selaku Anggota DPR di dua badan, satu di Badan Anggaran, satu di Komisi V, itu apresiasi saya cukup saya sampaikan dengan pada kesempatan ini.

Mengingat pada kaitan dengan Program Tahun 2023, Pak Menteri. Yang pertama, mari kita *clear*-kan, mari kita satukan pemikiran mengenai zero ODOL ini, tahun 2023. Apakah kita masih konsisten di dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 22, di mana pelanggaran pidana terhadap ODOL itu, itu cukup berat sebenarnya. Tetapi itu *law enforce*-nya yang belum tertata dengan baik dan belum dilaksanakan dengan baik.

Oleh karena itu, pernah disajikan kepada kami atau pemaparan Pak Dirjen kalau saya tidak salah Pak Dirjen, Pak Budi pada waktu itu mengarahkan zero ODOL tercapai pada tahun 2021. Tapi, kendala yang dihadapi luar biasa, apalagi ada surat juga dari Kementerian Perindustrian yang menyatakan bahwa tolong dievaluasi mengenai target zero ODOL tahun 2021 sehingga kita tidak bisa berbuat banyak untuk itu.

Oleh karena itu mari kita rumuskan Pak Menteri dan Pak Dirjen. *Zero ODOL* ini penting buat kepentingan umum ke depan, terkait juga kaitannya dengan pendapatan negara bukan pajak apalagi yang mengarah kepada di ASDP, misalnya. Apakah kita mempertahankan jembatan timbang atau kita menggunakan alat tersendiri untuk mengeliminasi atau mengurangi ODOL itu. Yang saya inginkan di sini, mari kita sama-sama rumuskan bagaimana sebenarnya ODOL ini bisa kita lakukan dengan baik tanpa mengganggu tanpa apa namanya, mempengaruhi aspek-aspek ekonomi di bidang transportasi. Saya cermati surat dari Kementerian Perindustrian menginginkan agar supaya *zero ODOL* ini bisa kita cermati dengan baik.

Oleh karena itu, Pak Menteri, mari kita bicarakan nanti dalam rapat-rapat dengan Pak Dirjen barangkali sudah punya konsep ke depan, ya. Saya kemarin sempat juga menyampaikan kepada Pak Dirjen bahwa *zero ODOL* yang dicanangkan itu apa yang harus kita lakukan sampai sekarang belum ada yang bisa kita lakukan secara konkrit.

Selanjutnya, terkait ada dua hal yang akan saya titipkan ke depan, mari kita sama-sama juga berpikir secara jernih mengenai dua hal. Yang pertama adalah mengenai BTS, dan yang kedua adalah subsidi tol laut. Tol laut sudah disampaikan kawan tadi bahwa begitu pentingnya tol laut untuk menyeragamkan harga di luar Jawa. Di sisi lain memerlukan subsidi, kita harus cermati betul bagaimana subsidi itu bisa diberikan sehingga tol laut ini berhasil dengan baik. Demikian pula BTS, bukan saya tidak setuju BTS, tapi barangkali perlu kita evaluasi, perlu kita lakukan apakah setiap Provinsi itu kita paksakan, harus dilakukan, seperti apa yang disampaikan di sini di dalam program tahun 2023, itu ada 10 kota yang akan ditargetkan lagi BTS itu akan dilakukan, ada 10 Kota Provinsi.

Sekali lagi saya tidak bermaksud mengurangi ide-ide itu dan ide itu adalah cerdas dan bagus untuk perkotaan, tetapi tentu kita harus melihat kondisi yang terjadi di sana. Sekali lagi saya tidak menyatakan bahwa tidak setuju dengan BTS, BTS dibutuhkan untuk transportasi umum, untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna transportasi umum.

Itu yang kira-kira ke depan nanti kita diskusikan khususnya kepada Pak Dirjen barangkali nanti ke depan kita mencari solusi dengan baik. Semua apa yang diprogramkan ini baik untuk kepentingan masyarakat, tapi tentu kendalanya kita harus mencari solusi yang terbaik.

Saya kira sebelum saya tutup, saya menyampaikan terima kasih lagi kepada Pak Menteri sudah menetapkan atau sudah membuat *legacy* mengenai perkeretaapian di Sulawesi Selatan. Walaupun, baru sedikit tetapi itu adalah cikal bakal untuk kita maju kepada program-program ke depan. Saya *tau* persis bahwa *masterplan* dari kereta api di Sulawesi itu akan terjadi kereta api trans Sulawesi sebenarnya, itu *masterplan* yang ide besar. Tetapi, bolehlah kita bangga ada di Sulawesi Selatan, orang Bugis baru pertama kali menikmati apa yang disebut kereta api, Pak.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya, terima kasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Iya, Pak Hamka terima kasih, Bugis itu terkenal di laut, Pak, ya, terkenalnya di laut kan? Pak Hamka ini Bugis terkenal di laut, Pak. Sekarang biar kembali ke darat kita kasih kereta api, iya ini Pak Hamka ini salah satu tokoh Bugis yang sangat dihormati. Terima kasih, Pak Hamka, semoga nanti kita jaya di laut, jaya di darat, Pak. Bob Andika Sitepu, bersiap-siap Pak Djenri.

F – PDIP (BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, S.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Ketua Komisi V beserta Wakil Ketua,
Yang saya hormati teman-teman Komisi V,
Yang saya hormati Pak Menteri Perhubungan beserta jajarannya,**

Saya pertama-tama mengapresiasi atas kinerja Pak Menteri di tahun 2022 yang begitu luar biasa, dan saya sekarang langsung untuk ke 2023, Pak Menteri.

Saya ucapkan terima kasih juga ke Pak Menteri, begitu hebat pesatnya pembangunan bandara di Sumatera Utara khususnya di pantai barat, Pak, Sumatera Utara di pantai barat Sumatera Utara. Ada Bandara Sibisa, ada Bandara Silangit, ada Bandara Pinangsori, ada Bandara FL Tobing tapi sekarang saya lihat ada lagi pembangunan Pak, bandara namanya belum ada namanya tapi saya sekarang ini Bandara Mandailing Natal, lagi tahap pembangunan. Luar biasa Pak, begitu banyaknya bandara di pantai barat ini yang dengan jarak tempuh kalau kita lalui dengan kendaraan bermotor itu paling jauh dua jam setengah, Pak, hari ini hadir kembali Bandara Mandailing Natal, di ujung pantai barat. Walaupun antara bandara Mandailing Natal dan Pinangsori ini Pak, jaraknya dua jam-an, Pak.

Jadi, kita bukan tidak setuju atas pembangunan bandara Mandailing Natal ini, Pak, kita setuju Pak, dengan *design* luar biasa yang dirancang oleh Kementerian Perhubungan. Tapi apakah *nggak* sia-sia kita Pak, menganggarkan begitu besar sampai anggaran Rp300 Miliar di situ, Pak. Apa target kita dengan pembangunan Bandara Mandailing Natal ini yang begitu besar dengan anggaran seperti itu. Apakah *nggak* bisa kita hitung kembali pembangunan bandara ini yang bagaimana cukuplah, Pak, *nggak* usah kita bayangkan semegah mungkin. Karena ini kan bandara ini kita bayangkan jangan nanti ini akhirnya disubsidi juga oleh Kementerian Perhubungan, akhirnya kita capek Pak, anggaran kita mensubsidi bandara-bandara tersebut.

Saya minta juga ke depan tolong dulu juga Pak Menteri, Inspektur Jenderal, untuk memang mengecek dulu pembangunan di bandara Mandailing

Natal ini. Karena kita inginkan bandara Mandailing Natal ini salah satu kebanggaan masyarakat Sumatera Utara yaitu yang pernah disampaikan Pak Gubernur Sumatera Utara, ya, ini jadi salah satu bandara kebanggaan bagi masyarakat pantai barat yang di ujung. Walaupun, waktu pemaparan kami kunjungan reses, Pak, disampaikan oleh Kepala Bandara ini akan menarik penumpangnya dari Provinsi lain. Kita *nggak* usah dulu cerita Provinsi lain, Provinsi Sumatera Utara saja yang sekitar bisa ditarik saja sudah luar biasa, sedangkan Pinangsori saja untuk penumpang naik di Pinangsori saja belum maksimal, Pak, kenapa dalam bayangan saya kenapa *nggak* Pinangsori ini saja yang kita besarkan. Ada lagi bandara yang *demand*-nya luar biasa ini di Bandara Binaka Nias, kenapa *nggak* ini saja kita bangun fokus Pak, kenapa harus kita menghabiskan APBN yang begitu besar sampai Rp300 miliar *gitu* Pak, kita bukan *nggak* setuju pembangunan itu. Tapi, mungkin ada kajian Bapak atau separuh anggaran itu saja itu sudah terbangun bandara Madina. *Nah*, jangan nanti kita akhirnya bandara yang kita banggakan ini jadi nanti tidak maksimal penggunaannya.

Yang kedua, Pak, mengenai pembangunan kereta di Sumatera Utara saya ucapkan juga terima kasih, Pak, JLKA untuk mengurai kemacetan di Kota Medan yang salah satu kota besar di Indonesia ini dan pembangunan-pembangunan, peningkatan-peningkatan rel yang luar biasa Bapak bangun pesat di Sumatera Utara. Tapi ke depan Pak, saya mohon juga, Pak, bagaimana ke depan ini jembatan-jembatan kereta api ini betul-betul juga diperhatikan, Pak, peningkatannya sudah luar biasa, tapi jembatan-jembatan ini Pak, tolong juga ke depan ya diperhatikan. Karena salah satu contoh jembatan kisaran menuju Tanjung Balai ini, Pak, saya sekarang ini sudah miring jembatan ini, Pak. Hal-hal seperti ini perlu juga diperhatikan oleh Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Kereta Api bahwasannya ke depan sudah selesailah peningkatan-peningkatan ini, Pak, lebih bagus ke depan kita lihat bagaimana jembatan-jembatan yang dilalui oleh kereta api tersebut bisa kita bangun, itu dia, Pak.

Terus selanjutnya Pak, saya ingin juga, kapan ini diaktifkan kereta api Binjai ke Besitang, Pak. *Nah*, ini luar biasa Pak sudah lama ini dibangun tapi sampai sekarang belum aktif-aktif. Selalu kita pakai APBN Pak, selalu untuk menggunakan APBN untuk membeli barang-barang yang sudah hilang dicuri masyarakat, Pak. Selama dua tahun ini saya dengar terus kita memakai APBN untuk membeli barang-barang yang sudah banyak dicuri-curi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap peningkatan-peningkatan rel yang Binjai-Besitang tersebut, Pak.

Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Pak, jangan nanti ini jadi akhirnya nanti di akhir masa jabatan Pak Menteri ini jadi temuan, Pak, karena sudah lama dibangun, tapi tidak diaktif-aktifkan. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih, Pak Bob. Bandara Sibisa, jaraknya saya dapat informasi dekat-dekat ya, Pak. Ya nanti mungkin penjelasannya Pak Menteri.

Kalau *nggak* salah kita kan jarak tempuh sekian ada aturannya kalau *nggak* salah saya di Perhubungan itu supaya anggarannya efektif. Baik saya persilakan selanjutnya Pak Djenri, bersiap-siap Pak Eddy Santana. Nanti, nanti nanti tak kasih pada satu putaran berikutnya.

F – PDIP (DJENRI ALTING KEINTJEM, S.H., M.H.):

Makasih.

**Pak Pimpinan Komisi V,
Pak Menteri, bersama jajarannya,**

Selamat, Pak Menteri karena banyak mendapat prestasi 2022, mungkin ini karena koordinasi baik dengan Komisi V, Pak, sehingga serapannya itu sampai 98% itu luar biasa. Saya katakan itu mungkin salah satu hasil koordinasi yang baik dengan Komisi V, tapi mudah-mudahan koordinasi-koordinasi ini berlanjut sampai di daerah. Karena sampai hari ini, Pak, saya tidak pernah berkoordinasi dengan balai Bapak di daerah saya di Sulawesi Utara. Ya sampai hari ini saya hubungi dari kemarin, rupanya *nggak tau ngumpet* di mana ini Kepala Balainya di sana, itu yang pertama, Pak.

Baru masih tetap titip salam, Pak, yang pernah saya titipkan ke Bapak itu, kita KSPN itu saya katakan lagi seperti anak tiri kita. Saya tidak mau minta seperti Danau Toba, tapi KSPN kita salah satu yang ditetapkan oleh Presiden itu, kerjaan Bapak di Sulut itu, kemarin cuma merehab pelabuhan Likupang *aja* yang merupakan salah satu tujuan wisata di Indonesia yang ditetapkan oleh Pak Presiden. Mudah-mudahan kita mau lihat 2023 ini dengan capaian prestasi 2022 kemarin, jadi motivasi sehingga program yang kami usulkan itu tidak hanya *lip service* lagi saya katakan, masuk di kiri keluar di kanan. Mudah-mudahan kita akan lihat di 2023 ini, ini mungkin evaluasi yang kami boleh sampaikan.

Kemudian, saat kami reses baru selesai ini, ada beberapa daerah yang kami tuju seperti di daerah Bolaang Mongondow itu, di sana erat dengan tarkam, Pak. Kalau Bapak ke Sulawesi Utara tanya tarkam itu paling banyak daerah sana. Pertama karena kalau malam itu di daerah sana karena daerah sekitaran tambang, tambang-tambang rakyat di sana. Di wilayah Dumoga Raya itu sampai ke Kota Mobagu itu minta agar supaya ada penerangan jalan malam itu, karena seringkali jadi masalah karena gelap, mobil lewat di situ itu dilempar, dilempar kemudian kampung yang kena lempar itu balik ke sini cari orang yang melempar tersebut, terjadilah tarkam begitu. Sehingga di wilayah jalan nasional itu minta ada penerangan jalan sampai ke Kota Mobagu, ke Kota Kota Mobagu, itu permintaan dari Pemerintah sana juga, Kota Kota Mobagu agar supaya jalan dipasang lampu.

Mungkin hal-hal ini yang perlu saya sampaikan ke Pak Menteri, ya mudah-mudahan karena Pak Presiden selagi berkunjung ke Sulut ya hari ini itu ada hal positif lagi yang akan didapat masyarakat di sana itu setelah ada kunjungan Presiden. Bukan hanya ada hubungan dengan PUPR saja, karena ada peresmian salah satu bendungan besar. Tapi dalam bidang Perhubungan

juga kita akan lihat apa apa yang akan dibuat apalagi yang saya katakan tadi karena kita salah satu KSPN yang ada di Indonesia yang ditetapkan oleh keputusan Presiden. Mungkin ini, Pak Pimpinan dan Kementerian, makasih.

KETUA RAPAT:

Baik makasih Pak Djenri, silakan Pak Eddy. Bersiap-siap Bu Neng Eem.

F – P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Makasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan yang saya hormati beserta seluruh Anggota Komisi V,
Pak Menteri beserta seluruh jajaran Kementerian Perhubungan yang
sangat saya hormati,**

Pertama, langsung saja saya ingin menanyakan perkembangan pelabuhan Tanjung Api-api. Waktu itu disampaikan Pak Menteri bahwa pelabuhan ini diserahkan ke BUMD Sumatera Selatan, apakah ini sudah jalan? saya kurang yakin, Pak. Kalau BUMD yang diserahkan, diserahkan ke BUMD itu bisa berjalan dengan baik, BUMN saja susah Pak, apalagi BUMD. *Nah*, lebih baik mungkin ada kerja sama antara BUMD dan BUMN, juga masukan APBN Pak, sedikit. Begitu masuk APBN, saya kira investasi akan datang sendiri Pak, karena kita perlu pelabuhan CPO, sawit, perlu juga pelabuhan batubara.

Nah, mungkin masing-masing nanti kita siapkan ada terminal umum batubara, dermaganya *jetty* nya. Kemudian, juga untuk CPO *nah* itu baru bisa berjalan Pak Tanjung Api-Api, saya kira itu bagus. Kalau masalah yang lain, listrik, itu harusnya Pemerintah Daerah sudah memikirkan untuk dibangun *powerplant* itu, karena dekat Pak, dari ini, gasnya dari sumbernya sangat dekat di Tanjung Api-api itu, jadi *nggak* masalah. Hanya kita lebih perlu keseriusan untuk membangun Tanjung Api-Api itu pelabuhan. Saya kira itu yang pertama, jadi mohon perkembangannya sampai di mana.

Kemudian mengenai bandara, Pak. Dulu ada beberapa bandara dibangun oleh daerah melalui APBD ataupun juga saya kurang *tau* persis, ada APBN-nya barangkali. Tapi bukan Kementerian Perhubungan menangani langsung, artinya dari Pemerintah Daerah. Contohnya di Sekayu, kemudian adalagi di danau Ranau Pak. Maksudnya bagus untuk wisata, danau Ranau itu danau kedua terbesar setelah Danau Toba di Sumatera. *Nah*, tapi sekarang itu tidak berjalan Pak, kalau Danau Ranau ini sekarang tempat jemur sapi Pak di situ bandara itu. Ya, orang lepaskan di situ kan banyak rumput di sana kiri kanannya dan di situ lah berjemurnya sapi-sapi di sana, saya pernah liat sendiri, *nah* demikian juga di Sekayu, Pak, alangkah sayangnya itu.

Nah, bagaimana yang ingin saya tanyakan studi kelayakannya apakah ada kaitannya dengan Kementerian Perhubungan juga perizinannya pada waktu itu, kan bukan jaman sekarang ini, sudah lama itu. *Nah*, walaupun itu nanti kita evaluasi dan kami mohon ada evaluasi dari Kementerian

Perhubungan. Masih bisa dimanfaatkan, misalnya di Sekayu itu untuk Poltek Penerbangan, bukan Terbang, Pak, kalau Pak Budi *tau* penerbangan itu kalau *nyambut* orang kawin tuh pakai gendang-gendang *tuh* Terbang, tapi penerbangan poltek penerbangan.

Nah, mungkin itu di sana Bupatinya juga sudah menyiapkan banyak dulu bekas wisma atlet PON itu bisa dijadikan perumahan, banyak bangunan-bangunan yang bisa dimanfaatkan, tanah juga diberikan oleh Bupati kalau mau tambahan-tambahan, *nah*, inilah. Tapi, kalau untuk penerbangan komersial, komersial maksud saya, itu kita lupakan saja, Pak. Sekayu itu cuma dua jam dari Palembang, orang pasti pilih bandara Palembang, Sultan Mahmud Badaruddin, karena ke Jakarta 30 kali, kalau di situ mau ke mana *gitu*, mau ke Palembang baru mau naik turun lagi, mau ke Jakarta berat orang, pasti pilih Palembang. *Nah*, ini...ini yang jadi masalah di sana, saya kira tapi bisa dimanfaatkan untuk mungkin pendidikan pilot atau poltek penerbangan, itu sudah pernah saya sampaikan sebetulnya.

Nah, kemudian, Silampari Pak, Silampari ini sebetulnya malu Pak, saya nyampainya ke daerah, sebagai putra daerah sana dan Dapil Sumatera Selatan I, langsung. Dari 50 dijanjikan Pak, Rp50 Miliar, turun 30, turun 20, sekarang tinggal 10, Pak, *nah* 10 itu Thalut saja tidak cukup Pak, untuk Thalut menahan tanahnya. *Nah*, ini ini Pak, Menteri tolong ini diperhatikan, janji dari teman-teman perhubungan, komunikasinya ini akan MYC, MYC kapan Pak, *multiyears contract*, hanya pekerjaan kecil. Di sini kalau kita lihat di sini berapa triliun perhubungan udara itu bisa 8 lebih ya kan, untuk 50 itu kecil sekali saya kira. Dan, bandara itu saya berketad untuk Silampari menjadikan bandara kedua setelah Sultan Mahmud Badaruddin II. Itu pasti berjalan dengan baik, saya yakin itu. Karena dari Curug, dari Rejang Lebong, dari Kepahyang, dari Jambi juga, Lubuklinggau sendiri, dari Empat Lawang ada 10 Kabupaten/Kota itu bisa memanfaatkan bandara Silampari itu. *Nah*, jadi mari kita tekadkan itu menjadi bandara kedua setelah, kalau yang lain lupakan saja Pak, Sekayu jadikan poltek saja, poltek penerbangan.

Nah, kemudian tadi juga teman-teman mohon maaf ini, berbicara masalah BTS, jadi sistem *buy the services* ada subsidi untuk *public transportation* ini, untuk bus lah. *Nah*, saya mohon ini tidak disamaratakan Pak, jangan digeneralisir, kalau untuk Palembang bagus, silakan lihat di sana sudah puluhan ribu yang pakai itu. Dan, memang kami sudah berjalan lama, dulu pernah kita punya kota itu 120 bus tapi sekarang sudah jadi rongsongkan semua, dibantu oleh Menteri, terima kasih Pak, sekarang dengan sistem *buy the service*. *Nah*, itu berjalan, dan inilah untuk *feeder* LRT, kalau gak ada bus itu LRT juga macet. *Nah*, Pak, Menteri bantu lagi dengan angkot, *new* angkot itu itu luar biasa saya kira.

Hanya saya mohon untuk LRT itu disambungkan Pak, artinya dari ujung itu ke Unsri (Universitas Sriwijaya) dia dipakai oleh mahasiswa, ada 20.000 mahasiswa. Ya kita katakanlah 5.000 saja pakai itu Pak, LRT itu sudah terpakai dari ujung Pak, Jakabaring, ada bus yang bolak balik hanya Jakabaring lewat tol ke Unsri. Saya yakin LRT itu akan penuh Pak, oleh mahasiswa, *nah*, ini tapi kalau sekarang mahasiswa wah mau naik LRT nanti turun di mana kan jadi

bingung Pak, akhirnya LRT itu hanya dipakai untuk wisata sabtu minggu. *Nah*, mari kita evaluasi, kita pelajari lagi, saya yakin LRT itu dan juga sistem *buy the service* yang berjalan di Palembang, terima kasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Makasih. Sekarang sudah hampir jam 1 ini, tinggal sedikit sih Pak. Apakah kita tuntaskan atau kita *break* dulu ya makan siang? Saya minta persetujuan teman-teman, tersisa lima orang, Pak Menteri? iya saya *nggak* enak juga nih. Sholat sudah lewat ya? oh masih bisa yang mau sholat silakan ya, diingatkan sekalian untuk bergantian, Bu Neng Eem.

F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, M.M.):

Oke.

KETUA RAPAT:

Yang singkat-singkat saja Bu.

F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, M.M.):

Iya, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ini kan pengawasan saja.

F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, M.M.):

Siap.

KETUA RAPAT:

Nanti dengan Eselon I kita bisa panjang lebar ngomongnya itu lagi juga, silakan Bu.

F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, M.M.):

Oke, karena disuruh singkat jadi saya mungkin langsung saja menindaklanjuti kunjungan kerja ke Maluku Utara. Ini mohon apa minta kabarnya ini Pak, terkait permohonan revitalisasi bandara di Halmahera Selatan. Karena kalau bicara tentang Maluku Utara, penduduk terbanyak itu ada di Halmahera Selatan dan mobilitas tertinggi itu juga di Halmahera Selatan. Bukan berarti saya tidak setuju pembangunan lebih prioritas pulau-pulau terluar, Kabupaten terluar seperti Morotai, tetapi tolong proporsional *gitu* kan, proporsional. *Nah*, ini karena di Maluku Utara itu ada penduduk terbesar dan mobilitas tertingginya ada di Halmahera Selatan maka mohon bandara di

Halmahera Selatan untuk direvitalisasi, biar tidak kemudian melalui laut terus, melalui *speed* dan lain sebagainya *gitu* kan seperti itu.

Terus kemudian untuk selanjutnya saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Dewa tadi bahwa memang Maluku, Maluku Utara, Papua itu juga memang bagian terpenting dari Indonesia. Maka ini juga ada permohonan terkait pembangunan dermaga lokal di pulau Amaskaru dan pembangunan dermaga lokal di Pulau Panjang. Ini penting, kenapa penting? Karena ini merupakan transportasi antar pulau di Kabupaten Seram bagian timur yang juga merupakan jalur ekonomi dari kabupaten Seram bagian timur ke Sorong ke Provinsi Papua maupun ke Fakfak di Papua. Jadi, ini adalah wilayah-wilayah yang bisa apa moda yang menyambungkan konektivitas tidak hanya di dalam satu pulau di Provinsi Maluku saja, tetapi itu juga *nyambung* ke Papua maupun Papua Barat. Walaupun sekarang Papua-nya Provinsinya sudah bertambah.

Terus kemudian yang ketiga terkait *cable car* Pak. Itu kan sudah di beberapa di media sudah muncul yang rencana akan dibangun di jalur Puncak yang mungkin hampir tiap pekan awal pekan akhir pekan itu terjadi kemacetan, di setiap libur itu terjadi kemacetan. Maka, harapan adanya *cable car* itu agar segera bisa direalisasikan, agar intervensi untuk mengurangi kemacetan di jalur Puncak yang hari ini juga belum terselesaikan itu minimal bisa mengurangi.

Terkait dengan BTS, mungkin beberapa daerah memang apa, masih kosong, berarti artinya kurang fungsional, maka harus ada pemilihan yang tepat. *Nah*, kalau penyangga Ibukota DKI Jakarta wilayah aglomerasi yang menyangga Ibukota Jakarta memang moda transportasi yang terintegrasi itu amat sangat dibutuhkan. Termasuk juga memang di Kabupaten Bogor memang belum menerima, Kota Bogor tetapi sudah menerima, itu memang ada manfaatnya karena memang bisa *nyambung* ke MRT, KRL dan lain sebagainya. Seperti dan mungkin dalam saya meminta nanti Kepala Balai Jabodetabek untuk kita ingin survei juga BTS ini apakah memang seperti yang disampaikan teman-teman memang masih diperlukan atau memang sangat efisien atau dipertahankan dan lain sebagainya *gitu* kan. Karena kalau kemarin waktu awal-awal itu saya mengira itu akan sangat efektif, seperti itu.

Mungkin itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu, mudah-mudahan nanti Pak Menteri *nggak* sakit maag telat makan. Silakan Pak, Ibu Novita sekarang, bersiap-siap Pak Willem Wandik. *Sorry*, Bu Sri Wahyuni habis itu Bu Novita.

F – P. NASDEM (SRI WAHYUNI):

*Bismilahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

Yang saya hormati Ketua Komisi V beserta Pimpinan yang lain,

**Yang saya hormati juga Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Pak Menteri beserta seluruh jajaran,
Salam sejahtera buat kita semua,**

Saya sedikit saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Pak Menteri, apresiasi yang tinggi atas pencapaian Pak Menteri. Semoga pencapaian bagus ini juga berdampak ke Komisi V yaitu terkait program-program Pak Menteri.

Yang kedua, berkaitan dengan program padat karya yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan agar selalu berkoordinasi dengan kami dari Komisi V, yang mana kalau ada pekerjaan di Dapil kami tolong tenaga kerjanya dari Dapil kami. Jangan mendatangkan jauh-jauh tenaga kerja dari daerah lain *gitu*, apalagi dari luar negeri.

Yang ketiga, terkait keterbukaan program yang ada di Kementerian Perhubungan. Itu kita sebenarnya pengen *tau* apa saja yang ada *gitu* yang ada di Kementerian Perhubungan ini. Jangan sampai ada program anggarannya ditambah terus tetapi tidak ada dampak yang baik ke Komisi V, *gitu*.

Selanjutnya, Pak Menteri saya ada memasukan beberapa

KETUA RAPAT:

Sudah mau diserahkan aja, Bu?

F – P. NASDEM (SRI WAHYUNI):

Sudah, Pak.

KETUA RAPAT:

Sudah?

F – P. NASDEM (SRI WAHYUNI):

Saya cuma ingin menanyakan apakah ini sudah ditindaklanjuti atau belum begitu, terkait pengembangan trayek bus pariwisata yang ada di Dapil saya yaitu ada lima Kabupaten, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek dan Magetan. Ini Dapil saya ini cukup banyak Kabupatennya dan jauh-jauh jaraknya luas-luas penduduknya sangat banyak setiap Kabupaten hampir 1 juta. Jadi ini memerlukan pengembangan trayek dan bus pariwisata. Itu saja yang saya rasa Ketua yang bisa saya sampaikan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, Bu Novita silakan, Bu. Sebelum kita makan siang.

F – P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

**Yang saya hormati Pak Ketua, Wakil Ketua, Anggota,
Pak Menteri, Pak Sekjen dan semua jajaran yang saya hormati,**

Yang pertama, Pak Menteri saya apresiasi, realisasinya tinggi kemudian apa penghargaannya juga banyak, Pak Menteri, ini saya lihat luar biasa, apresiasi yang sangat itu berarti kerjanya sudah sangat optimal. Apalagi Sekjennya baru ya Pak Novi, sama namanya jadi harus sama-sama saling memuji, satu ganteng satu, *loh* Pak Bakri.

KETUA RAPAT:

Udah makan siang, Bu Novi.

F – P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Iya, sabar *sih* kenapa saya tunggu dari pagi *loh*. Kemudian, PNBP-nya juga tinggi Pak Menteri, 100 lebih ini luar biasa, apalagi dalam kondisi yang baru pemulihan *gitu*. Padahal saya lihat kayak terminal saja belum maksimal *gitu*, apalagi kalau terminal ini bisa maksimal, ini saya *nggak* nyindir Pak Hendro *loh* ya. Tapi, ini secara umum karena terminal ini kan memang yang saya mengikuti dari sebelumnya, bus-bus ini seperti tadi yang disampaikan kan banyak yang *nggak* masuk terminal. Sehingga kalau umpamanya ada yang sewa-sewa di dalam terminal ini jadi *nggak* laku, *gitu*.

Makanya ini belum masuk dan optimal terminal saja sudah 106. Jadi harapannya kalau yang di Dirjen Darat mungkin terminal bisa diarahkan masuk, kemudian menarik terminalnya, padahal bangunannya sudah bagus-bagus saya lihat di Mangkang kemudian di Rajabasa, Cilacap, Banyumas dan di Indonesia lah saya lihat terminalnya sudah dibangun bagus. Kemudian, *tenant-tenant* nya juga tapi kalau busnya *nggak* masuk pasti *nggak* akan bisa mendukung, itu Pak Menteri.

Kemudian, sekarang ini kan, apa, kondisi cuaca lagi kadang-kadang ekstrim *gitu*, kadang-kadang sangat ekstrim *gitu* jadi tidak menentu Pak Menteri. Jadi, harapannya di moda transportasi yang ada di Pak Menteri ini, alat-alat keselamatan mohon untuk bisa dimaksimalkan dan dipantau seperti di pesawat, kemudian di kapal. Apalagi di kapal laut ini banyak belum tentu juga yang naik kapal itu bisa berenang *gitu*, kemudian di pesawat terbang itu juga jadi alat-alatnya harap bisa di *monitor* jangan sampai tidak lengkap. Kejadian seperti di Labuan Bajo kapalnya tenggelam tidak bisa tertolong, itu yang sangat penting. Kalau di darat mungkin masih mikir ada jalan langsung bisa loncat, kalau di pesawat, di kapal, *gitu* kan mikirnya juga susah, apalagi kayak saya *nggak* bisa berenang, pengumuman *nggak* bisa berenang.

Kemudian kalau ada sisa-sisa anggaran mungkin bisa dimaksimalkan untuk bantuan padat karya juga, Pak Menteri Pak Sekjen dan semuanya. Karena perekonomian juga kan belum begitu berjalan dengan normal *gitu*.

Kemudian khusus di Dapil saya Pak Menteri saya Dapil Banyumas-Cilacap. Saya punya pelabuhan, memang dari dulu saya, tahun kemarin saya mengusulkan untuk adanya pengerukan. Tapi, kelihatannya katanya program pengerukan belum bisa dilaksanakan *gitu*, itu hanya pemikiran semoga ke depan bisa dilakukan. Karena ini bisa membantu, masuknya kapal-kapal yang lain karena sekarang adanya sedimentasi yang tinggi di Cilacap.

Kemudian juga, kegiatan padat karyanya di Cilacap *sih* bagus Pak, dari KSOP, kemudian kenavigasian itu berjalan dengan lancar, bahkan kereta api juga bagus, darat juga dengan sebelumnya tapi, sekarang belum ada kegiatan ya Pak Hendro ya. Kemudian, kayaknya saya *ngincim* banget sama Pak Hendro. Jadi, kegiatan-kegiatan padat karyanya yang sebelumnya terima kasih karena tahun ini pasti Januari belum ya Pak, ya, saya melihat kalau yang sebelumnya sudah sangat bagus kenavigasian, KSOP-nya. Tapi butuh untuk penambahan fasilitas-fasilitas karena gedung KSOP juga kurang apa namanya, maksimal *gitu* sehingga bisa menyemangati kan Pak, kalau gedungnya bagus *gitu*.

Kemudian itu pengerukan, kalau bandara, Pak. Saya sama Pak Menteri ke Purbalingga kan, Pak, terbang dari Jakarta *tuh*. Purbalingga tadi disampaikan sekarang juga penerbangannya katanya *tuh* kurang maksimal, apalagi di tempat saya Cilacap *gitu*. Cilacap ini yang sudah ada bandara saja sekarang *nggak* ada penerbangan, bayangkan yang Purbalingga yang sudah ada aja sekarang *nggak* maksimal.

Kemudian Cilacap, Pak, Cilacap ini ada dua sekolah penerbangan, saya pikir ini saya usul di momen ini. Di Cilacap kalau memang, saya ucapkan terima kasih Pak Menteri, Pak Sekjen, dulu Pak Dirjen Udara sudah mengupayakan, tapi karena belum bisa berjalan, mungkin alangkah baiknya kalau di tempat saya itu penerbangannya dijadikan sekolah saja sekalian *gitu*. Karena itu luasnya hampir mau 50 hektar, 40 hektar lebih Pak Menteri, di situ sudah ada dua *flying school* yang menetap, *fix gitu*, kemudian ada juga yang datang. Kalau, *aduh* bersin-bersin, kalau seandainya itu dijadikan sekolah penerbangan sekalian itu alangkah bagusnya Pak, karena itu luasnya sangat memadai menurut saya. Kemudian, saya juga dengar kepalanya ganti ya Pak, ya sudah ditarik itu Kapten Renato. Karena di sini ada sekolah penerbangan, saya harap penggantinya nanti juga kalau bisa pilot. Karena di sini jangan sampai bukan pilot karena ada *flying school* nya, itu usulan saya.

Kemudian kereta api, kereta api nya ini juga sangat menjadi primadona, pastinya perlintasannya semoga makin panjang di Indonesia, kalau di Cilacap sudah representatif, kemudian darat *gitu*.

Berikutnya Pak, saya mau tanya di sini ada di halaman 11 itu ada kapal wisata. Ini saya *pengen* tanya ini kapal wisata itu dalam program apa *gitu*, Pak, apakah perhubungan laut membuat kapal wisata *gitu* saya ingin penjelasannya.

Kemudian ini kalau iya di mana saja dan maksudnya bagaimana *gitu* kapal wisata ini.

Kemudian juga ada perlintasan sebidang, ini pelaksanaannya bagaimana di nomor 11 apakah hanya menutup perlintasan yang liar atau memberikan bantuan kepada perlintasan yang belum ada palang pintunya. Itu yang ingin saya tanyakan dan koordinasi mengenai apa, perlintasan sebidang yang jalannya sangat rusak, karena kalau tidak diperhatikan juga tidak ada koordinasi bisa membahayakan.

Dan, saya, kemudian saya ingin menanyakan tentang darmaga di Bali yang waktu itu ambruk itu Pak, yang belum yang *tau-tau* banyak wisatawan kecebur *gitu*. Itu saya waktu itu mau tanya sama Pak Dirjen kelewatan makanya di sini saya ingin tanya itu kok kenapa baru jadi kok ambrol *gitu, oh* bukan ya.

Kemudian yang kereta api Jakarta-Bandung, Pak, ini saya juga tanyanya di sini apa di mana ini katanya kemarin kecelakaan katanya ada korban jiwa. Saya WA sama Dirutnya juga *handphone*-nya juga apa centang satu apa sudah ganti apa belum jadi saya *nggak* ngerti mau komunikasi mau tanya ke siapa. Sehingga, pada saat ini saya ingin tanya itu ceritanya *gimana* belum berjalan maksimal tapi sudah ada kecelakaan dan bahkan infonya ada korban jiwa.

Yang terakhir, sama seperti yang ditanyakan tadi ada teman saya tentang jalan berbayar yang di DKI. Karena saya *nggak* berhubungan langsung dengan Kepala Dinas DKI, saat ini saya beberapa kali ditanya *gitu* tentang jalan berbayar. Apakah yang saya tanyakan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan di sini mengenai tarifnya, titiknya. Karena harapan saya kondisi kita ini kan masyarakatnya belum begitu pulih. Jadi, jangan sampai membebani juga kepada masyarakat yang melalui perlintasan tersebut.

Terima kasih Pak Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen semuanya.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, selanjutnya Pak Boyman Harun. Bersiap-siap Pak Willem Wandik.

F – PAN (H. BOYMAN HARUN, S.H.):

Baik, terima kasih.

**Pimpinan, Ketua dan Wakil Ketua, seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati,
Bapak Menteri, Bapak Dirjen, Pak Sekjen beserta seluruh jajaran yang saya hormati,**

Pertama-tama, saya apresiasi yang sangat luar biasa untuk Pak Menteri beserta seluruh jajaran berkaitan serapan 2022 maupun rencana di Anggaran 2023. Sedikit saya mau tanggap juga Pak Menteri karena ini rapat ini didengar

orang banyak tentang apa yang disampaikan Pak Syarif, menurut saya Pak Syarif terlalu *baper* saja Pak Syarif itu, Pak.

Jadi, kalau harus kaitkan saya setuju *nggak* setuju kan kapasitasnya *nggak* ada itu Pak. Jadi, buat saya apapun yang bisa dibangun di Kalimantan Barat tentu merupakan kebanggaan buat saya sebagai orang daerah dan sebagai orang yang ada di Dapil sana. Tapi, kalau dikatakan bahwa setuju atau tidak setuju saya pikir itu tidak masuk di dalam ranahnya, kita anggap saja itu hanya candaan Pak Syarif saja, itu yang pertama.

Yang kedua Pak, yang ingin saya sampaikan berkaitan tentang konektivitas, Pak. Kemarin dari 2022 kita juga sudah usulkan, cuma mengingatkan saja barangkali saya *khilaf* atau barangkali saya yang salah. Berkaitan dengan halte sungai Pak, halte sungai yang pernah saya usulkan di Kecamatan Kedawangan Kabupaten Ketapang, kemudian di Kubu Raya, Kabupaten Kubu Raya, kemudian di Sambas. Karena ini sangat penting, Pak, kalau di daerah kami, rata-rata di daerah kami itu transportasi itu adalah sungai. Kalau darat bisa, tapi itu pada waktu-waktu tertentu. Kalau musim hujan kami tidak bisa menggunakan jalur darat, karena jalannya sangat luar biasa tidak bisa dilalui bahkan kalau sudah ambles bisa mencapai ke tempat tujuan itu sampai dua hari atau tiga hari kadang *nggak* bisa lewat. Jadi, harapan saya di 2023 tolong halte sungai yang sudah diajukan diusulkan agar diakomodir.

Kemudian Pak, yang ingin saya sampaikan juga berkaitan dengan masalah terminal, terminal bandara yang ada di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Pak. Itu menurut saya memang sudah sangat layak untuk direnovasi, dibangun kembali agar pemanfaatannya bisa optimal. Karena apa, karena menurut saya bandara itu kan satu-satunya yang ada di Kabupaten Ketapang termasuk yang sekarang ini termasuk Kayong Utara juga menggunakan bandara itu. Jadi, menurut saya sudah sangat bagus kalau seandainya terminalnya dibangun.

Yang terakhir, Pak, Pak Menteri, kemarin saya sudah sampaikan juga waktu kita RDP berkaitan dengan masalah pelabuhan ASDP Bangka Belitung yang menurut saya sudah tidak, sangat tidak layak untuk dimanfaatkan. Pertama, peletakan di tengah-tengah alur yang salah, kedua bangunannya juga sudah rapuh Pak, sudah rapuh sudah goyang, jadi menurut saya itu sudah tidak bisa digunakan. Sementara untuk di Kabupaten Ketapang untuk hubungan ke pulau Jawa, Pak, khususnya Semarang, satu-satunya itu di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.

Jadi, kalau kapal sekarang Pak, kapal angkutan penumpang feri lah, itu masih dikelola oleh swasta Pak, artinya swasta bukan Pemerintah. Dan, Kabupaten Ketapang belum ada pelabuhan ASDP Pak, belum ada pelabuhan ASDP. Jadi, saya minta agar pendapatan Bapak di tahun-tahun berikutnya tambah besar, saya pikir di Ketapang itu sangat potensial untuk dibangun pelabuhan ASDP-nya, kemudian dimasukkan kapal ferinya. Untuk sekarang saja Pak, itu lima kali seminggu, Pak, Semarang-Ketapang lima kali seminggu. Itu mengangkut orang kemudian mengangkut sembako untuk keperluan di

seluruh Kabupaten Ketapang termasuk di Kabupaten-Kabupaten lain yang bisa dilalui ke, seperti Sanggau Tayan dan sebagainya.

Jadi, harapan saya semoga di 2023 ini karena pelabuhan ASDP Bangka Belitung tidak bisa difungsikan, ya haruslah ada pelabuhan lain di Kabupaten Ketapang, agar lima kali sehari ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian bisa dijamin keamanan dan keselamatan penumpang karena dikelola oleh Pemerintah. Saya pikir itu Ketua, terima kasih Pak Menteri.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih. Pak Willem, Pak Willem, siap-siap Pak Irwan.

F – P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos.):

Baik Pak Ketua, dari kami pertama tentu kami memberikan apresiasi kepada Pak Menteri serta seluruh jajarannya atas kinerja serapan anggaran yang mencapai 98% atau 32,47% dari total Pagu Rp33,41 Triliun, artinya telah melampaui target. Dan, kemudian kami juga mengharapkan supaya serapan PHLN dalam APBN diharapkan supaya dapat dipertahankan bila perlu dapat ditingkatkan. Karena ini terkait dengan kredibilitas negara di mata lembaga dan juga negara donor sebagai mitra.

Dan, juga terkait dengan tingkat kemahalan tiket hingga hari ini untuk tanah Papua dan juga terutama di bandara-bandara perintis di tanah Papua. Dan, juga terkait dengan navigasi Jayapura di mana belum lama ini Kepala Kantor Navigasi Jayapura paksakan kapal harus berangkat tanpa mempertimbangkan keselamatan dan fasilitas di mana kondisi kapal saat itu *trouble* pada dinamo lalu dipaksakan harus dililit dan kapal hari ini lagi bermasalah lagi *problem* ada di pelabuhan Nabire, kiranya menjadi perhatian. Dan, juga terkait dengan subsidi BBM perlu diperhatikan baik supaya menjadi harapan dan seruan Bapak Jokowi Presiden RI ke 7, itu benar-benar dipertahankan terkait dengan menekan tingkat kemahalan harga barang di Papua terutama di daerah Papua Pegunungan.

Dan, yang berikut terkait dengan RAPBN. Pak Menteri kiranya menjadi perhatian untuk kami di Papua yaitu terutama terkait dengan bandara-bandara perintis di Papua hingga hari ini masih banyak yang perlu diperhatikan, dan juga Pak, lampu penerangan jalan atau bandara. Dan, juga Pak Menteri, di Papua Barat untuk Kabupaten Maybrat hari ini sedang mempersiapkan bandara penyangga untuk Kabupaten Sorong kiranya bisa dapat diperhatikan bila ada usulan dari daerah. Dan, juga terkait dengan distribusi bis hari ini masih terkendala, ada sejumlah daerah seperti katakanlah Kabupaten Paniai belum sampai kiranya diperhatikan karena ini sudah disuarakan oleh DPR Provinsi Papua.

Untuk sementara itu yang bisa dapat kami sampaikan, Pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, makasih. Mudah-mudahan cepat selesai. Pak Irwan, siap-siap Pak Fadholi.

F – P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Baik, terima kasih.

Pimpinan yang saya hormati, Ketua Komisi V, Wakil Ketua Komisi V, serta rekan-rekan Anggota Komisi V DPR RI, Yang saya hormati Bapak Menteri Perhubungan, Pak Sekjen, Pak Irjen, Pak Dirjen, Pak Direktur, serta seluruh jajaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang hadir pada rapat yang luar biasa hari ini,

Sebelumnya izin, Pimpinan, karena ini memang rapatnya adalah fungsi pengawasan saya *agak* minta waktu lebih karena saya merasa memang inilah forum yang paling mulia untuk kita berjuang yang sekeras-kerasnya dan se hormat-hormatnya untuk rakyat Indonesia dan khususnya di Dapil kita, dalam hal ini Dapil saya, Kalimantan Timur.

Pertama-tama, tadi ramai kawan-kawan bicara mengenai pembangunan bandara, rata-rata melihat ada beberapa pembangunan bandara yang tidak tepat sasaran. Tetapi, saya baru saja pulang dari Pacitan, Pak Menteri, Pacitan Kabupaten Pacitan Jawa Timur. Saya turun dari, berangkatnya turun dari Solo, 3 jam ke Pacitan pulangnya ke Jogja International Airport, 4 jam.

Nah, saya melihat Pacitan ini kan di wilayah barat Jawa Timur ini potensi pariwisatanya sangat bagus, dikenal 1001 Goa, dari Kars, keindahan Kars di pesisir yang ada di sana. Kemudian, hasil lautnya juga melimpah tetapi tidak punya bandara. Padahal kalau bandara perintis saja ini mampu kemudian mengakselerasi saya yakin. Saya juga berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupatennya ternyata potensi pariwisatanya luar biasa, kunjungan wisata tiap tahun luar biasa, hasil lobster di sana luar biasa. Tetapi, harganya masih 200 karena tidak ada alat transportasi yang memang singkat ya, yang bisa kemudian memasarkan lobster yang luar biasa ini. Menurut saya inilah kemudian beberapa sebenarnya prioritas-prioritas disamping kemudian membuka wilayah jalur udara, juga kemudian bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di beberapa Kabupaten yang ada di Indonesia yang memang belum terdapat pembangunan bandar udara.

Jadi, saya mohon ini bisa dimasukkan dalam agenda perencanaan Kementerian Perhubungan mengingat Pacitan juga sejak jaman Jepang sudah ada sebenarnya bandarannya, saya pikir tinggal dilanjutkan minimal bandara perintis itu akan membuka beberapa akses seperti Tulungagung, Trenggalek juga Ponorogo dan juga di beberapa wilayah di Jawa Tengah.

Kemudian, Pimpinan terkait di Kalimantan Timur, kami harus menyampaikan di sini bahwa kami menyampaikan terima kasih banyak Pak Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen. 2022 untuk perhubungan udara ada

pengembangan bandara APT Pranoto, kemudian bandara perintis yang menghubungkan Kabupaten antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur. Dan, juga untuk perhubungan darat kawan-kawan balai pengelola transportasi darat di Kaltim juga kita tahun 2022 melaksanakan faskes, ya keselamatan dan perlengkapan jalan. Kemudian ada pembangunan halte sungai, dermaga feri penyebrangan dan juga bus sekolah.

Pimpinan harus ini kami sampaikan karena bagaimanapun ini adalah perjuangan kita di sini dan dieksekusi dengan baik oleh Kementerian Perhubungan, progress fisiknya 98% menaikkan PNBP, walaupun tentu ada beberapa yang harus dioptimalisasi terkait PNBP terutama di sektor perhubungan laut Pak Menteri. Masih banyak tersus yang belum apa namanya, ada pengelolaan pelabuhan itu tentu ada kebocoran PNBP masih di situ.

Kemudian untuk di Hubla di tahun 2022 ada pengembangan dan rehab pelabuhan di Paser dan Sangkulirang ini juga mengakselerasi pembangunan di Kaltim, kami terima kasih banyak. Kami sengaja sampaikan di sini karena jangan sampai ini berlalu seolah-olah tidak ada pembangunan. Saya lihat di sini Kaltim 730 Miliar, kami masuk di sini Pimpinan 2019 masih 350 Miliar, investasi APBN Kemenhub di Kaltim, sekarang sudah Rp750 Miliar. Ya, masyarakat harus tahu bahwa di sini adalah tempat memang berjuang sekeras-kerasnya dan se hormat-hormatnya untuk mereka. Dan, kami berterima kasih kepada Kementerian Perhubungan.

Kemudian untuk 2023, karena ini pengawasan kami ingatkan kembali yang sudah kita setuju kemarin pada saat pembahasan APBN 2023. Bahwa untuk perhubungan udara akan ada pengembangan APT Pranoto termasuk membangun *landscape* depannya, karena masih ada *backing plan* depan bandara APT Pranoto itu. Ya, sementara tiap hari Pak Jokowi bicaranya IKN-IKN, tentu kita harus segera tuntaskan semua permasalahan bandara yang ada di Kalimantan Timur selain Sepinggang, APT Pranoto juga di Kalimaro di Kabupaten Berau.

Kemudian, ada terima kasih Pak Menteri ada sudah diterbitkan penetapan lokasi bandara baru di Mahakam Hulu. Mahakam Hulu ini adalah perbatasan Indonesia dengan Malaysia, dan ini tentu bisa kemudian membuka keterpencilan ya beberapa Kabupaten yang ada di Kaltim.

Kemudian untuk perhubungan darat tahun depan ada, *eh* tahun ini ada faskes, kemudian ada lanjutan dermaga feri penyebrangan Sangkulirang, kemudian ada halte sungai juga. Sedangkan untuk perhubungan laut kami ingatkan kembali ada rencana rehab faspel, fasilitas pelabuhan di Paser kemudian di Sangkulirang juga di pengembangan pelabuhan di Tanjung Redep, juga ada rehab dermaga di PPU terkait persiapan IKN, dan pembangunan terminal penanggulangan pencemaran di pelabuhan Balikpapan. Serta ini yang paling penting karena menyangkut korban yang sudah berjatuh yaitu pembangunan lampu suar dan navigasi di Muara Manggar.

Nah, inilah yang bisa kami sampaikan Pimpinan dan ini sangat penting, karena ini memang sesuai agenda pengawasan. Dan, kami harap apa yang kita sudah setuju dan ini sudah diketahui masyarakat bisa kita kawal bersama sehingga bisa terwujud di tahun 2023 ini.

Terakhir mungkin terkait kereta cepat Jakarta-Bandung, karena terdapat *cost overrun* akibat keterlambatan proses pembebasan lahan sehingga berpengaruh terhadap intervensi penanaman modal nasional kemudian penyesuaian konsesi sampai 80 tahun. Tentu, Pak Menteri bisa kasih tanggapan terkait ini.

Terima kasih banyak, Pimpinan, kurang lebihnya kami mohon maaf.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ya makasih Pak Irwan. Pak Fadholi, ya dipersingkat kalau bisa Pak, silakan.

F – P. NASDEM (Drs. FADHOLI, M. Ikom.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Bapak-Ibu Pimpinan dan Bapak Menteri yang saya hormati,

Saya di Dapil saya Pak, yang kaitannya dengan kereta wisata yang dari Ambarawa itu sudah dibangun sudah lama Pak, dan relnya itu kan sudah dibangun waktu itu gegap gempita sekali Pak, tetapi saat sekarang ini udah timbun sudah runtkut lagi Pak. *Nah*, ini kira-kira untuk realisasi kereta wisata Ambarawa ke Beringin kemudian sampai Kedungjati dan itu sudah dibangun sudah lama waktu itu, ini ke depannya bagaimana Pak, itu bisa harapan saya itu bisa terwujud. Ya, mudah-mudahan bisa ada perhatian karena itu akan mendukung wilayah tersebut.

Dan, yang kedua, terima kasih kepada Pak Menteri telah mewujudkan bangunan terminal Adi Salatiga dan masyarakat sangat senang sekali dengan adanya terminal itu. Hanya menunggu kapan itu segera secara resmi diresmikan agar fungsinya bisa lebih optimal Pak, karena sudah difungsikan sekarang cuma kan belum bisa dibuka secara keseluruhan. Karena itu sudah selesai biar segera mendukung kegiatan-kegiatan itu mohon itu bisa segera direalisasikan.

Dan yang ketiga Pak, kaitannya dengan penerbangan yang tadi sudah banyak disoroti di dalam negeri tetapi saya akan sampaikan penerbangan yang untuk keluar negeri, Pak. Penerbangan perintis dan menurut informasinya kan untuk beberapa negara yang terdekat ini bisa *direct* antara Indonesia ke negara tersebut Pak. *Nah*, salah satunya adalah ke PNG, *nah* ini apa katanya sudah

sampai juga informasinya di kedutaan PNG untuk bisa melakukan penerbangan perintis karena ini sangat dibutuhkan sekali, Papua Nugini Pak.

Nah, itu bahwa masyarakat Indonesia yang ada di Papua Nugini ini kan sekarang cukup besar sekali Pak, dan terutama dari wilayah Jawa Timur. Sementara ini kan penerbangannya muter-muter Pak, kan *gitu* dulu pernah ada penerbangan dari PNG ke Bali, tetapi sekarang kan sudah tidak ada lagi. *Nah*, kalau memungkinkan itu bisa dilakukan penerbangan *direct* untuk bisa memberikan *cost economy* yang lebih murah bagi masyarakat yang ada di PNG khususnya adalah warga Indonesia yang mau pulang. Selama ini dari PNG kalau mau pulang ini sering *mencharter* pesawat Pak, jadi charter pesawat dari PNG ke Indonesia. Mungkin ini bagian yang cukup penting menurut saya karena ini *exercise* ini negara untuk bisa itu dan sekaligus juga bisa menjadikan negara kita ini menjadi negara tujuan dan sekaligus kalau bisa sudah negara transit Pak. Jadi, kalau kita balik bagaimana kalau orang mau ke PNG itu transitnya di Indonesia bukan dari Indonesia transitnya di Philippine di Singapore atau di mana ini kan sayang sebetulnya itu.

Mungkin itu Pak Ketua dan ini menjadi hal yang sangat penting. Dan, ini nanti menjadi salah satu prestasi kepemimpinan Presiden kita Pak Jokowi, karena Pak Jokowi juga sudah memberikan sinyal untuk itu. Saya pikir ini sangat bagus agar ini juga bisa ada realisasi, terima kasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih. Pak Sumail singkat Pak, ya, kasihan teman-teman belum makan *nih*, Pak, silakan.

F – P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Baik, terima kasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera,

Pimpinan dan Anggota yang saya hormati, utamanya Pak Tamanuri juga pesan ke saya untuk singkat dan padat katanya, Pak Ketua, Pak Menteri beserta segenap jajaran yang juga saya hormati,

Pertama tentu saya apresiasi Pak, terhadap capaian kegiatan di sektor penerimaan bukan pajak, dari target 8 menjadi Rp9 Triliun ini luar biasa. Akan tetapi butuh *effort* lebih lagi Pak, utamanya di sektor transportasi darat, kereta api ya. Yang tahun-tahun terakhir, bulan-bulan terakhir dan hari-hari terakhir itu sebenarnya cukup penuh dan banyak. Apabila dikerjakan dan diawasi dengan baik tentu negara akan mendapatkan benefit ataupun tambahan pendapatan dari sektor Kementerian Perhubungan, itu yang pertama.

Yang kedua kaitannya dengan capaian program prioritas Kementerian Perhubungan, utamanya di pelabuhan penyeberangan dari 36 itu tercapai hanya 11 ini tentu jauh dari apa yang diharapkan. Tentu tahun mendatang ini harus lebih dikejar lagi Pak Menteri beserta segenap jajaran karena pelabuhan penyeberangan begitu penting sebagaimana tergambar kemarin atau di tahun ini di Dapil saya pelabuhan Ketapang-Gilimanuk yang menuju Bali masih terjadi penumpukan di sana-sini. Dan, berulang-ulang berkali-kali bahkan saya sampaikan di forum rapat yang terhormat ini, bahwa ada etalase ada tampilan kurang menarik kaitannya dengan *outlet-outlet* pembayaran tiket *online* itu, Pak.

Kiranya bisa berkoordinasi dengan operator ataupun bisa memberitakan langsung agar apa *servernya* dibesarin ataupun ada aplikasi-aplikasi lain yang bisa mengakses untuk penjualan tiket sehingga tidak terjadi penumpukan di sana-sini, itu masih terlihat sekali penumpukan di kala apa libur-libur nasional maupun libur-libur panjang.

Yang ketiga Pak Menteri, negara sudah banyak membangun kawasan wisata strategis nasional, kawasan strategis pariwisata nasional dan begitu mahal dan megah. Namun Kementerian Perhubungan tidak mampu mengkoordinasikan atau mengorganisir fasilitas-fasilitas angkutan untuk menuju ke sana. Benar apa yang disampaikan oleh kawan-kawan terdahulu begitu mahalnya kita untuk menjangkau ke sana sehingga terkesannya mubazir. Dan, Pemerintah tidak punya daya, terkesan lemah menghadapi pasar, semuanya langsung diserahkan kepada pasar sehingga yang terjadi adalah tiket mahal menuju ke sana. *Nah*, tentu ini harus ada regulasi ataupun *political will* yang sangat kuat dari Pemerintah agar bangunan-bangunan yang sudah dibangun oleh Pemerintah bisa kemudian dinikmati oleh masyarakat.

Yang keempat, teman-teman tadi banyak berbicara juga tentang bandar udara. Malang merupakan bandar udara yang okupansinya sebenarnya cukup baik selain kota pendidikan, kota pariwisata, kota holtikultura. Sudah layak dan pantas kiranya untuk ditingkatkan menjadi bandara internasional, tentu perlu dukungan dari sisi fasilitas dan kualitas, Pak. Banyuwangi yang lebih dulu dijadikan bandar udara internasional, wisatawan luar negeri yang datang ke sana itu jauh lebih kecil daripada Malang, tercatat pada tahun 2020 kalau tidak salah itu hampir 1,1 Juta.

Nah, tentu hal-hal yang seperti ini menjadi prioritas, Pak, sehingga Jawa Timur yang terus menggelorakan percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten yang kira-kira punya potensi untuk memberikan sumbangsih ya terhadap kesejahteraan di masyarakat Jawa Timur itu bisa langsung terkoneksi dengan kita dari rencana-rencana pembangunannya.

Yang terakhir, masih ada waktu ya Pak Ketua ya? Pak Ketua, agak....

KETUA RAPAT:

Lebih cepat lebih baik.

F – P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Siap.

KETUA RAPAT:

Lebih cepat lebih baik.

F – P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Satu lagi Pak Ketua, karena ini untuk kebaikan bersama. Saya lihat apa yang digambarkan bagi kami ini Pak Menteri yang digambarkan anggaran tahun 2022 itu masih sangat abstrak bagi kami, karena tidak menunjukkan bahwa daerah-daerah mana yang, 2022, Pak, kita evaluasi dulu terhadap 2021 2022 Pak, jadi saya melihat alokasi kegiatan-kegiatan itu tidak tergambar dengan jelas sehingga menyulitkan kami dalam rangka melakukan fungsi pengawasan. Tentu diharapkan di 2023 itu lebih detail lagi sehingga kami bisa melaksanakan tugas-tugas konstitusi dengan baik.

Saya kira itu, Pak Pimpinan, Pak Menteri terima kasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Makasih Pak Sumail, Pak Iqbal silakan, eh *sorry* ada satu yang belum Pak. Pak Sigit, *sorry-sorry* senior, senior yang nutuplah.

F – PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Sekarang, ya? Pak Ketua, terima kasih.

**Pak Ketua Komisi V dan segenap Anggota Komisi V yang kami banggakan,
Dan Pak Menteri dan jajarannya yang kami banggakan,**

Saya berangkat dari halaman 15 saja langsung Pak Menteri, dari RPJMN 2020 sampai 2024 masih ada 4 yang merah dan 1 yang kuning. Dan, *ndilalah* 4 yang merah itu ada di semua direktorat ya, Pak.

Yang pertama, penyeberangan baru ini kan perhubungan darat, penyeberangan barunya masih 30% ya, masih banyak dari yang direncanakan 36 baru 11 yang terealisasi. Saya kira ini catatan penting karena pasti ini daerah-daerah kepulauan, ya. Dan, daerah kepulauan ini satu-satunya alat transportasi ya pelabuhan ini, ini pelabuhan feri kalau *nggak* salah pelabuhan penyeberangan ini.

Jadi, tentu *gimana* caranya harus dikejar, saya mendukung program-program yang terkait dengan pemenuhan apa namanya target untuk pelabuhan teluk, pelabuhan penyeberangan. Bahkan ada di antara pelabuhan

penyebrangan itu yang dia masuk dalam KEK, jadi kondisi ininya, apa namanya, pariwisata sangat bagus, tetapi *nggak* selesai pelabuhan penyeberangannya. Masih menunggu *readiness criteria*, lahan dan jalan akses.

Saya kira, mungkin Pak Menteri harapan saya bisa dipercepat ini kalau *readiness criteria* ini kan kriteria, ya bisa dipercepatlah. Karena Pemda itu sudah menyiapkan lahan, kemudian transportasi juga begitu. Pasti dia...dia sudah tercapai ini barang itu pasti sudah bisa digunakan, kalau *nggak* bisa digunakan kan sayang itu. Oleh karena itu, mohon ini dipercepat agar tidak terlalu merah seperti ini, dari 36 target ada 11. Dan, saya kira kami mendukung setiap penyelesaian secepatnya oleh jajaran Pak Menteri.

Yang kedua, jalur kereta api, akumulatif ini, masih 11% jauh juga ya, Pak Menteri ya, kurangnya 11% apa masih dikerjakan 11%, *wong* targetnya 7.000, yang sudah dikerjakan 6.000, ya kan mungkin kurangnya ini iya, bukan yang baru dikerjakan 11% ini mungkin kurangnya Pak Menteri, ini *anu* ini apa salah ini. Jadi, kurangnya mungkin 11% ya, ini yang *tau* Pak Menteri ini.

Saya hanya mengingatkan *doubletrack* ke Jawa Utara dan Jawa Selatan, Jawa Utara sudah selesai, *doubletrack* Jawa Selatan sekarang sudah sampai Sepanjang, ya. *Nah*, tetapi PNBK kalau kita sambungkan dengan PNBK kereta api itu yang masih yang paling, masih di antaranya yang rendah. Kemarin saya datang ke pelabuhan Pelindo, di Perak dan Gresik kearah Gresik. Di sana bermunculan apa namanya, bermunculan pelabuhan-pelabuhan baru Pak Menteri, bahkan ada proyek nasional besar JIPE kalau *nggak* salah itu, itu pelabuhan, ada pelabuhan curah, ada pelabuhan petikemas dan seterusnya. Saya melihat tidak ada *connectivity* dengan kereta api Pak Menteri, sayang sekali. Jadi *doubletrack* utara, Jawa Utara itu kan lewat Gresik sampai Surabaya, itu tidak ada perencanaan yang menyambungkan antara kereta api ini dengan pelabuhan-pelabuhan yang sangat canggih tersebut termasuk Teluk Lamung yang sudah beroperasi, yang dioperasikan oleh Pelindo.

Saya memberi catatan khusus bab ini, karena tadi banyak teman mempermasalahkan terkait dengan ODOL, ODOL ini akan jadi bom waktu yang berbahaya untuk masa depan. Sekarang kalau kita lewat tol Surabaya-Jakarta sudah akan banyak sekali ODOL-nya, truk-truk besar, ya, kontainer-kontainer, kalau kontainer standar ya, tetapi ada truk-truk ada yang tidak standar panjangnya.

Maksud saya begini, cobalah dibuat sebuah Renstra kereta api, agar kereta api ini bisa menjadi sarana alternatif agar angkutan logistik itu tidak bertebaran di jalan raya yang membahayakan seperti itu Pak Menteri, saya kira pembicaraan ini sudah bertahun-tahun yang lalu pernah kita buat. Jadi, adakan sebuah Renstra kereta api yang nyambung dengan pelabuhan, dan ini akan menambah penghasilan kereta api PNBK, kenapa? Karena sekarang ini kereta apinya kan baru kereta penumpang yang banyak, maksimal kereta penumpang. Saya setuju misalnya *okelah* kereta cepat ke Jakarta-Bandung bahkan nanti diperpanjang sampai Surabaya, oke. *Nah*, jalur lama itu dipakai

untuk memaksimalkan angkutan barang, ini kan membuat jalan-jalan itu akan berkurang sekian persen angkutan darat logistik yang membahayakan.

Beberapa waktu yang lalu masuk laporan bahwa banyak kecelakaan di Cipali ya, Cipali itu termasuk ruas jalan tol yang paling banyak menyebabkan kecelakaan. Jangan disalahkan supirnya selalu, Pak, tolong Pak Dirjen Perhubungan Darat dicatat, Pak siapa nanti, Kakorlantas kalau kita diskusi selalu yang disalahkan *human error*, supir mana supir ngantuk dan seterusnya, bukan Pak. Coba *panjenengan* sekali-sekali makai mobil malam jalan banyak sekali truk-truk ODOL itu yang lampunya itu tidak *nyala*, ya bahasa orang Jawanya *mendrip-mendrip*, apa itu bahasa Indonesianya *mendrip-mendrip*. Pak Dirjen Perhubungan Darat, tolong yang begini ini disertifikasi atau di apa kan ada setiap 6 bulan sekali itu ada ininya kan apa KIR-nya, mohon diperiksa itu, itu yang menyebabkan kecelakaan, Pak, *mendrip-mendrip* itu lampunya dari jauh *nggak* kelihatan bahaya sekali, apalagi kalau sudah hujan bahaya sekali. Itu yang terkait poin dua kereta api, saya berharap besar ada PNBPN lebih dari kereta api, dari penggunaan kereta-kereta api yang *nyambung* ke arah pelabuhan iya.

Terus yang ketiga pelabuhan utama yang belum memenuhi standar. Saya memberi apresiasi pada KS apa, KSOP-KSOP yang berhasil menaikan PNBPN yang cukup tinggi. Tetapi, *kok* aneh pelabuhan utamanya dari yang 7 baru 4 yang memenuhi standar. Artinya kan PNBPN itu bisa dipakai ulang untuk kegiatan tambahan belanja untuk KSOP, Pak, KSOP-KSOP itu ya kan. Kabarnya KSOP-nya ini apa namanya, aktif mencari PNBPN itu bagus. Cuma *kok* kemudian jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar dari 4 lokasi eh dari 7 yang direncanakan baru 4 yang, ini kan anomali namanya. Sementara kalau tadi itu kereta api PNBPN-nya rendah tapi proyeknya banyak sekali dan belum optimal masuk. Saya kira mohon ini dimasukkan ke dalam perencanaannya Pak Menteri, Renstra Pak Menteri. Saya mau bantu kalau Pak Menteri mempersilakan saya bantu saya bantu buat Renstra kereta api, ya masuk ke pelabuhan itu.

Terus bandar udara, *nah*, ini yang keempat ini. Jumlah bandar udara baru yang dibangun tadi sudah banyak ya yang disampaikan. Dari target 21 hanya 10 yang tercapai, masih belum selesai maksudnya, ya, masih banyak yang kurang sementara bandara-bandara baru tersebut banyak yang belum diterbangi oleh pesawat. *Nah*, saya menghimbau kepada Anggota Komisi V kalau punya, apa, perusahaan angkutan udara segera terbangilah bandara-bandara perintis ini agar bandara perintis selain dia dibuat dengan jumlah yang banyak, tetapi juga ada yang menerbanginya. Saya khawatir dengan kondisi yang ada sekarang kita membangun bandara tetapi yang menerbanginya tidak ada.

Saya kira catatan saya itu saja, wabil khusus, ada satu Pak Menteri yang ingin saya sampaikan, begini. Kementerian ini kan berusaha untuk menghubungkan sesuatu yang tidak terhubung. Kalau ada masyarakat di tengah pulau tidak ada jalur perhubungannya kan pasti kita bantu, ya begitu ya Pak Menteri ya, kalau ada masyarakat di tengah hutan tidak tersambungkan *nggak* ada *connectivity*-nya pasti kita akan bantu *connectivity*.

Pak Menteri, ada sebuah perumahan milik Kementerian Perhubungan di Jakarta, ada orang mau membangun menggunakan akses jalan di dalam perumahan kementerian itu dihalang-halangi tidak boleh bahkan ditembok. Rasanya saya sebagai Anggota Komisi V tidak bisa diam, Pak Menteri, saya harus bercerita kepada Pak Menteri. Ini perumahan Kementerian Perhubungan ya, wabil khusus Kementerian Perhubungan Udara, wabil khusus letaknya di Warung Jati. Saya sudah laporkan kepada Pak Sekjen, mohon bantuannya, Pak Sekjen.

Pak Menteri, saya pernah jadi *developer*, saya punya lahan untuk *developer*. Lahan saya itu fasumnya harus diserahkan ke negara setelah rumahnya terbangun, harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah, jalannya harus saya serahkan kepada Pemerintah Daerah. *Nah*, perumahan yang saya maksud tadi dibangun tahun '75 dan sampai sekarang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Sehingga ketika ada orang yang dulu beli tanah di situ harus lewat perumahan tersebut kemudian ditutup, maka dia tidak bisa punya akses lagi, ada akses mungkin jalan kecil. Saya sebagai Anggota Komisi V kepada Pak Menteri minta keadilanlah, tolonglah Pak Menteri dan saya sudah sampaikan kepada Pak Dirjen dan mungkin Pak Plt. Dirjen Udara waktu itu ya, cuma sampai sekarang masih belum bisa apa namanya terpecahkan kelapangan dada dari para penghuni perumahan Kementerian Perhubungan, apalagi mereka mantan-mantan ASN dari Kementerian Perhubungan Pak Menteri. Lapang dadalah, biarlah itu masyarakat bisa memanfaatkan, *toh* kewajiban *developer* ya kewajiban dari Kementerian Perhubungan untuk menyerahkan jalan itu kepada Pemerintah Daerah, fasumnya maupun jalannya agar bisa diperbaiki oleh Pemerintah Daerah.

Saya kira ini pada kesempatan kali ini saya sampaikan mumpung saya ketemu dengan Pak Menteri ada Pak Sekjen juga, mudah-mudahan bisa dibantu. Walaupun ini persoalan perseorangan tetapi akan jadi preseden yang tidak baik di perumahan-perumahan milik Kementerian yang ada.

Terima kasih, Pak Ketua

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Makasih Pak Sigit. Bu Sarce singkat, silakan, Bu.

F – PDIP (SRI RAHAYU):

Interupsi Pimpinan

F – PDIP (SARCE BANDASO TANDIASIK, S.H.):

Terima kasih, saya langsung saja karena mengingat waktu. Iya, saya pertanyakan....

KETUA RAPAT:

Sebentar, sebentar biar Bu Sarce sebentar, Bu, sebentar saja.

F – PDIP (SRI RAHAYU):

Nggak saya *gini* Pak, izin betul, ini kan kita manusiawilah ini, eksekutif ini juga Pak Menteri dan kawan-kawan ini juga laparlah, kalau kita bisa keluar masuk tapi kan beliau-beliau ini *nggak* bisa, Pak. Iya *break* dululah, Pak, saya mencoba untuk tidak makan ini laparnya bukan main.

KETUA RAPAT:

Jadi, *gini* Bu tadi saya sudah saya tawarin, saya sudah tawarin *break* nya. *Nah*, oke tadi saya sudah tawarin *break*-nya Pak Menteri minta lanjut. Harusnya tadi sudah *break*, bahkan saya tanya sudah solat semua belum. *Nah*, jadi tinggal satu Bu Sarce. Habis itu kita langsung Pak Menteri, silakan langsung, Bu Sarce.

F – PDIP (SARCE BANDASO TANDIASIK, S.H.):

Terima kasih. Pak Menteri saya cuman mau sampaikan di sini beberapa kali saya sampaikan yaitu beberapa bandara yang ada di Dapil saya Sulawesi Selatan III. Ya, mungkin saya cuma minta kepada Pak Menteri dan Dirjen beserta jajaran, tolong diperhatikan dan diberi bantuan anggaran ada beberapa bandara yang ada di Sulawesi Selatan III saya tidak sebutkan satu per satu, ini sudah masuk ranah Dapil saya, Pak.

Yang kedua masalah bandara yang ada di Sorowako Luwu Timur, bagaimana perkembangan dan tindak lanjut sampai sekarang, karena bandara di Luwu Timur di Vale itu sudah diserahkan ke Pemerintah. Kapan masyarakat di luar karyawan Vale bisa menikmati pesawat yang ada di Luwu Timur, karena sekarang masih khusus untuk karyawan Vale. Itu saja Pak Menteri, yang ingin saya sampaikan, terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Oke terima kasih, singkat Pak, *anu*, Pak Iqbal silakan.

F – PPP (H. MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.Com.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Iya, terima kasih, Ketua.

Yang saya hormati Pak Menteri beserta seluruh jajarannya.

Ini karena sudah jam 2 kurang ini Pak Menteri jadi saya singkat-singkat saja, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mengenai

adanya *automatic adjustment* sebesar 1,38 Triliun, tentu saya kira ini berdampak kepada target dari Kementerian Perhubungan di tahun 2023. Saya hanya memberikan masukan saja Pak Menteri, semoga dengan adanya *automatic adjustment* ini jangan sampai mengurangi program-program yang prioritas yang itu bermanfaat untuk masyarakat yang telah kita bahas bersama-sama di Komisi V.

Yang kedua, sama seperti teman-teman Pak Menteri. Ini mengenai pembangunan sarana dan prasarana baik itu sarana pembangunan di darat kemudian laut dan udara. Dan, teman-teman tadi juga banyak menyampaikan tentang pembangunan bandar udara tadi, ada yang setuju dibangun ada yang tidak, tadi kan ada yang hampir seimbang saya mendengarkan Pak Menteri. Saya pada prinsipnya setuju saja, Pak, jika memang kebijakan Pemerintah untuk membangun bandara itu, yang pertama untuk memudahkan transportasi, kemudian untuk memajukan ekonomi.

Tetapi, tentu dengan fakta-fakta yang ada sekarang kan banyak Pak, bandara-bandara yang kita bisa katakan mati suri tadi, dan itu sebabnya kenapa, karena tidak ada *airline* yang ke sana Pak. Maju tidaknya suatu bandara kan tergantung *airline*-nya, seandainya sebagian besar Anggota Komisi V ini punya *airline*-nya, kita sama-sama ke sana. Tapi kan faktanya ada hanya sedikit *airline* yang mau ke sana, *nah* akibatnya apa, bandara tadi mati suri.

Nah, oleh karena itu saya berharap ke depannya harus ada kajian Pak, kajian yang mendalam tentang pembangunan bandara tadi. Tadi, Pak Bob tadi sudah menyampaikan di Sumatera Utara, kebetulan waktu reses saya memimpin ke sana banyak sekali bandara-bandara di Pantai Barat ya, itu yang berdekatan Pak, ada yang satu bandara ke bandara lain itu hanya 3 jam dengan jalan darat. Artinya dari sisi itu kan tidak efektif, ini saya harap tidak terjadi lagi di daerah-daerah lainnya. Tapi, di satu sisi di Sumatera Utara ada juga yang daerah juga itu kosong bandarannya. *Nah*, Pantai Timur itu kosong, jadi tidak seimbang dan ini akan berdampak kepada ya pembangunan di sana.

Kemudian yang ketiga Pak, yang terakhir, seperti dikatakan Pak Sudewo tadi mengenai tarif pembedaan tarif Pak, tarif KRL. Ini kan waktu Bapak mewacanakan itu banyak pro kontra di media massa saya baca, saya juga secara pribadi kalau memang tujuannya baik saya dukung Pak, tapi implementasinya kan sangat sulit. *Nah*, kalau itu diterapkan di Indonesia saya kira negara-negara lain belum ada Pak, yang menerapkan pembedaan tarif tadi, negara-negara lain. Memang namanya tarif untuk angkutan umum massal untuk masyarakat itu pastilah murah *nggak* ada yang mahal Pak, dan itu memang Pemerintah mensubsidi. Jadi, saya kira ini harap dikaji lagi Pak Menteri, semoga wacana ini tidak tidak salah sasaran.

Saya kira itu Pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih, Pak Roberth ada yang mau ditambahkan? Silakan Pak, singkat padat.

F – P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Makasih.

**Ketua dan seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati,
Saudara Menteri dan seluruh jajaran yang saya hormati,**

Yang pertama saya ingin ada beberapa hal saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang pengawasan, saya melihat bahwa dari Kementerian-Kementerian yang ada di tempat kita mitra kita ini bahwa Kementerian Perhubungan ini adalah salah satu Kementerian yang mempunyai peluang besar untuk menambah PNBPN kita milik negara, kita *tau* bahwa sekarang negara sangat membutuhkan penerimaan PNBPN untuk mengatasi defisit anggaran kita yang kita semua *tau*.

Untuk itu, saya kadang beberapa kali saya melihat ini peluang yang sangat besar untuk peningkatan PNBPN. Tapi, menurut saya dari Kementerian, Dirjen ini kurang proaktif sebenarnya ya. Kita lihat kemarin memang Pak Menteri membuat satu kebijakan untuk menutup, ya, pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki izin ya terutama pelabuhan-pelabuhan yang berhubungan dengan material untuk *smelter* dan lain-lain.

Saya sepakat bahwa itu harus memang harus taat aturan untuk itu. Tapi menurut saya peluang ini juga harus dilihat karena kebutuhan negara kita, maka yang paling penting bahwa kelengkapan izin dari material itu. Misalnya UP-nya, yang paling utama kan itu bahwa itu legal. Kalau pelabuhannya itu saya kira di mana saja harusnya bisa, ya kan, dan harusnya Kementerian menyiapkan karena mereka wajib untuk tidak memegang itu menjadi lahan mati, orang banyak nanti mengambil IUP terus tidur, satu orang bisa menguasai berapa IUP dia cuma kerja 1-2 yang lain dia tiduran, sedangkan kita ingin itu semua bisa untuk menambah keuangan negara kita, ya kan.

Jadi, saya kira dari kita yang harusnya proaktif untuk menyediakan itu fasilitas itu, ya kan. Kalau ada tempat yang ini ya wajibkan untuk itu digunakan, *gitu*, ya kan, kalau tidak bisa dikasih ini ya harusnya diberikan sanksi, kenapa ya kan, jangan itu dipegang monopoli sedangkan pintu keluaranya pisah dari situ tempat lain tidak ada. Jadi saya kira ini catatan yang perlu juga untuk peluang ini harus diambil, ya kan, jadi.

Yang berikut, saya melihat juga ada beberapa program-program di 2023 yang menurut saya tadi sudah disampaikan oleh teman ada yang namanya apa *adjustment* apa itu, buat, *automatic adjustment*, tapi kok kenapa yang dapat kena itu daerah kita *gitu* yang kecil-kecil yang dipotong *gitu*, yang besar-besar tidak *gitu*, ya kan. Jadi, yang Dapil kita dan ini daerah kelahiran saya Pak Menteri, yang saya sudah *ngomong* berkali-kali bandaranya itu saya sampai

takut datang lagi ke sana karena saya turun dengan pesawat itu kayak saya turun di atas batu-batu itu, sudah tidak layak lagi itu bandara itu landasannya, ya kan. Dari 9 eh dari 15 hilang tinggal 9 sekarang tinggal 5 lagi Pak Menteri, takut besok 5 hilang lagi habis, ya kan, saya *nggak* pulang-pulang nanti ke kampung saya. Jadi, ini mohon jadi perhatian Pak Menteri supaya yang begini begini ya tolong juga berikan kita punya hargalah di daerah kan terutama itu daerah kelahiran kita ya.

Yang berikut, saya kira kemarin Pak Menteri, kami pimpin kunjungan spesifik ke Maluku kunjungan kerja reses kemarin ke Maluku, teman-teman dari Kementerian Perhubungan ikut. Ada beberapa tempat yang menurut kami terminal transit, ya, terminal transit. Ini saya kira itu sangat dibutuhkan, mungkin ini menjadi perhatian untuk bisa nanti masuk di 2024 ya, supaya kita sangat prihatin saya, karena Maluku tidak ada Anggota Dewannya satupun di sini ya. Jadi, saya Maluku dan Papua itu tidak bisa dipisahkan Pak, karena kami ini bisa baca tulis itu guru-guru dari Maluku yang datang ke Papua dulu. Jadi, kami juga memberikan perhatian, saya sudah menyatakan saya akan membantu untuk memberikan aspirasi dari mereka di dalam Komisi V. Dan, mereka juga sangat membutuhkan transportasi antar pulau, karena Maluku terdiri dari, ya, kepulauan kalau tidak salah ada hampir 2.000 pulau kalau *nggak* salah ya.

Jadi, ini yang membuat saya juga tergugah untuk memperjuangkan apa yang disampaikan oleh para Bupati di daerah-daerah kepulauan yang sangat tergantung dengan angkutan antar pulau. Jadi, saya mohon juga Pak Menteri dan jajaran memberikan perhatian khusus kepada mereka agar betul-betul masyarakat di sana juga dapat menikmati angkutan laut untuk masyarakat-masyarakat yang di kepulauan.

Dan, saya kira itu yang dapat kami sampaikan Pak Menteri, harapan saya apa yang kita sudah lakukan selama ini, mitra dengan PUPR, Pak Sekjen sangat baik, saya kira ini bisa kita lanjutkan terus. Menurut saya sampai ke tingkat Dirjen dan di bawah ini program-program yang kemarin kita sudah sampaikan, saya kira Pak Sekjen sudah sampaikan itu, tapi masih ada putus di bawah nanti kita akan diskusi untuk kita bisa sampai ke Dapil itu betul-betul jalan sebagaimana yang kita sudah sampaikan.

Harapan saya ke depan, Pak Menteri, agar kita bicara 2024 itu kita tidak ujug-ujug di ujung Pak Menteri. Kita sudah harus bersama supaya hasil-hasil kunjungan, hasil aspirasi kita itu akan kita bicarakan di dalam perencanaan bersama. Jadi, harapan saya perencanaan nanti Kementerian Perhubungan tidak melakukan perencanaan sendiri, tapi bersama dengan Komisi III, itu amanat Undang-Undang yang harus kita sama-sama, eh Komisi V, *sorry*.

Iya jadi ini yang perlu menurut saya ke depan, tidak lagi dengan hanya kita nanti di ujung, baru kita sampaikan ini aspirasi kita. Dan, itu harus dari Kementerian juga memberikan peluang kita duduk bersama.

Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, terima kasih Pimpinan. Dan, saya sangat sepakat tadi dengan Ibu ini, bahwa saya juga melihat kasihan juga Pak Menteri dan jajaran ini duduk belum. Pimpinan saya kira ke depan kita

harus bikin protap bahwa jam 12 kita harus berhenti untuk semua, kita makan bersama.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, silakan. Silakan, Pak Iwan terakhir.

F – P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Makasih, Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,
Bapak Menteri Perhubungan, beserta para Eselon I dan jajaran yang saya hormati,**

Saya singkat Pak, pertama sebagaimana teman-teman yang lain kami juga mengapresiasi pencapaian serapan anggaran Bapak yang 98,02% yang menurut saya cukup luar biasa dan tentunya juga menyangkut masalah peningkatan pinjaman PNBK Bapak yang melebihi dari 100% target bahkan mencapai 107%.

Kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, *alhamdulillah* Bandara Arunpalaka di Kabupaten Bone saat ini sudah bisa beroperasi dan sudah ada penerbangan, ini bentuk kolaborasi yang baik antara Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi yang mana bisa memberikan subsidi kepada penerbangan untuk dapat mengaktifkan penerbangan tersebut dan membuat masyarakat kami di Kabupaten Bone dapat merasakan moda transportasi udara secara langsung.

Nah, hal ini juga kami dorong untuk dapat dilaksanakan di Kabupaten Selayar Pak, karena saat ini Kabupaten Selayar Bandara Udara Selayar itu sedang ditutup pengoperasiannya *nggak* ada penerbangan yang aktif ke sana dan kita harapkan ke depan bisa mengikuti apa yang terjadi di Kabupaten Bone. Dan, saya tentunya juga berterima kasih karena di tahun ini Kabupaten Bone juga mendapat pengalokasian anggaran untuk penyempurnaan bandara di sana dan tentunya kami berharap akan tetap terus mendapatkan prioritas untuk ke depannya.

Selanjutnya, untuk bandara perintis kepulauan, beberapa waktu sebelumnya juga sudah kami sampaikan di Kabupaten Pangkep ini terdapat pulau-pulau terluar Pak, yang berbatasan dengan Kalimantan Selatan dan NTB, jumlah penduduk di sana kurang lebih 40.000 orang, juga bisa dianggap kecil dan untuk mengaksesnya sangat jauh, untuk menggunakan moda transportasi laut itu bahkan 1x24 jam. Kami harapkan juga bisa mendapatkan prioritas untuk mendapatkan bandara perintis karena beberapa kejadian satu bulan ini sudah ada dua orang penduduk di sana yang kemudian meninggal di kapal, karena tidak mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal karena

jarak tempuh yang begitu jauh sehingga hal ini saya kira bisa dipertimbangkan. Selain daripada itu juga, dermaga penyebrangan yang ada di kepulauan-kepulauan tersebut memang masih sangat terbatas Pak Menteri, beberapa pulau-pulau yang terisi yang cukup padat juga belum memiliki dermaga sehingga alur pelayaran ke pulau-pulau tersebut belum optimal.

Selanjutnya, menyangkut masalah kenaikan harga kereta rel listrik yang *commuter line* untuk orang kaya, ini katanya subsidi untuk orang kaya rencananya akan ditarik. Sehingga, kemudian saya ingin mengetahui bahwa kriteria kaya dalam, masyarakat kaya yang seperti apa yang kemudian tidak mendapatkan subsidi itu lagi. Apakah kemudian rencana ini akan berefek kepada pengalihan penggunaan moda transportasi yang tadinya menggunakan kereta api akan menggunakan kendaraan pribadi yang tentunya juga berefek terhadap kemacetan dan sebagainya.

Untuk selanjutnya, untuk apa namanya, untuk terminal Kota Makassar saat ini Terminal Daya tipe A itu masih tidak jelas statusnya, Pak. Saya pikir dalam pembentukan terminal Daya yang berikutnya sebaiknya terminal Makassar dipindahkan biar konektivitas antara bandara dan kereta api yang sudah kita bangun saat ini betul-betul bisa terkoneksi dengan baik dan kemudian memudahkan masyarakat kita dalam menjangkau baik bandara maupun kereta api yang saat ini menjadi moda transportasi baru di sana. Mungkin itu saja Pak Ketua, yang terakhir maaf, Pak.

Untuk penanganan umroh, untuk penanganan jamaah umroh bandara udara Sultan Hassanudin yang sampai saat ini belum selesai yang seharusnya diselesaikan oleh BUMN Angkasa Pura. Mudah-mudahan *starting* Januari janji terakhir dari AP 1 itu akan memulai pekerjaannya pada tahun ini, mudah-mudahan dapat segera diselesaikan pada tahun ini Pak Menteri karena sudah sangat *crowded*, apalagi dengan adanya jamaah-jamaah umroh kita yang kita *tau* kalau jamaah umroh ini yang berangkat satu yang *nganter* satu bus, Pak. *Nah*, itu akibatnya jumlah orang yang ada di bandara terlalu banyak dan cenderung akhirnya tidak memberikan pelayanan yang baik terutama masalah kebersihan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami sarankan untuk bandara umroh ini bagaimana kalau dipindahkan kepada bandara lama yang sudah ada di sana. Karena kita ada bandara lama mungkin untuk pelayanan umrohnya di bandara lama, untuk pelayanan komersil normal untuk domestik kita tetap menggunakan bandara yang satunya eksisting.

Itu saja Pak Ketua, terima kasih saya kembalikan.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Menteri dijawab singkat saja, Pak, teman-teman sekalian sekarang sudah jam 2. Tadi, sebetulnya saya sudah mau *stop* jam 1 tadi tapi ya Pak Menteri tahan mau lanjut ya dan saya juga sebutkan tadi Pak, sekian orang belum bicara, tapi ya saya juga kadang-kadang *pengen motong* kan *nggak* enak juga *gitu loh*, ya jadi biar semuanya enak ya saya tawarkan.

Silakan, Pak Menteri langsung saja jawab singkat saja Pak, nanti jawab tertulis yang penting karena jawaban tertulis Pak Menteri nanti di-*deliver* ke masing-masing Eselon I, Pak, karena kami nanti rapat kerja dengan para Eselon I. Jadi singkat saja Pak Menteri, silakan.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (Ir. BUDI KARYA SUMADI):

Terima kasih, Pak Ketua. Pertama saya apresiasi berkaitan dengan berkaitan apresiasi dari Bapak-Ibu sekalian berkaitan dengan penyerapan dan juga saya mungkin akan menjelaskan hal yang sifatnya makro mengapa ini semuanya terjadi dan apa upaya yang kita lakukan.

Kalau kita bicara rencana jangka menengah dan kita relatif tidak tercapai, itu karena bisa diingat kalau empat tahun yang lalu anggaran kita itu Rp50 Triliun, tiga tahun terakhir ini anggaran kita cuma Rp30 Triliun. Jadi, *cutting*-nya itu pada saat membuat rencana jangka panjang itu anggaran kita Rp50 Triliun, kalau naik inflasi saja mestinya sekarang 60 Triliun, jadi ini separuh jadi banyak yang tidak ter-*cover*.

Nah, oleh karenanya kami tidak begitu saja melakukan menyerah ya seperti yang disampaikan oleh Bapak-Bapak Pimpinan tentang *automatic adjustment*, kami upayakan bisa di-*cover* karena PNBK kita akan tingkatkan kita naikan. Seperti disampaikan Pak Roberth bahwa kita akan intensifkan beberapa titik-titik yang memang belum dan bahkan kita akan menggunakan pihak ketiga untuk melakukan intensifikasi. Dari BLU dan PNBK kita itu dapat kurang lebih sekarang ini Rp9 Triliun, kalau naik 10%-nya Rp10 Triliun. *Nah*, kalau kita bisa gunakan itu 60% ada 6 Triliun yang bisa kita lakukan untuk menutup itu, itu yang pertama.

Yang kedua berkaitan dengan *policy* berkaitan dengan angkutan darat ya apakah itu KRL, (*suara kurang jelas*) dan sebagainya. Kami memang sering kerja sama dengan beberapa universitas dan beberapa pengamat publik untuk memberikan rekomendasi ya apa yang harus kita lakukan termasuk melakukan pentahapan dari ODOL tadi.

Lalu berkaitan dengan karena ini banyak pertanyaan berkaitan dengan udara. Udara ini memang kita dilematislah ya, mana yang diusulkan mana *nggak*, bukan karena *nggak* ada Pak, tentang Kayong Utara, Kayong Utara itu terlalu dekat dengan Ketapang, jadi kita akan prioritaskan Ketapang. Juga Pak Harvey yang di Manokwari Selatan kita tetap batalkan karena uang kita *cost* kita konsentrasikan ke Rendani, karena Rendani itu *costly* sekali kita jadi memang kita batalkan.

Jadi, ada beberapa bandara maaf kita batalkan karena anggaran juga terbatas dan kita konsentrasi di bandara-bandara yang utama. Mengenai tiket, memang sebenarnya *over demand* dan *supply*-nya itu terbatas, membuat, tapi saya sudah berhasil melakukan itu di beberapa tempat itu di Selampari ya, kan sekarang sudah tiap hari kan seminggu beberapa kali tapi terjadi kan Pak Eddy ya, juga di Sulawesi Selatan di Toraja jalan itu. Dan, tolong dikoreksi sampaikan

dengan Pak Dewo bahwa Ngloram dan Soedirman dua kali seminggu ya, jadi nanti kalau Bu Novi ke sana ditemani Pak Novie, dua Novi jalan ke sana. Jadi, itu perlu saya sampaikan bahwa kita selektif dan melakukan itu, tapi khusus Kayong Utara dan apa yang ditanya Pak Harvey memang kita *drop* karena kita konsentrasi di Ketapang dan Rendani ya.

Tol laut akan menjadi pilihan kita mungkin karena ini Pak Eddy Santana ini dulu teman saya tapi tanya terus soal ini, sekarang saya buka, Pak, itu kita ambil ke pusat karena daerah *nggak* mampu. Jadi, kita ambil ke pusat nanti tanah itu diserahkan ke kita, tadinya kita pikir mampu ternyata *nggak* mampu, *nah* kita tarik *insya Allah* kita akan lakukan percepatan-percepatan. Sekarang dalam proses KLHK ke ini karena baik di sana sudah tiga kali ditanya saya diam saja tapi begitu sekarang prosesnya.

Mungkin detail, kita akan jawab dalam pertanyaan tertulis, saya harapkan Bapak-Ibu sekalian bisa melakukan diskusi dengan Dirjen. Apa yang Bapak tanyakan nanti kami akan bahas di Kementerian agar apa yang kita lakukan ini juga bermanfaat.

Terima kasih, selamat siang.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih, Pak Menteri. Demikian rapat kita hari ini, jawaban Pak Menteri sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting. Terkait dengan jawaban tertulis tolong, Pak Sekjen ya, nanti teman-teman ini pasti akan menindaklanjuti di jawaban tertulis dengan Eselon I, nanti ya. Saya rasa demikian, kita langsung ke kesimpulan rapat.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (Ir. BUDI KARYA SUMADI):

Izin saya hari Jumat ke Kaltim, hari Sabtu ke Sulsel, kalau ada yang mau *ngikut*, Pak Irwan, Pak Hamka, mau lihat keretanya, Pak, makasih Pak.

KETUA RAPAT:

Ya, Pak Irwan nanti dampingi ke Kaltim, kalau ke Sulsel agak ramai, Pak. Jadi, mungkin Bapak mesti siap-siap harus bawa semuanya, supaya dia tidak baku cemburu dia satu sama lain. Itu hebatnya Kaltim, hebat Irwan itu pemain tunggal dia, baik kesimpulan rapat.

Draf Kesimpulan Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan 18 Januari 2023.

1. Terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perhubungan dalam APBN Tahun 2022:
 - a. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian realisasi dalam Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut: Realisasi keuangan tahun 2022, 98,02% dengan realisasi fisik tahun 2022, 99,65%. Kayaknya

kita harus kasih *applause nih, nah* dapat tepuk tangan Pak Menteri asam lambungnya sedikit berkurang. Mudah-mudahan itu bisa mengurangi rasa lapar Pak Menteri, karena Bapak juaranya *nih* mitra Komisi V ini. Dengan serapan 98,02% keuangan dan fisiknya 99,65% Menteri Perhubungan juaranya. Karena Menteri Perhubungan juara, kita kasih tepuk tangan satu kali lagi. Makin banyak berkurang asam lambungnya Pak, baik.

- b. Terhadap program kegiatan di tahun 2022 yang tidak terealisasi, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan agar menyelesaikan permasalahan dan kendala teknis pada Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2022, sehingga tidak terulang kembali pada tahun anggaran berikutnya.
2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan antara lain untuk, sesuai saran dan masukan teman-teman tadi ya:
 - a. Meningkatkan sistem monitoring, evaluasi, koordinasi dalam memaksimalkan pelaksanaan program dan anggaran pada Tahun 2023;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program subsidi *Buy The Service* (BTS).

Yang c, ini kalau poin b ini sudah kita bicarakan dari jauh-jauh hari ya, yang mana yang efektif teruskan, yang tidak efektif tolong dievaluasi Pak, supaya anggaran kita tidak tergerus di sini, poin c karena sebetulnya kalau poin b ini kita berharap masyarakat bisa mengambil alih, ini kan kalau ada peluang bisnisnya di sini;

- c. Meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektoral untuk mewujudkan *zero ODOL*, *zero ODOL* Tahun 2023;
- d. Meningkatkan sarana prasarana dan integrasi antar simpul transportasi;
- e. Meningkatkan pengawasan dalam menjaga kestabilan harga tiket;
- f. Memaksimalkan pemanfaatan bandara yang sudah selesai dibangun; dan
- g. Mempercepat penyelesaian terhadap ganti rugi kecelakaan transportasi udara.

F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Izin, Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Hamka.

F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Saya poin c, Ketua, apakah kita masih menetapkan *zero ODOL*, Pak Menteri?

KETUA RAPAT:

Ya nanti kita.

F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Kalau target.

KETUA RAPAT:

Nanti kita tanya nanti ke Menteri, Pak, karena programnya ada di Kementerian nanti kita dengarkan.

F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Gitu.

KETUA RAPAT:

Nanti akan saya tanya, karena memang target kita kalau dari Komisi V kan sepakat Pak, *nggak* boleh ada ODOL, kan kita sepakat itu. Apakah Pemerintah mampu mempersingkat berlakunya ODOL ini nanti kita tanya.

F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Makasih, Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Cocok baik, terima kasih. Kalau kita sudah setuju semua Komisi V, Bu Sri poin berapa?

F – PDIP (SRI RAHAYU):

Poin F.

KETUA RAPAT:

Poin F, silakan Bu. Memaksimalkan pemanfaatan bandara yang sudah selesai dibangun.

F – PDIP (SRI RAHAYU):

Dari tadi kan masukan-masukan tentang evaluasi terhadap bandara-bandara itu kan disampaikan banyak teman, mungkin disampaikan mengevaluasi dan memaksimalkan.

KETUA RAPAT:

Oke, baik, masukkan kata mengevaluasi, mengevaluasi dan memaksimalkan pemanfaatan bandara yang sudah selesai dibangun. Boleh saja itu, oke. Setuju teman-teman?

Setuju, baik.

(RAPAT: SETUJU)

Pak Menteri, silakan, terutama zero ODOL tadi, Pak.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (Ir. BUDI KARYA SUMADI):

Pertama, saya menjawab dulu yang b, ya. *Buy The Service* seperti yang disampaikan Pak Eddy Santana, di Sumsel itu bermanfaat. LRT itu dengan kita adakan *feeder* itu okupansinya naik pesat *gitu* ya.

Saya nanti ke Makassar Pak Hamka, akan membuat *buy the service* itu dari bandara ke Mandai. Sehingga, yang kita evaluasi bukan programnya, tetapi titik-titiknya yang salah. Jadi, pengalaman kita di Surabaya dia itu berhimpitan Pak, dengan yang ada, jadi bahkan membunuh yang sudah ada *gitu*. Jadi, titik-titiknya yang kita tentukan, *nah*, khusus Makassar saya akan lakukan itu, jadi setuju

KETUA RAPAT:

Mungkin *gini*, Pak Menteri, saya tambahkan saja. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, pelaksanaan program. Berarti kan nanti mana simpul yang *nggak* pas diperbaiki mana *feeder* yang harus dipindahkan ya kita rubah dan seterusnya.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (Ir. BUDI KARYA SUMADI):

Yang ODOL, kita sedang melakukan diskusi untuk melakukan pentahapan, ya, mungkin bulan ini juga, nanti diskusi ini kami laporkan atau dari Komisi V kalau ada perwakilan, ikut dalam diskusi itu. Tapi, itu setuju, terus yang disampaikan oleh Ibu tadi tentang mengevaluasi bandara, setuju Ibu. Karena pada dasarnya selain saya sudah berhasil, Toraja, Selampari, Bandara Soedirman dan Ngloram itu berhasil, saya ke Soedirman sendiri, Bu dan saya kumpulkan, Bu Novi waktu itu *nggak* ikut ya, beberapa Bupati, Ngloram itu *vicon*, *gitu* ya. Jadi beberapa Bupati akan saya kumpulkan termasuk di Jenderal Soedirman, Way Kanan itu dulu itu mereka ngotot, *nah* kita nanti kumpulkan semua Bupati yang sekitar situ.

Nah, saya minta tolong kepada Bapak-Bapak sekalian, kalau ada permintaan-permintaan itu kita *ajak* dialog. Nanti kalau *occupancy* itu mencapai suatu jumlah di atas 70% itu akan diterbangi, jadi nanti kita akan berkurang. Saya setuju usulnya Bu Novi, mana yang kita jadikan apa namanya, sekolah ya. Tapi memang Pak Eddy, dua bandara yang buat Pemda itu tidak memenuhi

syarat untuk dilaksanakan, saya sudah ke Musi Banyuasin, ya. Tapi untuk sekolah, kami sudah ada tempat *gitu*, nanti memang masih susah.

Makasih.

KETUA RAPAT:

Baik, ini oke Pak, ya. Siap baik saya ketok.

(RAPAT: SETUJU)

Baik Bapak-Ibu sekalian, dengan disimpulkannya rapat kita pada hari ini, dengan disepakati kesimpulan rapat maka selesailah rapat kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, Pak Menteri mungkin ada kata-kata penutup mau disampaikan.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (Ir. BUDI KARYA SUMADI):

Terima kasih.

**Pak Ketua,
Pak Wakil Ketua, dan
Bapak-Ibu Anggota,**

Kita cukup detail bicara dan saya terima kasih, apapun kritisnya yang Bapak-Ibu lakukan terbukti kami bisa menyelesaikan anggaran dengan baik dan meningkatkan PNBP dan itu terima kasih atas dorongan untuk melakukan itu. *Nah*, oleh karenanya kami mohon dukungan untuk melakukan optimasi terhadap PNBP sekarang ini, *eh* apa APBN sekarang bahkan mungkin ada pengalihan-pengalihan agar apa yang kita bahas itu bisa *ter-cover*.

Dan yang kedua, ketakutan kita tentang *automatic adjustment* bisa kita *cover* dengan PNBP dan BLU dan kita juga melakukan *creative financing*. Contohnya sekarang di Maluku Utara, Sofifi kita tawarkan kepada swasta. Terus pelabuhan Belang-Belang, Bau-Bau juga Timika ini sebagian dekat dekat kampung Bapak Pak, kita kasih swasta supaya mereka bisa lakukan lewat itu. Jadi supaya kita menghemat uang, supaya kita bisa membangun apakah itu yang di ASDP, apakah di pelabuhan dan sebagai macam, jadi kita dorong *creative financing*. Juga, terminal-terminal kalau ada yang berminat itu yang bagus itu Bandung, Cirebon, Bandar Lampung itu kita tunggu karena Walikotanya mau membuat *PPP project* jadi kita *nggak* masuk di situ, tapi memang ini sudah berapa bulan sudah tiga bulan.

Jadi kalau Bapak-Ibu sekalian ada teman yang mampu untuk mengembangkan pelabuhan, terminal, bandara itu kita siap untuk melakukan itu. Dan, sudah terbukti di Gorontalo kita sudah lakukan ya dan beberapa tempat yang lain. Dan, kita berhasil membangun Kediri dengan *zero* anggaran APBN itu dari Gudang Garam ya. *Nah*, Pacitan ya, itu bisa ke Kediri Pak, buka sebentar lagi Pak, oh ada jalan tol nanti Pak, ya jalan tol ke sana. Saya pernah ke Pacitan Pak, jadi *tau* situasinya, makasih.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Menteri, terima kasih.

F – P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Ketua, Pak Ketua. Boleh tanya yang tentang jalan berbayar *aja*.

KETUA RAPAT:

Kok nanya lagi?

F – P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Oh.

KETUA RAPAT:

Yang ERP ya? Setelah itu nanti kita agendakan juga boleh, biarkan Pemerintah dulu melaksanakan itu. Nanti setelah selesai tolong Pak, disampaikan di Komisi V, kita bahas secara bersama di sini ya.

F – P. NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH.):

Pak, Pak Lasarus, saya belum mendengar kok *statement* Bapak tadi berkaitan dengan Kayong kalau memang mau dilanjutkan lanjut, kalau tidak di *anu aja*, Pak.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Bapak *mic*, Pak.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (Ir. BUDI KARYA SUMADI):

Jadi Kayong Utara ini sampai sekarang kan tidak pembebasan tanah. Dan, sekarang ini *relatively* Ketapang itu memenuhi syarat, memenuhi syarat ya. Dan, Kayong itu kalau dia bebasin tanah, selesainya nanti 2024, kalau kita mulai kalau *nggak* selesai nanti mangkrak, Pak. Jadi, bukan Kayong Utara saja, Rendani atau Manokwari Selatan juga kita *drop* dulu, bahwa kita selesaikan desainnya boleh, Pak, tetapi kita belum berani melakukan itu.

Jadi, yang kita *drop* bukan Kayong Utara saja, Manokwari Selatan juga kita *drop*, Sumatera Selatan dua juga kita *drop*, ya, yang di Musi Banyuasin dengan Ranau itu kita *drop* dulu, karena terbukti Pagaralam *nggak* maksimal *gitu*. Jadi, apa yang kita lakukan ini sebenarnya memang yang bukan adil lah ya, mengoptimalkan tentang fasilitas yang ada. Saya pernah mendarat di Kayong Utara habis itu saya ke Ketapang *nggak* terlalu jauh. Jadi, masalahnya nanti di Ketapang itu apa yang harus kita lakukan kita bahas sama-sama. *Nah*, di sini ada Kalbar tiga orang, kita duduk bersama tiga orang Kalbar, sama.

F – P. NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH.):

Saya pikir kalau itu tidak perlu, Pak, karena *gini* kaitan dengan persoalan ini bukan persoalan apa-apa. Ya kan kita sudah punya macam-macam, bukan persaingan saya, Pak Boyman, Pak Lasarus ini bukan orang per orang, Pak. Artinya ini kan sudah punya perencanaan, bukan artinya keinginan orang per orang, Pak, jadi kaitan dengan ini saya kira tidak juga berkaitan dengan itu. Tapi kalau sudah ada kajian memang itu tidak layak ya *ngapain gitu*, jangan di *comply* Pak Lasarus, Pak Boyman, saya *gitu*. Seolah-olah Pak Lasarus tidak setuju, Pak Boyman *nggak* setuju, saya mau di situ ada urusan apa, karena kaitan ini adalah kaitan masalah pembangunan di daerah.

Jadi, ini saya kira saya minta ini karena kita ditanya terus juga ini. Karena dulu juga saya masih ingat di sini, saya masih anggota pada waktu itu. Padahal waktu itu saya sudah bilang, kenapa *nggak* di Ketapang, Ketapang itu menyediakan dua tempat, kebetulan pada saat itu dan ini di Dapil saya, Pak. Pada waktu itu (*suara kurang jelas*) dengan Tempurukan Ketapang, hasil kajian dari Kementerian pada waktu itu mengambil Kayong bahkan saya, siapa pada waktu itu Dirjennya ada ke sana. *Nah*, ini jangan dibuat *ngambang* seperti itu, artinya bukan orang per orang, ini masalah pembangunan daerah.

Saya kira itu saja, Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya *oke gini* saja, Pak Menteri, sudahlah tadi kan Bapak kalau memang yang semua kegiatan yang tidak selesai 2024, kan di *drop*, kesimpulannya itu keputusan Presiden saya juga tahu itu. Jadi, Pak Menteri *nggak* mungkin melanggar itu kecuali bisa selesai 2024. *Nah*, sekarang ya terserah, Pak Menteri, tadi sudah jawab sebetulnya Pak Menteri ini. Kalau memang itu mau dilanjut sampaikan saja akan dilanjutkan atau tidak akan dilanjutkan *gitu* saja barangkali Pak Menteri, silakan, biar Pak Syarif jelas Pak. Jadi, jangan dikaitkan kita-kita, memang betul itu tidak pas juga, silakan.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (Ir. BUDI KARYA SUMADI):

Jadi *gini*, Pak, saya ada punya dua *case* ya, satu yang ditanyakan oleh, tiga *case* bahkan, yang ditanyakan Pak Harvey itu kita *drop*, sudah ada perencanaannya juga Pak, karena dua tahun ini *nggak* mungkin kita mengeluarkan 600 miliar di satu titik. Yang kedua adalah yang di Sumatera Selatan ya, yang ketiga di Sofifi Pak, Sofifi itu Ibukota, ada anggaran 600 miliar jadi saya kumpulkan pengusaha di situ. Jadi, kalau ada KPBU di situ, ya mungkin kalau APBN mungkin bisa 200 miliar lah, 400 miliar itu cari dari KPBU, sama perlakuannya dengan Sofifi.

Benar Pak Lasarus, pembangunan-pembangunan yang 2024 tidak selesai harus kita tunda, dan uang-uang ini akan kita lakukan untuk penyelesaian, seperti yang Pak Eddy Santana itu. Yang namanya Tanjung Api-Api tidak ada APBN sedikit pun, kita lakukan KPBU di situ. Jadi, bukan karena

Pak Syarif di situ atau Pak Boyman di situ, tetapi memang kita berlakukan di berbagai tempat, Pak. Jadi Manokwari Selatan, ada juga di danau Ranau dan juga Sofifi, empat sama *anu*, Kayong Utara. Ini adalah perdebatan yang dari Bapak-Ibu, apalagi tadi kan dipertanyakan, banyak yang tidak disinggahi. Kalau ini terjadi ada Ketapang dan ada Kayong Utara, ini apa yang dikuatirkan oleh Bapak-Ibu terjadi lagi. Karena Ketapang menurut saya *nggak* mungkin ditutup, orang lebih senang ke Ketapang lebih banyak penumpangnya, Pak, *gitu*. Tapi juga karena nanti kalau kita evaluasi lagi kalau ini terjadi karena dua tahun yang lalu, kita bisa anggarkan, 100, 100, 100 *gitu*.

Jadi itu Pak, jadi bukan Kayong Utara saja, Manokwari Selatan, Danau Ranau dan Sofifi, kita juga evaluasi Sofifi dalam hal ini ada investornya kita berikan. Tapi Manokwari Selatan sudah *visible* tapi tidak ada investornya, kita dorong. Sofifi nanti kalau katakanlah anggarannya itu tidak ada dari swasta ya kita *drop* juga dan itu perintah Presiden, Pak, Presiden perintah saya langsung itu. Ya Pak saya cari KPBU, Pak, jadi Kayong Utara kalau bisa kita cari-cari sama dengan Singkawang kan, Singkawang juga pakai KPBU. Jadi, kita bikin nanti terminalnya swasta, saya lagi *ngumpulin* orang-orang Singkawang untuk menyelesaikan terminalnya, kalau *nggak*, *nggak* selesai. Jadi, bukan saya pilih kasih, Pak, ada empat case yang sama yang kita *drop* dan itu juga saya diminta oleh Ibu-Ibu dan Bapak untuk mengevaluasi bandara-bandara yang ada dianggap tidak produktif. Jadi bagaimana kita akan membangun, yang sekarang saja kita belum evaluasi.

Makasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Baik saya rasa cukup jelas, ya cukup ya. Baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian maka selesailah rapat kita pada hari ini. Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* saya nyatakan rapat ini selesai ya. Mohon maaf Pak Menteri manakala ada dalam rapat ini pada Pak Menteri serta jajaran ada hal-hal yang kurang berkenan dari kata yang terucap, sikap yang keliatan mungkin Pak Menteri kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, rapat saya nyatakan selesai dan saya tutup.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

(RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 14.30 WIB)

JAKARTA, 18 Januari 2023

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002

